

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue untuk masa bhakti 2012-2017 diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 selama lima tahun ke depan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; huruf b, huruf c; dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mencapai tujuan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Simeulue adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan hasil penyesuaian.
12. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPK Tahun 2012-2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Simeulue.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Simeulue untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian pembangunan di Kabupaten Simeulue yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda Simeulue, adalah Kepala SKPK yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD Kabupaten berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan pembangunan selama (lima) tahun dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| BAB I | : Pendahuluan; |
| BAB II | : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten; |
| BAB III | : Gambaran Pengelolaan Keuangan Kabupaten Serta Kerangka Pendanaan; |
| BAB IV | : Analisis Isu-Isu Strategis; |
| BAB V | : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | : Strategi dan Arah Kebijakan; |
| BAB VII | : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten; |
| BAB VIII | : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan; |
| BAB IX | : Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten; |
| BAB X | : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; |
| BAB XI | : Penutup. |

Pasal 4

RPJMD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. Memberikan gambaran tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renstra SKPK periode 2012-2017;
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan RKPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan periode 2012-2017;
- c. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 6

RPJMD Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) RPJMD Kabupaten dalam perjalanannya bila diperlukan dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.
- (2) Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (4) Qanun RPJMD Kabupaten Tahun 2012-2017 menjadi dasar dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2013 pada masing-masing SKPK lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Qanun RPJMD Kabupaten Tahun 2012-2017 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJMD Kabupaten transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RK Kabupaten Tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2020 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten tahun 2012-2017 dituangkan dalam RPKP yang merupakan masukan utama guna penyusunan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE, 

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH



NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 8

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Maksud Dan Tujuan	I-2
1.3.	Landasan Hukum	I-3
1.4.	Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya	I-5
1.5.	Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIMEULUE	II-1
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.	Karakteristik dan Luas Wilayah.....	II-1
2.1.1.1.	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2.	Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.3.	Topografi.....	II-3
2.1.1.4.	Geologi	II-4
2.1.1.5.	Hidrologi.....	II-7
2.1.1.6.	Klimatologi.....	II-10
2.1.1.7.	Penggunaan Lahan	II-10
2.1.2.	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-19
2.1.3.	Wilayah Rawan Bencana.....	II-20
2.1.4.	Demografi.....	II-20
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
2.2.1.	Inflasi	II-25
2.2.1.1.	Laju inflasi	II-25
2.2.1.2.	Pendapatan Perkapita	II-26
2.2.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-27
2.2.2.1.	Aksesibilitas Daerah.....	II-27
2.2.2.2.	Sektor Energi	II-30
2.2.2.3.	Sektor Lingkungan Hidup	II-31
2.2.2.4.	Sektor Komunikasi dan Informasi	II-32
2.2.2.5.	Sektor Air Bersih.....	II-33
2.2.2.6.	Sektor Irigasi.....	II-34
2.2.3.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-35
2.2.3.1.	Pendidikan	II-35

2.2.3.2. Kesehatan	II-37
2.2.3.3. Tingkat Kemiskinan	II-44
2.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia	II-46
2.2.3.5. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-45
2.2.4. Fokus Syariat Islam, Seni Budaya dan Olahraga	II-47
2.2.4.1. Syariat Islam	II-47
2.2.4.2. Group Kesenian	II-49
2.2.4.3. Club Olahraga dan Gedung Olahraga	II-50
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-50
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-50
2.3.1.1. Pendidikan	II-50
2.3.1.2. Kesehatan	II-55
2.3.2. Fokus Iklim Berinvestasi	II-56
2.3.2.1. Fokus Sumber Daya Manusia	II-56
2.3.2.2. Tingkat Ketergantungan	II-57

**BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN.....**

3.1. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue	III-1
3.1.1. Analisis Pendapatan Daerah	III-1
3.1.2. Belanja Daerah	III-5
3.1.2. Analisis Pembiayaan	III-9
3.1.2. Neraca Daerah	III-10
3.2. Kerangka Pendanaan.....	III-13

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1. Infrastruktur Daerah.....	IV-2
4.1.2. Perekonomian Daerah	IV-3
4.1.3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan	IV-4
4.1.4. Sosial Budaya.....	IV-5
4.1.5. Tata Pemerintahan	IV-7
4.2. Isu Strategis	IV-10

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....

5.1. Visi.....	V-1
5.2. Misi	V-2

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN SIMELUE NOMOR
23 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SIMELUE TAHUN 2012-2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue.

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 didasarkan pada pertimbangan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah diangkat/dilantik pada tanggal 16 Juli 2012.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam pelaksanaannya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

RPJMD terkandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, yang merupakan implementasi periode lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD. RPJMD ini selanjutnya harus dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai bentuk perencanaan tahunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan.

RPJMD Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 merupakan pelaksanaan dari periode kedua RPJPD Kabupaten Simeulue, dimana proses dan tahapan penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, RPJMD terdiri atas 6 (enam) tahapan yang diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan empat pendekatan penting yaitu: *Pertama*, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. *Kedua*, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. *Ketiga*, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD berdasarkan visi misi Bupati terpilih dan melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. *Keempat*, pendekatan *bottom up* dan *top down* yang merupakan proses perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Selanjutnya, karena berbagai fungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang Pelayanan Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, sehingga matriks rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Hasil Kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategi nasional, propinsi dan daerah yang dirangkum dalam RPJP Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 5 tahunan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu perbuatan dan tindakan.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue 2012 – 2017 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya, guna mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian-penyesuaian menurut kondisi daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Kabupaten Simeulue sebagai Daerah Kepulauan, Daerah Rawan Bencana dan Daerah Terluar dalam dimensi waktu 5 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

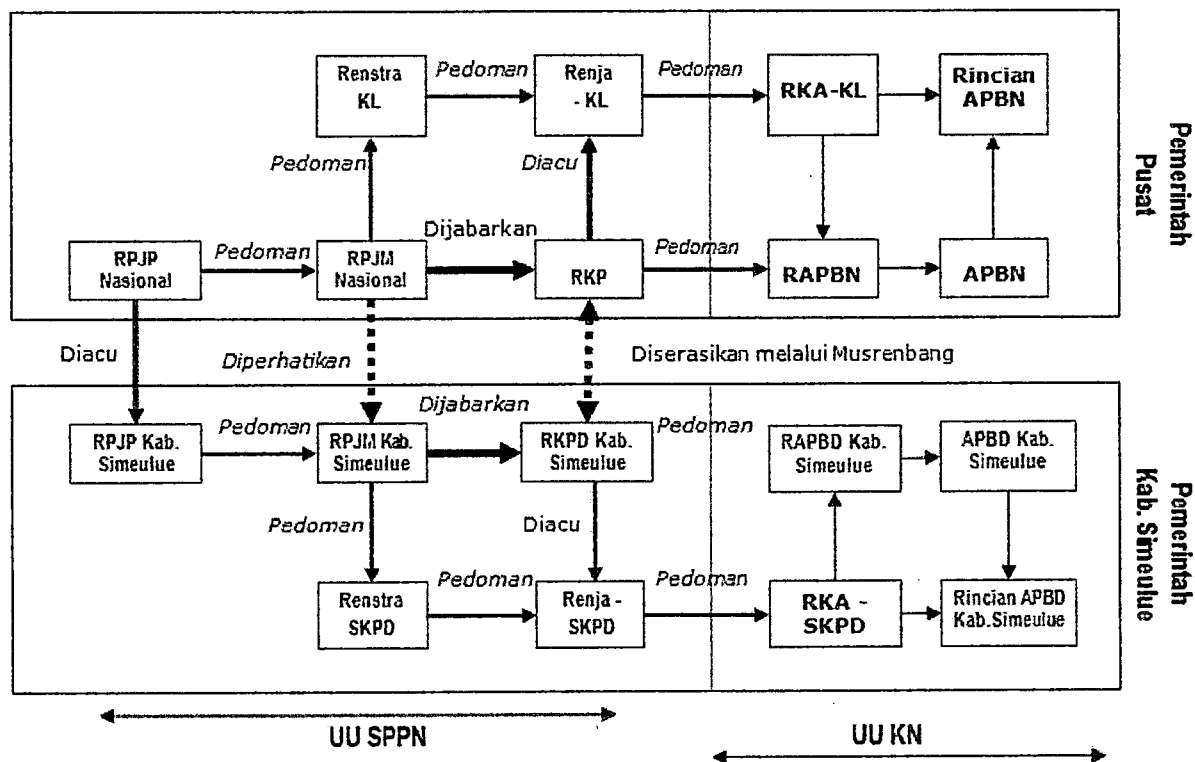
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang nomor 11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; +
16. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 - 2014
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017.

1.4. Hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), dan Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencanaan Tata Ruang Wilayah (20 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra- SKPK, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPK dan Renja-SKPK. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK, Rencana Kerja (Renja) SKPK dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK. Dari RKP Kabupaten dan RKA-SKPK inilah selanjutnya disusun RAPBK. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Gambar. 1.1 Hubungan RPJM Kabupaten Simeulue dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, dan sistematika penyusunan.
- Bab II Gambaran umum kondisi daerah, yang memuat gambaran umum geografis daerah, kondisi demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- Bab III Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang memuat gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

- Bab IV Analisis isu-isu strategis memuat permasalahan pembangunan daerah termasuk kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasi serta isu strategis dimana kondisi eksternal yang berpengaruh baik positif maupun negatif dimasa datang terhadap daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat apa yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan sasaran merupakan tujuan yang ingin dicapai yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batas waktu yang jelas
- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, kemudian arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat kebijakan umum yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sedang program pembangunan daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan, memuat program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan di bagi dalam kegiatan wajib dan pilihan.
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah menjelaskan mengenai indikator kinerja menurut Aspek, Fokus, Bidang Urusan atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Menurut Urusan.
- Bab X Memuat Kaidah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- Bab XI Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

Kabupaten Simeulue dengan ibukotanya Sinabang, merupakan hasil perjuangan secara estafet dan berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres Rakyat Simeulue di Luan Balu. Sebelum tahun 1965 daerah ini merupakan salah satu kewedanaan dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Sejak tahun 1967 berstatus sebagai wilayah pembantu Bupati dan selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1996 menjadi Kabupaten Administrasi dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 diresmikan menjadi Kabupaten Otonom berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 1999 bersamaan dengan Kabupaten Bireuen.

Pada awal dibentuknya Simeulue sebagai Kabupaten Otonom, Kabupaten Simeulue hanya terdiri dari 5 kecamatan dengan ibukota berada di Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur. Untuk kemudian pembagian wilayah administrasi terus berkembang hingga saat ini menjadi 10 kecamatan dan 138 desa dengan Ibukota Kabupaten tetap berada di Sinabang.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik dan Luas Wilayah

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan dengan panjang \pm 100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km. Daerah ini terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 63 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan digitasi Peta RBI Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah daratan Simeulue adalah 183.809,50 Ha, atau berkisar 3,26 % luas wilayah daratan Provinsi Aceh, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebeilah Utara : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dibanding dengan luas wilayah beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh, luas wilayah Simeulue lebih besar dari Kota Banda Aceh (6.136 ha), Kota Sabang (15.300 ha), Kota Lhokseumawe (18.100 ha), Kota Subussalam (101.100 ha), Kota langsa (26.241 ha), Pidie Jaya (57.444 ha), Kabupaten Aceh Barat Daya (168.500 ha) dan Kabupaten Bener Meriah (1.454 km²).

Apabila dilihat dari luasan kecamatan yang ada dalam Kabupaten Simeulue, Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas wilayah terbesar, yaitu mencapai 44.607,40 ha atau 24,27% persen dari total wilayah Simeulue. Disusul Kecamatan Teluk Dalam dengan luas wilayahnya 22.467,74 Ha (12,22 persen). Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Simeulue Cut dengan luasnya hanya 3.539,92 (1,93 persen).

Table 2.1
Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Luas Menurut Digitasi Peta RBI (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)	Jumlah	
				Mukim	Desa
1	Teupah Selatan	22.223,80	10,44	4	19
2	Simeulue Timur	17.597,25	9,57	4	17
3	Teupah Tengah	8.369,55	4,55	2	12
4	Teupah Barat	14.673,05	7,98	3	18
5	Simeulue Tengah	11.248,34	6,12	3	16
6	Simeulue Cut	3.539,92	1,93	2	8
7	Teluk Dalam	22.467,74	12,22	2	10
8	Salang	19.895,55	10,82	3	16
9	Simeulue Barat	44.607,40	24,27	4	14
10	Alafan	19.186,90	10,44	2	8
JUMLAH		183.809,50	100	29	138

Sumber : Dokumen RTRWK Simeulue 2012-2032

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 wilayah daratan Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dan berada pada posisi astronomi antara 02° 15' 03"- 02° 55' 04" Lintang Utara dan 95° 40' 15" - 96° 30' 45" Bujur Timur.

Hampir 78,51 persen atau 106 desa dari keseluruhan 138 desa di kabupaten ini merupakan desa pesisir. Desa pesisir ini lebih dominan ditemui di Kecamatan Simeulue Timur, disamping Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teupah Barat. Sementara desa bukan pesisir (dataran) paling banyak terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah.

2.1.1.3 Topografi

Keadaan topografi Pulau Simeulue dimana titik terendah terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut. Hasil interpolasi garis kontur interval 50 meter dari peta rupa bumi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0 – 300 meter dari permukaan laut dan bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan di bawah 18° terletak di bagian tengah pulau terutama pada daerah pegunungan di sebelah Utara dan Selatan. Lihat Tabel 2.2

Tabel. 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Ketinggian Tempat (M)
Di atas Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian Tempat (m DPL)					Jumlah	
		0 – 50 m	50 – 100 m	100 – 200 m	200 – 300 m	> 300 m	Ha	%
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha		
1	Teupah Selatan	13.496,73	7.664,06	1.004,15	58,85	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	7.339,61	3.226,32	3.736,34	2.079,07	1.215,92	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	3.972,14	2.424,30	1.824,76	148,35	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	4.579,50	2.865,18	3.803,99	2.059,01	1.365,38	14.673,06	7,98
5	Simeulue Tengah	6.007,90	2.742,29	2.198,37	294,20	5,58	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	2.650,82	671,42	191,32	26,37	-	3.539,92	1,93
7	Teluk Dalam	10.798,69	5.739,08	5.027,65	872,18	30,14	22.467,75	12,22
8	Salang	10.582,66	4.937,09	3.920,09	430,55	25,15	19.895,55	10,82
9	Simeulue Barat	16.892,45	14.357,76	10.110,13	3.110,62	136,44	44.607,40	24,27
10	Alafan	9.566,25	6.144,13	3.134,28	339,41	2,84	19.186,91	10,44
Total		85.886,75	50.771,63	34.951,08	9.418,58	2.781,46	183.809,51	100,00
Prosentase Sebaran		46,73	27,62	19,01	5,12	1,51	100,00	

Sumber : Dokumen RTRWK Simeulue 2012-2032

Variasi tinggi rendahnya permukaan bumi menyebabkan terjadinya perbedaan sudut kemiringan lahan. Faktor kemiringan lahan mempengaruhi perkembangan dan pembentukan tanah secara alami, kerusakan tanah dan produktifitas tanah sebagai media tanam. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa antara laju pembentukan tanah dan kerusakan tanah tidak seimbang karena pengaruh aktifitas manusia. Wilayah Kabupaten Simeulue memiliki lahan dengan kelas kemiringan lahan datar sampai curam. Kelas

kemiringan lahan datar umumnya pada daerah pantai, bantaran sungai dan rawa-rawa.
Lihat Tabel 2.3

Tabel. 2.3
Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kemiringan lahan (%)

No.	Kecamatan	Keilas Lereng (%)					Jumlah	
		0-8 % (datar)	8-15 % (Landai)	15-25 % (Agak Curam)	25-40 % (Curam)	>40 % (Sangat Curam)	Ha	%
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha		
1	Teupah Selatan	21.730,19	475,94	17,24	0,42	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	9.975,63	5.596,42	1.792,73	214,13	18,34	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	6.102,42	2.025,54	239,81	1,78	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	6.817,11	6.247,72	1.507,86	97,96	2,41	14.673,06	7,98
5	Simeulue Tengah	8.615,69	2.425,55	206,38	0,72	-	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	3.164,37	353,75	21,80	0,00	-	3.539,92	1,93
7	Teluk Dalam	16.707,54	5.098,59	613,06	46,86	1,69	22.467,75	12,22
8	Salang	14.240,90	4.853,95	758,11	41,74	0,85	19.895,55	10,82
9	Simeulue Barat	30.805,31	12.109,49	1.649,46	41,86	1,27	44.607,40	24,27
10	Alafan	13.580,93	5.001,67	587,24	15,81	1,26	19.186,91	10,44
Totai		131.740,06	44.166,61	7.593,71	401,29	23,62	183.809,30	100,00
Prosentase Sebaran		71,67	24,04	4,02	0,25	0,01	100,00	

Sumber : Dokumen RTRWK Simeulue 2012-2032

2.1.1.4 Geologi

Secara litologi, jenis batuan penyusun Pulau Simeulue terdiri dari batuan formasi Bancuh Kuala Makmur yang merupakan batuan tertua dan merupakan batuan dasar (*basement rock*) di pulau ini. Formasi bancuh atau campur aduk ini berupa bongkah batuan aneka bahan yang terdiri dari batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabak dan rijang.

Bongkah – bongkah batuan dengan berbagai ukuran (dari beberapa cm sampai lebih dari 250 m) terdapat dalam matriks atau massa dasar batu lumpur dan batu lempung yang tergerus kuat. Formasi batuan ini diperkirakan terbentuk selama Oligo Miosen yaitu pada masa tumbukan antara Lempeng India-Australia dengan Lempeng Eurasia.

Susut laut pada Miosen Tengah menghasilkan Endapan Karbonat Formasi Sibigo yang terdiri dari batu gamping koral, kalkarenit dan kalsirudit. Di atas formasi ini dengan lingkungan endapan laut dangkal terendapkan Formasi Sigulai yang terdiri dari napal dan batu pasir kuarsa. Di dalam batu pasir banyak terdapat bahan karbon, setempat tufaan dan

gampingan. Sebagai bagian dasar dari formasi ini terdapat Anggota Lasikin yang terdiri dari konglomerat aneka bahan terdiri dari fragmen batuan ultra basa, gabro, basal, kuarsa susu dan rijang.

Formasi dan anggota ini terendapkan selama Miosen Awal-Akhir. Diatas Formasi Sigulai dengan lingkungan endapan darat pada Miosen Akhir-Pliose Awal terendapkan Formasi Layabaung yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa dan batu lempung tufaan mengandung kuarsa gelas gunung api dan bahan karbon. Formasi layabaung ini berjemari dengan Formasi Dihit yang terdiri dari arenit dengan sisipan batu lanau dan batu lempung. Formasi Dihit dijumpai menyebar secara luas hampir mendominasi Pulau Simeulue.

Batu gamping terumbu berupa batu gamping koral, kalkarenit dan kalsilitit, massif, diperkirakan berumur Plistosen hingga Holosen membentuk pulau-pulau kecil dan teras-teras di sepanjang pantai Pulau Simeulue. Endapan paling muda yaitu endapan masa kini, dijumpai endapan danau terdiri dari lempung, lanau dan pasir halus, tersebar di sekitar Danau Amabaan di daerah Sibigo, endapan rawa tersebar dibanyak tempat, terdiri dari lempung, Lumpur dan pasir banyak mengandung sisa tumbuhan, dan endapan alluvium sebagai endapan sungai dan pantai terdiri dari lumpur, pasir, lempung, kerikil dan kerakal.

Pulau Simeulue termasuk di deretan kepulauan busur luar. Struktur geologi Pulau Simeulue mencerminkan suatu kompleks yang dipengaruhi oleh adanya tumbukan dan penyusupan lempung dasar Samudera India-Australia ke bawah lempeng Benua Eurasia. Seperti halnya deretan kepulauan busur luar, penyusupan kedua lempeng yang terletak di Samudera Hindia yaitu sebelah barat daya Pulau Simeulue secara regional menerus dan memanjang disepanjang barat Pulau Sumatera, selatan jawa menerus ke perairan Maluku dan Irian.

Struktur geologi yang berkembang di Pulau Simeulue dijumpai beberapa struktur patahan, lipatan, kekar dan perdaunan. Struktur patahan dijumpai berupa patahan geser, patahan bongkah dan patahan naik. Ketiga jenis patahan ini berkembang membentuk pola yang menyebar hampir diseluruh pulau dengan arah umum barat laut-tenggara dan timur laut barat daya.

Patahan geser yang paling besar adalah Patahan Pagaja yang berarah barat laut-tenggara memanjang hampir sejajar dengan arah memanjang Pulau Simeulue. Patahan naik dan patahan bongkah dijumpai masing-masing disebelah timur dan selatan di Kecamatan Teluk Dalam. Struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin sumbu-sumbu lipatannya berarah barat laut-tenggara, dijumpai pada Formasi Layabaung dan Formasi Dihit. Struktur kekar dan perdaunan dijumpai pada batuan-batuan dari hampir seluruh formasi dengan arah dan

ukuran yang beragam. Secara rinci persebaran formasi batuan yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel. 2.4.
Luas Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Susunan Geologi

No.	Kecamatan	Formasi Batuan									Jumlah	
		Alluvium	Anggota Laskin	Bancuh Kuala Makmur	Batu Gamping Terumbu	Endapan Danau	Formasi DHR	Formasi Layabatang	Formasi Sibbe	Formasi Sigabat	Ha	%
		Ha	Ha	Ha	Ha					Ha		
1	Teupah Selatan	7.077,67	2.147,08	343,29	6.596,81	-	6.058,94	-	-	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	2.523,68	1.007,13	3.163,33	1.423,62	-	9.479,47	-	-	-	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	1.605,53	113,39	178,47	-	-	6.472,16	-	-	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	808,44	-	-	-	-	13.864,62	-	-	-	14.673,06	7,98
5	Simeulue Tengah	1.123,02	-	-	67,28	-	9.072,30	985,74	-	-	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	1.441,81	-	-	-	-	1.390,05	708,07	-	-	3.539,93	1,93
7	Teluk Dalam	2.905,96	-	973,39	1.208,20	3.537,17	13.616,66	-	226,37	-	22.467,75	12,22
8	Salang	4.748,64	-	-	-	-	8.401,02	6.745,89	-	-	19.895,54	10,82
9	Simeulue Barat	5.301,52	-	-	0,18	2.937,52	15.664,49	8.032,28	7.272,21	5.399,21	44.607,40	24,27
10	Alafan	416,42	-	-	377,54	-	15.115,88	-	-	3.277,07	19.186,91	10,44
Total		27.952,67	3.267,60	4.658,48	9.673,64	6.474,70	99.135,59	16.471,97	7.498,57	8.676,28	183.809,50	100,00
Prosentase Sebaran		15,21	1,78	2,53	5,26	3,52	53,93	8,96	4,08	4,72	100,00	

Sumber : Bappeda Provinsi (diolah)

Diwilayah Kabupaten Simeulue mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata**, banyak diupayakan oleh masyarakat diareal sawah. Upaya ini banyak dilakukan di Kecamatan Simeulue Timur.
- Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu)**, banyak terdapat di Sungai Kuala Makmur, Sungai Kuala Baru, Sungai Kota Batu, dan Sungai didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
- Bahan galian atau butiran emas**, potensi jenis batuan ini masih dalam tahap eksplorasi.

Jenis batuan lainnya yang merupakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kabupaten Simeulue, adalah ; **Batuan gamping** tersebar di kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Teluk Dalam dan Alafan.

2.1.1.5 Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Simeulue, sebagaimana kondisi hidrologi kepulauan sangatlah terbatas. Hingga saat ini potensi ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sehingga masih dirasakan cukup. Sumber air permukaan di kepulauan Simeulue berasal dari beberapa mata air, sungai dan danau.

Di Pulau Simeulue banyak dijumpai sungai, baik sungai sepanjang tahun maupun sungai musiman, umumnya berpola dendritik, parallel dan sub parallel. Kualitas air, jernih sampai keruh dengan pH rata – rata 6.5

Rawa umumnya dijumpai didaerah pantai, air berwarna jernih kecoklatan, umumnya payau dengan pH sekitar 6.

Mata air dijumpai di beberapa tempat, umumnya pada Formasi Dihit antara lain di Desa Labuah, Desa Kuala Makmur, Desa Kampung Air dan dibanyak tempat lainnya lagi. Debit air rata-rata < 1 liter/detik, jernih, tawar, tidak berbau dan tidak berasa, pH 6,5 dan dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari masyarakat setempat.

Air tanah bebas adalah air tanah yang terdapat diantara permukaan tanah dan lapisan kedap air (akifer) di bawahnya, dapat muncul sebagai mata air. Air tanah bebas dapat diamati pada sumur-sumur gali penduduk, umumnya jernih sampai kecoklatan, tidak berbau dan tidak berasa. Didaerah sekitar pantai kedalam muka air sekitar 1-2 meter, fluktuasi 1-2 meter dengan debit sekitar 10 ltr/ detik.

Biasa juga disebut air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kedap air (akifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah dengan kedalaman yang sangat bervariasi. Pengamatan hanya bisa dilakukan dengan metode pendugaan geolistrik dan hasil pemboran air didaerah Lasikin. Lapisan pembawa air terdapat pada lapisan batu pasir kedap air, pada kedalaman sekitar 120 m di bawah permukaan tanah, kurang produktif dengan debit < 2 ltr/detik, jernih, tidak berbau dan tidak berasa.

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Simeulue terdiri dari 26 Daerah Aliran Sungai yaitu:

1. DAS Sanggiran dengan luas cakupan area seluas ± 26.534,63 ha.
2. DAS Sibusu dengan luas cakupan area seluas ± 9.543,69 ha.
3. DAS Sinifung dengan luas cakupan area seluas ± 9.687,45 ha.
4. DAS Layabaung dengan luas cakupan area seluas ± 9.683,54 ha.
5. DAS Pagaja dengan luas cakupan area seluas ± 8.139,29 ha.
6. DAS Air Pinang dengan luas cakupan area seluas ± 3.963,04 ha.

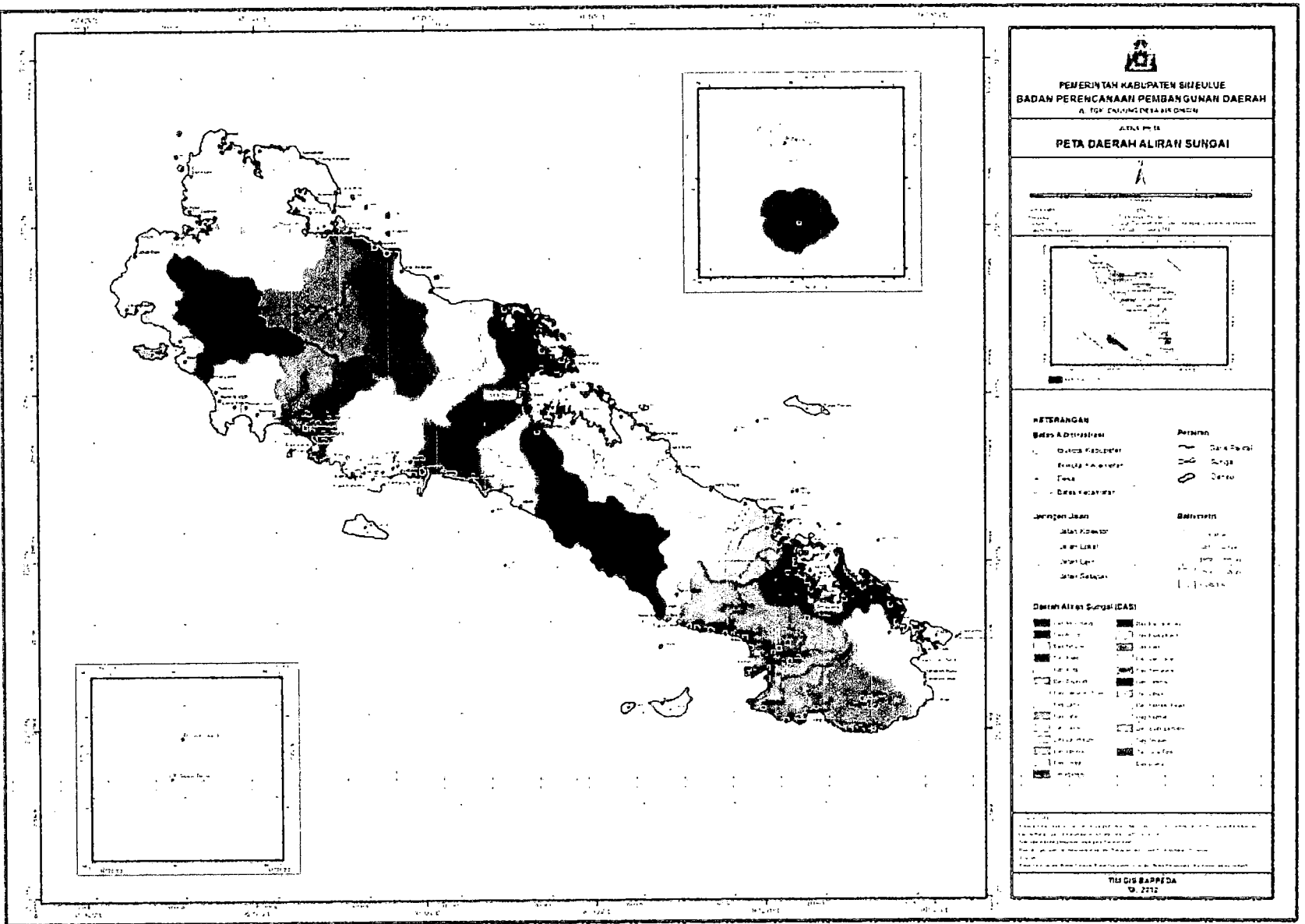
7. DAS Bota dengan luas cakupan area seluas $\pm 10.725,20$ ha.
8. DAS Delok Sibau dengan luas cakupan area seluas $\pm 7.765,71$ ha.
9. DAS Linggi dengan luas cakupan area seluas $\pm 4.390,63$ ha.
10. DAS Pucuk Anao dengan luas cakupan area seluas $\pm 6.162,21$ ha.
11. DAS Labuhan Bajau dengan luas cakupan area seluas $\pm 5.231,11$ ha.
12. DAS Suak Lamatan dengan luas cakupan area seluas $\pm 6.839,41$ ha.
13. DAS Devayan dengan luas cakupan area seluas $\pm 14.659,02$ ha.
14. DAS Sefuluh dengan luas cakupan area seluas $\pm 8.930,52$ ha.
15. DAS Amuren dengan luas cakupan area seluas $\pm 4.024,52$ ha.
16. DAS Salit dengan luas cakupan area seluas $\pm 4.451,15$ ha.
17. DAS Ladon dengan luas cakupan area seluas $\pm 8.332,30$ ha.
18. DAS Tula-tula dengan luas cakupan area seluas $\pm 4.472,28$ ha.
19. DAS Lalla dengan luas cakupan area seluas $\pm 3.966,44$ ha.
20. DAS Ujung dengan luas cakupan area seluas $\pm 5.309,95$ ha.
21. DAS Along dengan luas cakupan area seluas $\pm 10.472,98$ ha.
22. DAS Lekon dengan luas cakupan area seluas $\pm 429,16$ ha.
23. DAS Siumat dengan luas cakupan area seluas $\pm 396,73$ ha.
24. DAS Tapah dengan luas cakupan area seluas $\pm 691,31$ ha.
25. DAS Lasia dengan luas cakupan area seluas $\pm 1.495,30$ ha.
26. DAS Baby dengan luas cakupan area seluas $\pm 4.590,32$ ha.

b. Danau

Kabupaten Simeulue memiliki 4 (empat) danau yang belum pernah diteliti sumber airnya. Pemanfaatan Danau sebagai kawasan budidaya bagi masyarakat sekitar, sebagai berikut:

1. Danau Mutiara Laut Tawar di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 ha dan volume air $\pm 6.834.000$ m³;
2. Danau Lauulo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 ha dan volume air $\pm 20.352.000$ m³;
3. Danau Tirama di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 ha dan volume air $\pm 1.123.200$ m³; dan
4. Danau Luan Boya di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 ha dan volume air ± 627.000 m³.

Gambar 2.1. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Simelue



2.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Simeulue termasuk ke dalam zona iklim tropika basah dengan temperatur udara berkisar antara 23°–34,5° C dan rata-rata harian antara 25°–27° C. Berdasarkan data curah hujan yang ada menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata cukup tinggi yaitu 2.884 mm/tahun.

Musim hujan umumnya terjadi antara bulan September-Februari, sedangkan musim kemarau pada umumnya antara bulan Maret-Agustus. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Berdasarkan pada tipe iklim Oldeman, Pulau Simeulue memiliki tipe iklim A yaitu daerah dengan bulan basah selama 9 bulan berturut-turut dan selama dua bulan atau kurang mengalami musim kering. Bulan basah adalah curah hujan lebih dari 200 mm/bulan (Whitten, 1984).

Keadaan cuaca di Kabupaten Simeulue ditentukan oleh penyebaran musim, dimana musim Barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Februari, ditandai dengan terjadinya musim badai dan gelombang besar yang berasal dari Lautan Hindia sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus ditandai dengan musim kemarau diselingi oleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang. Kelembaban udara berkisar antara 60% sampai 75% dan lamanya penyinaran rata-rata perhari adalah 13 – 14 jam. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini berkisar antara 50 – 65 knot/jam.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Dokumen RTRWK Simeulue Tahun 2012 - 2017, kondisi penggunaan lahan Kabupaten Simeulue dapat dikelompokkan menjadi kawasan lindung (35,75 %) dan kawasan budidaya (64,25%)

a. Kawasan Lindung

Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penentuan kawasan lindung didasarkan atas beberapa kriteria fisik tanah meliputi ketinggian, kelerengan, daerah resapan air, dan sifat khusus lainnya sehingga dapat digolongkan ke dalam kawasan yang harus dilindungi.

Pada prinsipnya pengendalian atau pengelolaan Kawasan Lindung, adalah di dalam Kawasan Lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Di dalam Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah

bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem yang ada. Flora dan Fauna yang ada di dalam Kawasan Lindung, perlu dilindungi dan dipertahankan kelestariannya.

Perlu adanya rehabilitasi hutan atau reboisasi pada unit lahan pada Hutan Lindung yang saat ini tidak berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Kawasan Cagar Alam, Hutan Lindung atau dalam kawasan hutan yang pada kondisi sekarang sudah berubah fungsi, maka langkah selanjutnya Pemerintah Daerah dan Intansi terkait harus segera memproses dan mengajukan perubahan tersebut kepada Departemen Kehutan untuk memperoleh SK Pelepasannya.

Apabila di Kawasan Lindung terdapat adanya deposit mineral, air tanah atau kekayaan alam lainnya, yang apabila diusahakan dinilai sangat berharga bagi negara dan masyarakat maka kegiatan budidaya di Kawasan Lindung dapat diizinkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria kawasan lindung secara umum, seperti dikemukakan pada Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

1. Kawasan hutan lindung seluas \pm 60.709,97 ha berada tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu di kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Teluk Dalam, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat, Alafan, Simeulue Cut, Teupah Tengah.
2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan ruang terbuka hijau.
 - Kawasan sempadan pantai seluas \pm 1.542,82 ha berada tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
 - Kawasan sempadan sungai seluas \pm 1.387,47 ha berada tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
 - Kawasan sekitar danau seluas \pm 239,44 ha terdiri dari: danau Laut Tawar, danau Lauulo, danau Tirama dan danau Luan Boya.
3. Kawasan suaka alam yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) seluas \pm 451,51 ha berada di Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan.
4. Kawasan rawan bencana alam meliputi:
 - Kawasan rawan bencana alam banjir rendah seluas \pm 8.394,56 ha. Berada di Kecamatan Teupah Barat, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat, Simeulue Cut, Teupah Tengah dan Alafan.
 - Kawasan bencana rawan gerakan tanah tinggi seluas \pm 3.602,17 ha berada di Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, Teupah Barat dan Simeulue Tengah.
 - Kawasan bencana rawan tsunami tinggi seluas \pm 22.195,42 ha berada tersebar di seluruh kecamatan.

- Kawasan rawan gempa bumi tektonik meliputi seluruh wilayah kabupaten.

b. Kawasan Budidaya

Pada dasarnya kawasan di luar fungsi kawasan lindung adalah kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang karena kondisi dan potensi fisik sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia termasuk kebutuhan untuk lahan pemukiman dan pertanian. Rencana Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Simeulue terdiri dari:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
 - Hutan produksi terbatas seluas $\pm 3.485,95$ ha yang berada di Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Barat dan Alafan
 - Hutan produksi tetap seluas $\pm 24.407,74$ ha, berada tersebar di Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Timur, Teluk Dalam, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat, Alafan, Simeulue Cut dan Teupah Tengah.
2. Kawasan hutan rakyat seluas $\pm 4.787,41$ ha berada di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Alafan, Simeulue Barat, Teluk Dalam Teupah Selatan dan Teupah Tengah
3. Kawasan peruntukan pertanian , meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - Tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura;
 - Pertanian lahan basah seluas $\pm 4.870,89$ ha yang merupakan areal pertanian beririgasi dan $\pm 3.599,75$ ha, yang merupakan sawah tadah hujan, berada tersebar di seluruh kecamatan.
 - Pertanian lahan kering seluas $\pm 5.179,33$ ha. Tersebar di seluruh Kecamatan.
 - Pertanian hortikultura seluas $\pm 388,86$ ha berada di Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Teupah Barat, Alafan, Simeulue Barat, Teluk Dalam dan Teupah Tengah.
 - Perkebunan terdiri atas perkebunan besar seluas $\pm 5.317,52$ ha berada di Kecamatan Teupah Barat, Teluk Dalam, Teupah Selatan, Simeulue Timur dan Teupah Tengah. Selain itu terdapat areal untuk perkebunan rakyat yang berada di pada areal penggunaan lain seluas $\pm 54.346,84$ ha yang berada tersebar di seluruh kecamatan dan berada dalam kawasan hutan lindung seluas $\pm 1.835,92$ ha berada di Kecamatan Teupah Barat, Teluk Dalam dan Simeulue Barat.

- Peternakan seluas \pm 868,99 ha berada di Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Alafan, Simeulue Barat, Teluk Dalam, Simeulue Cut dan Salang.
 - Perikanan berada dikawasan perairan danau dan laut kewenangan Kabupaten Simeulue.
4. Kawasan peruntukan industri meliputi industri menengah seluas \pm 100 ha berada di Kecamatan Simeulue Tengah serta industri kecil yang merupakan industri rumah tangga, tersebar di kawasan permukiman.
5. Kawasan pariwisata meliputi wisata religi, wisata alam, wisata bahari, wisata minat dan wisata budaya.
- Kawasan wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,15 ha meliputi Makam Teungku Di Ujung di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut dan Makam Bakudo Batu di desa Salur kecamatan Teupah Barat;
 - Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - Danau Laut Tawar Mutiara seluas 54,58 ha di Desa Buluh Hadek Kecamatan Teluk Dalam;
 - Danau Laulo Mutiara seluas 142,75 ha di Desa Ambaan dan di Desa Serafon Kecamatan Simeulue Barat;
 - Pulau Baby seluas 2628,08 ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
 - Pulau Lasia seluas 636,71 ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
 - Pulau Penyau seluas 6,21 ha di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
 - Pulau Mincau seluas 104,68 di Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat;
 - Pulau Harapan seluas 5,52 ha di Desa Padang Unoi Kecamatan Salang;
 - Pulau Langeni seluas 39,34 ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam; dan
 - Pulau Baba seluas 17,10 ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam;
 - Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - Pantai Busung Indah seluas 23,31 ha di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah;
 - Pantai Ganting seluas 3,26 ha di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur;
 - Pantai Babang seluas 41,38 ha di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
 - Pantai Naibos 0,37 ha di Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat;
 - Pantai Matanurung seluas 18,66 ha di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah;
 - Pantai Maudil seluas 3,65 ha di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat;
 - Kawasan Pulau Pulau kecil seluas 3306,99 ha di Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan;

- Sekitar Teluk Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat;
 - Sekitar Teluk Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
 - Sekitar Teluk Kunggung di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
 - Objek wisata pantai Angkeo di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat;
 - Objek wisata pantai Silengas di Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat;
 - Objek wisata pantai Labuhan Bakti di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
 - Objek wisata pantai Latak Ayah di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut;
 - Objek wisata pantai Salur di Desa Awe Kecil Kecamatan Teupah Barat;
 - Objek wisata pantai Inor di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat; dan
 - Objek wisata Busung Indah Beach di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah;
- Kawasan wisata khusus meliputi:
- Wisata *Surfing* meliputi perairan Pantai Matanurung di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah, Pantai Maudil di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat, dan Pantai Alus-alus di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan;
 - Wisata *diving* meliputi sekitar terumbu karang Pantai Babang di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
 - Event Simeulue *dragon boat* festival yang dilaksanakan sekitar Teluk Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
 - Wisata *Spot Fishing* (Mancing Mania) meliputi perairan Pulau Babi dan Lasia Kecamatan Teupah Selatan, dan perairan Pulau Simanaha di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur;
- Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud di atas seluas 396,71 meliputi Pulau Siumat di Desa Pulau Siumat sebagai Desa wisata.
6. Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi permukiman perkotaan seluas ± 337,38 ha. Berada di permukiman kota Sinabang kecamatan Simeulue Timur, permukiman kota Kampung Aie kecamatan Simeulue Tengah dan permukiman kota Simeulue Barat kecamatan Simeulue Barat. Selain dari pada itu terdapat juga areal permukiman pedesaan seluas ± 897,46 ha yang berada tersebar diseluruh kecamatan.
7. Kawasan peruntukan lainnya terdiri dari kawasan pertahanan dan keamanan negara serta Kawasan Transmigrasi.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi :

1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0115, berada di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur;
2. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di setiap Kecamatan meliputi:
 - Komando Rayon Militer (Koramil 01) Simeulue Timur di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 02) Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 03) Teupah Selatan di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 04) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 05) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 06) Teluk Dalam di Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 07) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
 - Komando Rayon Militer (Koramil 08) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
 - Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Teupah Tengah di Desa Simpang Lanting Kecamatan Teupah tengah; dan
 - Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Simeulue Cut di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.
3. Pengembangan Kompi Senapan di Desa Nancawa Kecamatan Teupah Tengah;
4. Unit Intel Kodim 0115 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
5. Pangkalan TNI AL Kabupaten Simeulue sebagai kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur;
6. Pengembangan Pos Angkatan Laut meliputi:
 - Pos TNI AL Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
 - Pos TNI AL Teupah Selatan di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
 - Pos TNI AL Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah; dan
 - Pos TNI AL Selaut di Pulau Selaut Besar Kecamatan Alafan.

b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :

1. Kepolisian Resort (Polres) Simeulue berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur;
 2. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di setiap Kecamatan meliputi :
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Teupah Selatan di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Timur di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Dalam di Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
 - Pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) Teupah Tengah di Desa Lanting Kecamatan Teupah Tengah; dan
 - Pengembangan Kepolisian Sektor (Polsek) Simeulue Cut di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.
 3. Pos Polisi Lalu Lintas di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur.
 4. Pos Polisi Airut dengan Pos meliputi:
 - Pos Polisi Airut Sinabang di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur;
 - Pos Polisi Airut Simeulue Cut di Desa Bubuhan Kecamatan Simeulue Cut;
 - Pengembangan Pos Polisi Airut di Desa Langi Kecamatan Alafan.
- Kawasan Transmigrasi seluas lebih kurang 4.215,81 ha, meliputi:
- Kecamatan Teupah Selatan seluas lebih kurang 395,04 ha meliputi Desa Trans Meranti, Trans Jerenge, Transbaru;
 - Kecamatan Simeulue Barat seluas lebih kurang 983,51 ha meliputi Desa Sigulai;
 - Kecamatan Simeulue Tengah seluas lebih kurang 782,14 ha meliputi Desa Lauke, Desa Putra Jaya, dan Desa Situfa Jaya;

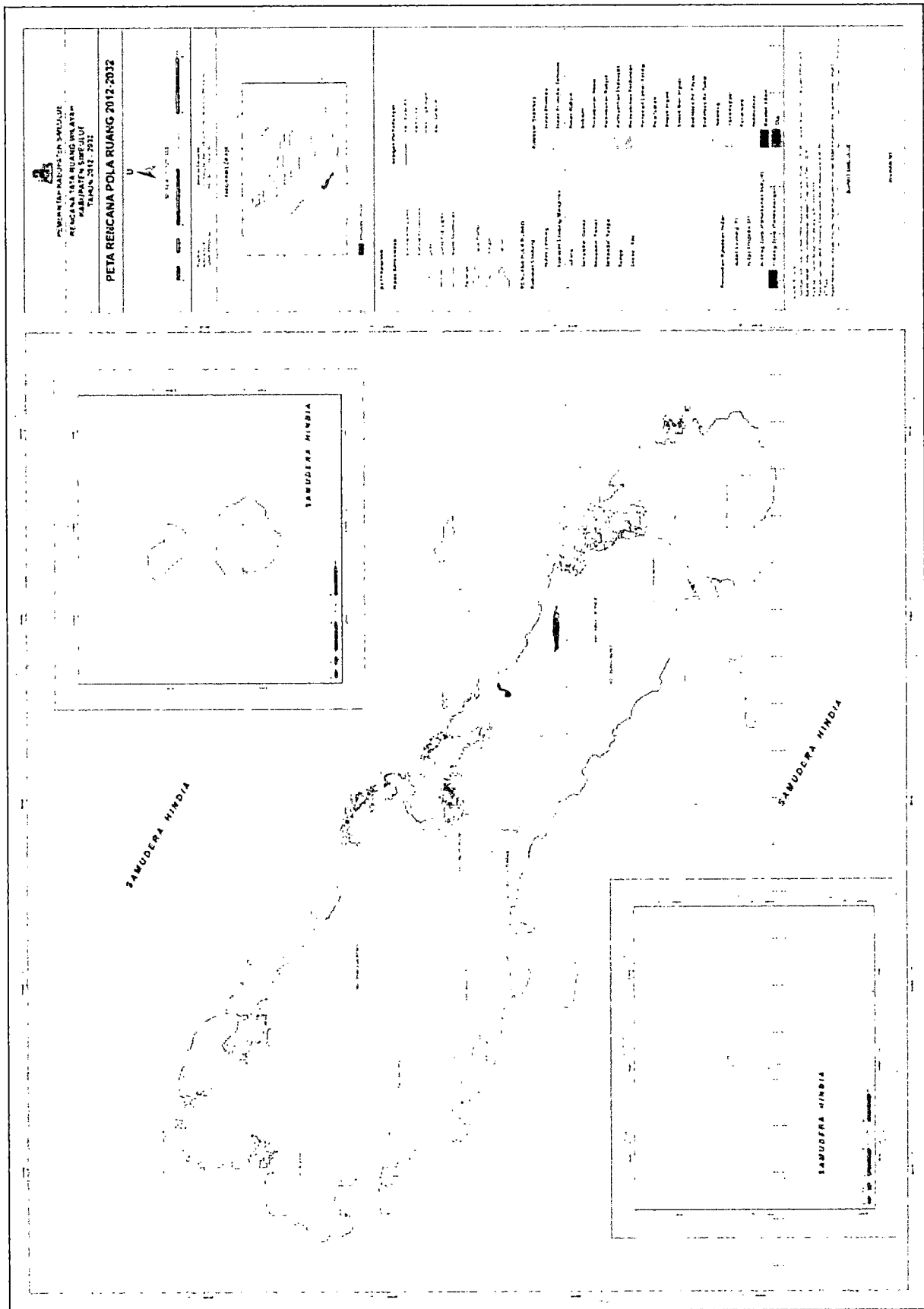
- Kecamatan Teluk Dalam seluas lebih kurang 218,97 ha meliputi Desa Kuala Bakti dan Desa Bulu Hadik;
- Kecamatan Salang seluas lebih kurang 845,68 ha meliputi Desa Ujung Salang, Panton Lawe, Mutiara dan Padang Unoi; dan
- Kecamatan Alafan seluas lebih kurang 990,47 meliputi Desa Lubuk Baik, Desa Lhok Dalam, dan Desa Lafakha.

Perbandingan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Tabel Rencana Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Jumlah (ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
A	KAWASAN LINDUNG	65.712,60	35,75
1	Hutan Lindung	60.709,97	33,03
2	Tahura	451,51	0,25
3	Kawasan Lindung Mangrove	863,50	0,47
4	Rawa	96,90	0,05
5	Danau / Situ	273,06	0,15
6	Sungai	446,73	0,24
7	Sempadan Danau	65,70	0,04
8	Sempadan Sungai	1.262,63	0,69
9	Sempadan Pantai	1.542,82	0,84
B	KAWASAN BUDIDAYA	118.096,70	64,25
1	Hutan Produksi	24.401,14	13,28
2	Hutan Produksi Terbatas	3.485,95	1,90
3	Hutan Rakyat	4.787,41	2,60
4	Perkebunan Besar	5.317,52	2,89
5	Perkebunan Rakyat	55.755,94	30,33
6	Pertanian Lahan Kering	5.169,94	2,81
7	Hortikultura	388,86	0,21
8	Sawah Irigasi	4.870,89	2,65
9	Sawah Non Irigasi	3.598,20	1,96
10	Permukiman Pedesaan	897,47	0,49
11	Permukiman Perkotaan	337,38	0,18
12	Transmigrasi	4.215,81	2,29
13	Peternakan	868,99	0,47
14	Industri	100,36	0,05
15	Pariwisata	3.538,47	1,93
16	Tambang	304,05	0,17
17	Budidaya Air Payau	0,22	0,00
18	Budidaya Air Tawar	3,16	0,00
19	TPA	9,36	0,01
20	Bandar Udara	38,99	0,02
JUMLAH		183.809,50	100,00

Gambar 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue



2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017 bahwa terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah yang dimiliki Kabupaten Simeulue yang di polakan kedalam kawasan strategis, antara lain :

a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lingkup kepentingan kabupaten, kawasan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, juga mencakup kawasan terpencil atau terbelakang dan kawasan kritis yang tidak semata-mata pengembangannya meliputi kawasan prioritas cepat berkembang tetapi juga mencakup kawasan prioritas terbelakang dan kawasan kritis.

Adapun kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan strategis nasional berupa KSN Kawasan Pulau-pulau kecil terluar meliputi:
 - Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Tengah;
 - Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan.
2. Kawasan strategis propinsi berupa KSP Kawasan Minapolitan dan Pariwisata meliputi:
 - KSP Minapolitan, Kecamatan Simeulue Timur & Simeulue Tengah;
3. KSK Koridor Jalan Sinabang – Lasikin;
4. KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;
5. KSK Perkotaan Sinabang;
6. KSK Perkotaan Kampung Aie;
7. KSK Perkotaan Sibigo;
8. KSK Agropolitan meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Tengah meliputi: Desa Sebbe, Lambaya, Luan Sorep, latitik, lakubang dan lamayang
 - b. Kecamatan Simeulue Barat meliputi Desa Seflan, layabaung, Sinar Bahagia, dan Sigulai.
9. KSK Minapolitan meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur, meliputi desa Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Amaiteng, Suka Karya, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Sinabang, Suka Maju, Air Dingin dan Kota Batu.
10. KSK Wisata Bahari meliputi: Pulau Babi, Pulau lasia, Pulau Teupah, Pulau Mincau.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa KSK Adat Terpencil di Kecamatan Simeulue Barat, yaitu di Desa Amabaan (Dusun Lauo) dan di Desa Layabaung.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.

a. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam yang perlu diperhitungkan yaitu kawasan rawan banjir rendah seluas kurang lebih 14.695 berada di kecamatan Simeulue Timur, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Salang, Simeulue Barat dan Alafan.

b. Kawasan Rawan Bencana Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue antara lain:

- a. Kawasan rawan gempa bumi tektonik meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.
- b. Kawasan rawan gerakan tanah tinggi seluas \pm 3.840 ha yang berada di Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, Teupah Barat dan Simeulue Tengah.
- c. Kawasan rawan tsunami tinggi seluas 20.220 ha beradan tersebar diseluruh kecamatan.
- d. Kawasan rawan bencana abrasi terutama berada pada pulau-pulau kecil yang ada dalam wilayah Kabupaten Simeulue seperti pulau Silaut dan pulau Simeulue Cut.

2.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sebesar 83.961 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 88.963 jiwa atau terjadi peningkatan sebesar 5,96 % selama kurun waktu 6 tahun.

Tabel 2.6.
Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

NO.	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (jiwa)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	TEUPAH SELATAN	9.812	8.934	9.439	8.972	9.033	9.122
2	SIMEULUE TIMUR	28.923	29.436	30.937	29.952	31.103	26.489
3	TEUPAH TENGAH	-	-	-	-	-	6.172
4	TEUPAH BARAT	6.993	7.575	7.816	7.472	7.563	7.769
5	SIMEULUE TENGAH	9.264	10.016	10.089	9.626	9.782	6.821
6	SIMEULUE CUT	-	-	-	-	-	3.215
7	TELUK DALAM	5.658	4.759	5.059	5.043	5.115	5.213
8	SALANG	8.210	8.441	8.499	8.082	8.175	8.490
9	SIMEULUE BARAT	10.342	10.361	10.651	10.730	10.731	10.888
10	ALAFAN	4.759	4.483	4.653	4.827	4.718	4.778
		83.961	84.005	87.143	84.704	86.190	88.963

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue dan Dinas Kependudukan Kab. Simeulue

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 6 tahun secara rinci dapat terlihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7.
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTAMBAHAN	PERTUMBUHAN
		PENDUDUK (JIWA)	PENDUDUK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	83.961	2.365	-
2008	84.005	44	0,05
2009	87.143	3.138	3,73
2010	84.704	-2.439	-2,79
2011	86.190	1.486	1,75
2012	88.963	2.773	3,22
RATA-RATA		1.000	1,19

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2012. Data Ditolah

Sampai akhir tahun 2012, distribusi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Simeulue Timur yaitu 26.489 jiwa, sementara di kecamatan lainnya tersebar secara merata dengan Kecamatan Simeulue Cut berpenduduk terkecil yaitu 3.215 jiwa.

Kepadatan penduduk sampai tahun 2012 di Kabupaten Simeulue tersebar relatif merata di setiap Kecamatan kecuali Kecamatan Simeulue Timur. Kecamatan Simeulue Timur

memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 151 jiwa/km², dan terendah Kecamatan Teluk Dalam dengan kepadatan penduduk sebesar 23 jiwa/km². Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Simeulue mencapai 48 jiwa/Km². Secara rinci Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini:

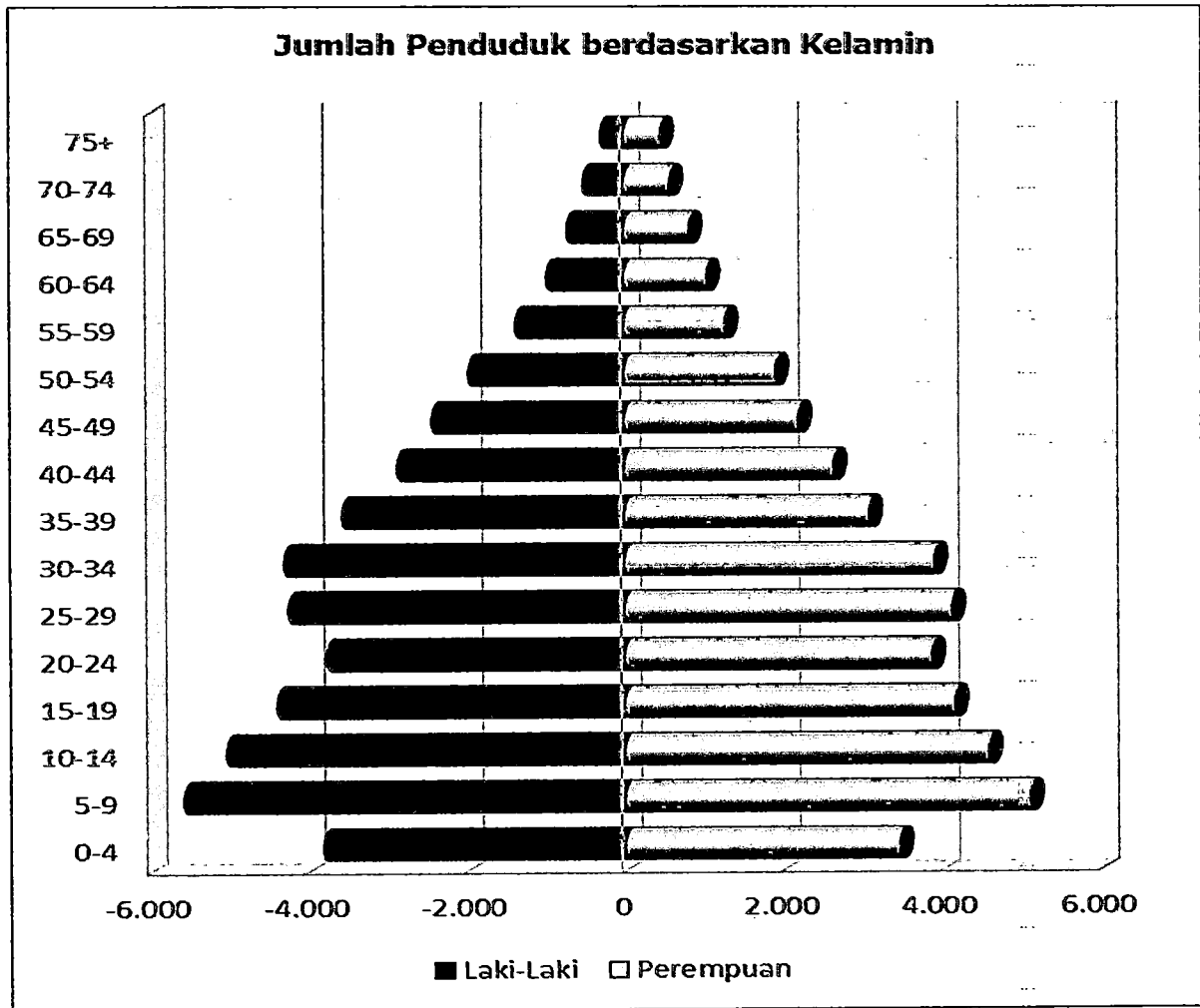
Tabel 2.8
Kepadatan Penduduk Tahun 2012 Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas wilayah (Ha)	Kepadatan penduduk	Persentase penduduk (%)
1	Teupah Selatan	9.122	22.223,80	41	10,25
2	Simeulue Timur	26.489	17.597,25	151	29,78
3	Teupah Tengah	6.172	8.369,55	74	6,94
4	Teupah Barat	7.769	14.673,05	53	8,73
5	Simeulue Tengah	6.821	11.248,34	61	7,67
6	Simeulue Cui	3.215	3.539,92	91	3,61
7	Teluk dalam	5.213	22.467,74	23	5,86
8	Saiang	3.496	19.895,55	43	9,55
9	Simeulue barat	10.888	44.607,40	24	12,24
10	Alafan	4.778	19.186,90	25	5,37
Jumlah		88.963	183.809,50	48	100

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue 2012

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, jumlah penduduk Simeulue adalah 88.963 Jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki berjumlah 45.797 jiwa dan perempuan berjumlah 43.166 Jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 1,06. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Simeulue (2012) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue
Tahun 2007-2011



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Simeulue yang dihitung atas harga konstan lima tahun terakhir (2007-2012) mengalami perkembangan yang positif. PDRB Kabupaten Simeulue dari tahun 2007-2012 mengalami peningkatan 213,03 milyar rupiah (2007) 231,68 milyar rupiah (2008), 243,71 milyar rupiah (2009), 256,29 milyar rupiah (2010). Walaupun demikian, PDRB Kabupaten Simeulue pada tahun 2011 mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik yaitu sebesar 265,80 milyar rupiah.

Kontribusi sektor dalam PDRB yang terbesar setiap tahunnya adalah pada sektor pertanian dengan rata-rata peningkatan 38,69 % pertahunnya. Dan sektor yang memberikan kontribusi terendah adalah sektor Listrik, gas dan air bersih dengan peningkatan rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 0,22 %.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s.d 2011. (dalam juta)

No	Nama	2007		2008		2009		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	91.910,76	43,14	92.651,73	39,99	93.881,46	38,52	96.396,70	37,61	94.485,05	35,55
2	Pertambangan dan Penggalian	2.103,84	0,99	2.348,69	1,01	2.593,54	1,06	2.838,39	1,11	3.068,83	1,15
3	Industri Pengolahan	3.230,07	1,52	3.270,89	1,41	3.311,71	1,36	3.348,12	1,31	3.389,07	1,28
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	347,37	0,16	414,44	0,18	520,02	0,21	652,55	0,25	735,23	0,28
5	Bangunan	11.254,68	5,28	12.922,58	5,58	14.390,48	5,90	15.858,38	6,19	17.428,11	6,56
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	34.164,78	16,04	45.893,45	19,81	51.570,06	21,16	56.789,40	22,16	61.972,93	23,32
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11.726,41	5,50	13.035,32	5,63	14.135,32	5,80	15.412,44	6,01	16.452,35	6,19
8	Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.507,54	1,65	4.116,08	1,78	4.727,62	1,94	5.208,02	2,03	5.770,34	2,17
9	Jasa-Jasa	54.762,21	25,72	57.029,01	24,62	58.575,81	24,04	59.773,58	23,32	62.502,71	23,51
	PDRB Non Migas	213.027,66	100,00	231.682,19	100,00	243.706,02	100,00	256.287,58	100,00	265.804,62	100,00

Sumber : BPS Simeulue 2011

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Simeulue yang dihitung atas harga berlaku lima tahun terakhir (2007-2012) mengalami perkembangan yang terus meningkat. Dimana besaran angkanya adalah sebesar 374.78 milyar rupiah (2007), 430,86 milyar rupiah (2008), 483,56 milyar rupiah (2009), 542,75 milyar rupiah (2010), 594,46 milyar rupiah (2011). Peningkatan Kontribusi sektor dalam PDRB ini setiap tahunnya masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana kenaikan rata-rata setiap tahun dalam lima tahun terakhir (2007-2011) adalah 42,29 % yaitu (Tabel 2.10) dan kontribusi sektor yang paling rendah adalah sektor Listrik, gas dan air bersih dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,72 %.

Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s.d 2011. (dalam jutaan)

No	Nama	2007		2008		2009		2010		2011	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian	1.775.117,72	47,36	1.906.990,70	44,26	2011.195,97	41,61	217.848,84	40,14	226.280,74	38,06
2	Pertambangan dan Penggalian	3.358,42	0,90	3.980,05	0,92	5.046,00	1,04	6.060,53	1,12	6.671,37	1,12
3	Industri Pengolahan	7.423,74	1,98	7.624,80	1,77	7.825,86	1,62	8.026,91	1,48	8.227,97	1,38
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.875,70	0,50	2.685,90	0,62	3.541,28	0,73	4.597,74	0,85	5.200,22	0,87
5	Bangunan	29.042,98	7,75	37.861,96	8,79	49.686,63	10,28	56.597,22	10,43	67.027,62	11,28
6	Percagangan, Hotel dan Restoran	55.648,85	14,85	72.473,07	16,82	82.802,12	17,12	93.822,92	17,29	104.895,87	17,65
7	Pengangkutan dan Komunikasi	23.196,88	6,19	28.789,61	6,68	35.198,36	7,28	42.565,16	7,84	47.847,14	8,05
8	Keu. Persewaan dan Jasa Perumahan	11.156,04	2,98	12.963,63	3,01	15.100,45	3,12	18.236,64	3,36	20.536,07	3,45
9	Jasa-Jasa	65.542,08	17,49	73.789,98	17,13	83.166,13	17,20	94.998,09	17,50	107.773,92	18,13
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	374.776,39	100,00	430.865,70	100,00	483.562,80	100,00	542.754,07	100,00	594.460,93	100,00

Sumber : BPS Simeulue 2011

Secara umum perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Simeulue lima tahun terakhir (2007-2011) mengalami penurunan dengan besaran yang bervariasi, dimana sektor pertanian mencapai angka minus 1,98 % pada tahun 2011 dengan penilaian atas dasar harga konstan. Jika dilihat pada tabel 2.3 di bawah tampak bahwa perkembangan kontribusi sektor Bangunan dalam PDRB

Kabupaten Simeulue atas dasar berlaku adalah sektor yang perkembangannya tertinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor yang lainnya seperti terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s.d 2011

No	Nama	2007		2008		2009		2010		2011	
		Hb%	Hk%	Hb%	Hk%	Hb%	Hk%	Hb%	Hk%	Hb%	Hk%
1	Pertanian	9,51	1,90	7,42	0,81	5,51	1,33	8,28	2,68	3,87	(1,98)
2	Pertambangan dan Penggalian	16,23	11,02	18,16	11,64	26,78	10,42	20,11	9,44	10,08	8,12
3	Industri Pengolahan	16,82	1,22	2,71	1,26	2,64	1,25	2,57	1,10	2,50	1,22
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	34,70	20,09	43,25	19,31	31,80	25,48	29,83	27,41	13,10	10,97
5	Bangunan	49,68	15,05	30,37	14,82	31,23	12,37	13,91	10,20	18,43	9,90
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,86	11,49	30,23	34,33	14,25	12,37	13,31	10,12	11,80	9,13
7	Pengangkutan dan Komunikasi	28,12	7,10	24,11	11,16	22,26	8,44	20,93	9,03	12,41	6,75
8	Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan	44,99	11,73	16,14	17,35	16,44	14,86	20,77	10,16	12,61	10,80
9	Jasa-Jasa	10,10	6,73	12,58	4,10	12,71	2,71	14,23	2,04	13,45	4,57
	PDRB	12,99	5,77	14,97	8,76	12,23	5,19	12,24	5,16	9,53	3,71

Sumber : BPS Simeulue 2011

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Simeulue berdasarkan Harga Konstan selama lima tahun terakhir (2007-2012) adalah sebesar 58,62 % (rubah angkanya menjadi tahun 2012), sedangkan berdasarkan Harga berlaku adalah sebesar 24,77 % (rubah angka tahun 2012). Jika dilihat dari tabel 2.3 dari sembilan sektor PDRB Kabupaten Simeulue pertumbuhan yang terbesar adalah pada sektor Listrik, gas dan air bersih dan sektor Industri Pengolahan menjadi sektor terendah.

Sektor Listrik, gas dan air bersih pada harga Konstan tumbuh sebesar 177,24 % sedangkan atas dasar harga berlaku sektor tersebut tumbuh sebesar 111,66 %. Pada sektor Industri pengolahan yang menjadi sektor penyumbang terendah sektor ini tumbuh sebesar 10,83% atas dasar harga konstan (Hk) dan 4,92% atas dasar harga berlaku (Hb).

Tabel 2.12
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Simeulue Tahun 2008 s.d 2011

No	Nama	2008	2009	2010	2011	Rata-Rata
1	Pertanian	0,81	1,33	2,68	-1,98	0,71
2	Pertambangan dan Penggalian	11,64	10,42	9,44	8,12	9,91
3	Industri Pengolahan	1,26	1,25	1,10	1,22	1,21
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	19,31	25,48	27,41	10,97	20,79
5	Bangunan	14,82	11,36	10,20	9,90	11,57
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	34,33	12,37	10,12	9,13	16,49
7	Pengangkutan dan Komunikasi	11,16	8,44	9,03	6,75	8,85
8	Keu. Persewaan dan Jasa Perusahaan	17,35	14,86	10,16	10,80	13,29
9	Jasa-Jasa	4,10	2,71	2,04	-4,57	3,36
	PDRB Non Migas	8,76	5,19	5,16	3,71	5,71

Sumber Data BPS Tahun 2012

2.2.1 Inflasi

2.2.1.1 Laju Inflasi

Laju inflasi yang terjadi Kabupaten Simeulue masih mengacu pada laju inflasi Propinsi Aceh. Laju inflasi Propinsi Aceh selama periode 2007-2012 menunjukkan penurunan setiap tahunnya, pengamatan laju inflasi dilakukan di dua kota yaitu Banda Aceh dan Lhokseumawe. Selanjutnya secara berturut-turut laju inflasi di Banda Aceh sebesar 9,54 persen (2006), 11,00 persen (2007), 10,27 persen (2008), 3,50 persen (2009) dan 3,08 persen (2010). Sedangkan di Kota Lhokseumawe secara berturut-turut sebesar 11,47 persen

(2006), 4,18 persen (2007), 13,78 persen (2008), 3,96 persen (2009) dan 4,44 persen (2010). Sejak 2007 perbedaan laju inflasi antara Aceh dan nasional semakin mengecil, kondisi nasional secara berturut-turut sebesar 17,11 persen (2005), 6,60 persen (2006), 6,59 persen (2007), 11,06 persen (2008), 2,78 persen (2009) dan 4,67 persen (2010).

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah hasil bagi antara pendapatan regional atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan Regional per kapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara makro pendapatan regional per kapita dapat dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah.

Pada tahun 2011 pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Simeulue tercatat sebesar 6,76 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 7,08 persen dari tahun 2010 yang nilainya 6,31 juta rupiah. Angka senilai 6,76 juta rupiah ini menggambarkan pendapatan penduduk per jiwa per tahun. Angka yang cukup besar, namun pada kenyataannya masih banyak rumahtangga di Kabupaten Simeulue yang berpenghasilan di bawah nilai tersebut. Perkembangan pendapatan regional per kapita penduduk kabupaten simeulue selama kurun waktu empat tahun terakhir selalu mengalami pertumbuhan dari 2,75 juta rupiah (tahun 2008) naik menjadi 3,05 juta rupiah (tahun 2011). Hal ini menggambarkan secara riil ternyata pendapatan penduduk Kabupaten Simeulue setiap tahunnya tidak jauh berubah.

Tabel 2.13.
Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Simeulue
Tahun 2007-2012

No	Tahun	Pendapatan Regional Perkapita (Dalam Jutaan Rupiah)
1	2007	4,42
2	2008	5,06
3	2009	5,12
4	2010	5,54
5	2011	6,40
6	2012	7,64

2.2.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi/listrik dan telekomunikasi.

Kondisi pembangunan infrastruktur Kabupaten Simeulue hingga akhir tahun 2011 cukup baik namun belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Tingkat kerusakan jaringan jalan, irigasi dan prasarana pengendalian banjir masih tinggi. Selanjutnya, masih terjadi krisis pasokan listrik dan belum optimalnya pemanfaatan serta terbatasnya jaringan listrik. Demikian juga dengan infrastruktur untuk mendukung telekomunikasi dan telematika. Keberadaan terminal, pelabuhan, dan bandara telah sesuai dengan struktur ruang (eksisting) wilayah Kabupaten Simeulue, namun belum seluruhnya terbangun serta fasilitas pendukungnya belum memadai untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi Kabupaten. Bangunan pemerintah belum terbangun seluruhnya, begitu juga dengan infrastruktur perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan serta industri masih belum memadai. Sedangkan kondisi infrastruktur pendidikan dan kesehatan sudah memadai, hanya kondisinya yang masih perlu perbaikan dan penambahan sarana pendukungnya.

Kondisi infrastruktur juga mengalami ketimpangan antar wilayah kecamatan dimana di wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang merupakan wilayah Kota Kabupaten memiliki kondisi dan jumlah yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Untuk itu Pembangunan Infrastruktur yang berimbang dan sesuai kebutuhan merupakan prioritas agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, mengatasi ketimpangan pembangunan serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan di Kabupaten Simeulue.

2.2.2.1 Aksesibilitas Daerah

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain.

Ruas jalan yang telah dibangun hingga akhir tahun 2011 di wilayah Kabupaten Simeulue mencapai ± 826,48 km, merupakan jalan kolektor dan lokal yang dapat dilalui kendaraan. Pada Tahun 2007 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Simeulue sebesar 36,41. Sedangkan pada tahun 2011 berkurang sebesar 14,52 dibandingkan tahun 2007 atau mencapai 21,89. Gambaran lebih jelas mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.14
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2007 s.d 2012 Kabupaten Simeulue.

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan	733,21	744,86	744,87	752,98	785,71	839,00
2.	Jumlah Kendaraan	2.120	2.150	2.350	3.296	3.776	4.176
3.	Rasio	34,59	34,64	31,70	22,85	20,81	20,09

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue tahun 2012

Perkembangan infrastruktur jalan berpengaruh langsung terhadap tingkat mobilitas orang dan barang yang menggunakan jasa angkutan umum. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pertambahan jumlah panjang jalan di wilayah Kabupaten Simeulue diikuti dengan pertambahan jumlah kendaraan. Selain itu kondisi jalan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat mobilitas. Pada tabel di bawah ini dapat terlihat perkembangan kondisi jalan Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.15
Perkembangan Kondisi Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Simeulue
Tahun 2007 – 2012

NO	Kondisi Jalan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aspal	107,20	124,00	206,28	244,15	250,52	269,19
2	Perkerasan	477,50	475,13	407,70	386,24	415,85	436,58
3	Tanah/Terobosan	148,51	145,73	130,89	122,59	119,34	133,23
	JUMLAH	733,21	744,86	744,87	752,98	785,71	839,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue tahun 2012

Dari tabel 2.14 di atas terlihat bahwa perkembangan kondisi jalan aspal selama lima tahun mengalami peningkatan sebesar 151% (persen) yaitu dari tahun 2007 sepanjang 107,20 km) meningkat menjadi 269,19 km di tahun 2012. Namun demikian proporsi kondisi jalan aspal masih sangat kecil dari total keseluruhan panjang jalan. Dari total panjang jalan

839 km di tahun 2012, baru teraspal 32,08% sedangkan sisanya perkerasa (sirtu) 52,03% dan jalan tanah 15,87%. Oleh karena itu untuk kedepan program pembangunan jalan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dari perkerasan ke aspal agar dapat mendukung kelancaran mobilitas angkutan.

Namun demikian penggunaan jasa angkutan umum juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat dan sektor lapangan kerja. Dari data tabel 2.9 dan 2.10 jelas terlihat bahwa pertumbuhan infrastruktur jalan berbanding terbalik dengan jumlah orang yang menggunakan fasilitas jasa angkutan umum, akan tetapi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah arus barang. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2007 sektor lapangan kerja cukup banyak tersedia akibat masa rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami yang menimpa wilayah Kabupaten Simeulue dan Propinsi Aceh. Setelah masa rekonstruksi berakhir, ketersediaan lapangan kerja khususnya di sektor jasa konstruksi menjadi menurun sehingga mobilisasi penumpang cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.15
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Simeulue

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah orang	Org	44.419	27.332	26.265	8.779	12.347
2.	Jumlah Barang	Ton	1.550	6.640	10.176	15.299	21.589

Sumber : Data SDA Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Selain prasarana jalan, infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udara merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Simeulue. Perkembangan pembangunan di bidang perhubungan darat masih relatif lambat. Fasilitas terminal terbangun baru satu unit, merupakan terminal penumpang yang berada di ibu kota kabupaten. Sedangkan untuk terminal barang masih memanfaatkan lahan pelabuhan cargo, serta kota kecamatan belum tersedia fasilitas terminal/halte.

Bidang perhubungan laut memegang peranan yang sangat penting mengingat Kabupaten Simeulue merupakan kepulauan yang terpisah dari daratan Aceh. Untuk prasarana perhubungan laut, Kabupaten Simeulue telah memiliki satu dermaga ferry yang berada di kecamatan Simeulue Timur untuk tingkat pelayanan kabupaten. Saat ini sarana angkutan penyeberangan yang ada berupa 2 unit ferry yaitu KMP. Teluk Singkil yang melayani lintasan Sinabang - Labuhan Haji dan KMP Teluk Sinabang yang melayani lintasan Sinabang – Singkil. Pada saat salah satu KMP tersebut menjalani docking tahunan menyebabkan terhambatnya suplay dan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok

masyarakat. Oleh karenanya Kabupaten Simeulue sangat membutuhkan pelayaran tambahan guna mengantisipasi hal tersebut.

Selain dari pada itu, bentuk pulau Simeulue yang memanjang dengan panjang ± 102 KM yang hanya memiliki satu dermaga ferry, memungkinkan untuk menambah fasilitas dermaga penyeberangan yang berada di wilayah Simeulue bagian Barat dengan jalur lintasan Sibigo (Kabupaten Simeulue) – Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) agar penyebaran pembangunan dapat merata dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di ujung Barat Kabupaten Simeulue.

Disektor perhubungan udara, Kabupaten Simeulue telah memiliki bandara pegumpan yaitu Bandara Lasikin untuk melayani masyarakat. Pada tahun 2011 Jenis Pesawat yang masuk di Bandara Lasikin adalah MA 60, C 212 & C 208 B. Dengan operator Merpati Nusantara Airline, Nusantara Buana Air (NBA), MAAF dan SUSI AIR. Dari tabel 2.11 terlihat bahwa jumlah pengguna angkutan

Tabel 2.16
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Simeulue

No	Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
		Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg	Org	Brg
1.	Dermaga	62.647	14.011	86.275	23.072	82.311	29.047	67.236	30.621	73.961	39.063
2.	Bandara	9.475	109	28.390	301	20.591	350	20.223	230	22.471	285
3.	Terminal	44.419	1.550	27.332	6.640	26.265	10.176	8.779	15.299	12.347	21.589

2.2.2.2. Sektor Energi

Untuk pembangunan di sektor energi khususnya energi listrik menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal ini terlihat dari indikator kinerja rumah tangga pengguna listrik dimana pada tahun 2007 sebesar 54,93 % meningkat menjadi 77,18 % di tahun 2011, dan diperkirakan pada tahun 2012 akan mencapai angka ± 95,00 dikarenakan pada saat ini pembangunan kelistrikan terus dilaksanakan untuk menjangkau seluruh desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Sumber energi listrik yang ada berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas terbangun 8 MW sedangkan kapasitas terpakai baru 3,8 MW hal tersebut dikarenakan jaringan listrik belum terbangun seluruhnya. Diperkirakan kapasitas terpakai maksimal untuk melayani kebutuhan masyarakat mencapai 6 MW.

Selain dari pada itu, berdasarkan perencanaan dari Kantor PLN cabang Sinabang, di wilayah Kabupaten Simeulue direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW. Rencana ini dimaksud untuk mengantisipasi kebutuhan listrik

yang diprediksi akan meningkat untuk mendukung sektor industri menengah serta sektor lainnya yang direncanakan.

Tabel 2.17
Indikator Kinerja Pemabangunan Daerah di Bidang Energi Listrik

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah KK pengguna listrik	KK	11.530	12.630	13.133	14.294	16.251
2.	Jumlah KK seluruhnya	KK	20.990	20.055	21.690	20.644	21.056
3.	Indeks	%	54,93	62,98	60,55	69,24	77,18

2.2.2.3. Sektor Lingkungan Hidup

Sesuai Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 05 tahun 2008 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tata laksana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Simeulue, maka perlu melakukan analisa dampak lingkungan, UPL, UKL dan izin gangguan (H) pada setiap perusahaan atau dinas terkait yang tujuannya untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif yang timbul akibat pembangunan tersebut. Pada tahun 2007 hingga tahun 2011 telah dikeluarkan 6 (enam) dokumen AMDAL, 8 (delapan) UKL-UPL, 2 (dua) DPPL, 2 (dua) DPLH.

Untuk pembangunan di bidang kebersihan Kabupaten Simeulue telah memiliki sistem penanganan persampahan khususnya untuk wilayah Kota Sinabang yang terdiri dari 8 desa yaitu desa Sinabang, Suka Jaya, Suka karya, Suka Maju, Air Dingin, Amaiteng Mulia dan Ameria Bahagia, Suak Buluh jiwa, yang dikelola oleh Badan pengendalian Kebersihan dan Pertamanan (Bapedalsihman) dengan sarana prasarana kebersihan antara lain:

1. Truck sampah sebanyak 7 unit dimana 6 unit difungsikan di kawasan Kota Sinabang sedangkan 1 unit di Kota Kampung Aie.
2. Amroll truck sebanyak 2 unit yang masih dalam kondisi baik. Alat angkut sampah ini mengangkut kontainer sampah yang berjumlah 13 unit di tempatkan pada perkantoran, pasar dan pelabuhan.
3. Untuk pewadahan fasilitas yang telah tersedia kontainer (tong) plastik kapasitas 150 liter. Sampai tahun 2011 tong sampah yang masih dapat difungsikan berjumlah 1200.
4. TPA satu unit yang berlokasi di Suak Buluh, dengan luas ± 3 hektar dengan jarak 6 Km dari Kota Sinabang. Sistem yang digunakan adalah *Open Dumping* dengan daya tampung sampah sebanyak 25 M³/hari.

Tabel. 2.18
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Sektor Persampahan

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Vol. Sampah yang ditangani	M3	354	362	659	773	873
2.	Vol. Produksi sampah	M3	1035	1050	1858	1889	1921
3.	Persentase penanganan sampah	%	34,20	34,47	35,46	40,92	45,44

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan

2.2.2.4 Sektor Komunikasi & Informasi.

Pembangunan infrastruktur di sektor komunikasi dan informatika terus mengalami perkembangan. Pembangunan Fasilitas Tower Telkomsel, Indosat, Exel Comindo dan tiang reklame di Kabupaten Simeulue sudah tersedia hampir di seluruh Kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.19
Jumlah BTS Yang Terbangun di Kabupaten Simeulue Tahun 2011

No.	Fasilitas	Lokasi		Jumlah (unit)	Pemilik	
		Kec.	Desa			
1	2	3	4	5	6	
1.	Tower Telkomsel	Simtim	Suka Karya	2	PT. Telkomsel	
			Suak Bulu	1		
			Air Dingin	1		
			Linggi	1		
			Kahad	1		
			Busung	1		
			Ganting	1		
			Air Pinang	1		
			Simteng	Kp. Aie		1
				Simbar		Sibigo
		Layabaung				1
		Tepsel	L. Bakti	1		
			P. Babi	1		
			Pasir Tinggi	1		
			Badegong	1		
		T. Barat	Lantik	1		
			La'ayon	1		
		Salang	Nasreuhe	1		
			T. Dalam	Sambai		1
		Kuala Bakti		1		
2.	Tower Indosat	Simtim	Suka Karya	1	PT. Indosat	
			Suak Bulu	1		
3.	Tower Exel Comindo	Simtim	Ameria Bahagia	1	PT. Exel Comindo	
Jumlah				24		
4.	Tiang Reklame	Simtim	Suka Karya	1	Pemda Kab. Simeulue	
			Ameria Bahagia	1		
			Suka Jaya	1		
			Sinabang	2		
Jumlah				5		

012

2.2.2.5 Sektor Air Bersih.

Air minum mengandung pengertian air bersih yang dapat dikonsumsi dengan aman bagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari antara lain untuk memasak dan kebutuhan personal lainnya. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Simeulue masih sangat rendah, dimana akses terhadap air minum (air yang dapat langsung dikonsumsi) hanya bisa didapatkan dari air minum kemasan. Secara umum penduduk masih mendapatkan air minum dari air ledeng, sumur, mata air, sungai, air hujan, sumur terlindung dan sumur tidak terlindung.

Untuk pembangunan disektor air minum, capaian akses air minum terbilang masih sangat rendah dari target capaian MDGs mecapai 68,87% di tahun 2015.

Namun demikian perkembangan pembangunan di sektor air minum dari tahun ketahun terus meningkat. Dari tahun 2007 angka capaian 9,15 % secara estafet meningkat menjadi 13,95 % di tahun 2011.

Tabel. 2.20
Persentasi Penduduk Berakses Air Minum

No	Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Penduduk berakses air minum	Org	3.256	3.256	3.256	6.015	9.844
2.	Jumlah penduduk	Org	83.961	84.005	87.143	84.704	86.190
3.	Persentase pelayanan	%	9,15	9,74	9,91	13,61	13,95

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue dan PDAM (diolah)

Permasalahan di sektor air minum adalah belum optimalnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar, masih kurangnya debit air baku air minum yang ada serta belum meratanya jaringan air. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Menjaga kelestarian lingkungan agar tetap mampu menyediakan pasokan air baku untuk layanan air minum.
2. Menemukan sumber-sumber air baku baru untuk air minum yang memiliki debit air yang cukup.
3. Pengembangan perencanaan yang lebih detail mencakup strategi pemenuhan air minum yang terukur serta melakukan peningkatan pembangunan jaringan perpipaan air bersih khususnya pada zona kawasan perkotaan.
4. Membangun hidran umum pada daerah yang tidak mungkin terjangkau oleh jaringan perpipaan PDAM namun masih memiliki sumber air yang cukup.

2.2.2.6. Sektor Irigasi

Potensi sawah beririgasi di wilayah Kabupaten Simeulue ± 4.803 ha yang terbagi menjadi 58 daerah irigasi kecil. Dari keseluruhan jumlah DI tersebut, yang telah dibangun ± 42 irigasi kecil (3.971 ha) sedangkan sisanya masih dalam rencana pembangunan. Dari seumlah irigasi tersebut baru mampu mengairi sawah ± 474 ha atau berkisar 9,86 % dari jumlah potensi sawah beririgasi. Ada beberapa permasalahan yang ada terkait dengan pembangunan di sektor irigasi :

1. Kondisi wilayah kabupaten Simeulue yang merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi sangat berpengaruh terhadap tingkat kerusakan bangunan bendung dan jaringan irigasi.
2. DAS di wilayah Kabupaten Simeulue yang kecil dan bentang sungai yang pendek menyebabkan cepatnya air permukaan mengalir ke Muara atau laut, sehingga debit air yang ada tidak terlalu besar.
3. Tingkat curah hujan yang tinggi serta kelerengan yang berbukit menyebabkan sering terjadi gerakan tanah (longsor) pada sekitar bangunan bendungan irigasi sehingga mempercepat terjadinya proses endapan pada bangunan tersebut.
4. Pelaksanaan konstruksi bangunan irigasi yang kurang terkontrol dengan baik sehingga berpengaruh terhadap umur konstruksi yang pendek.

2.2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.3.1 Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, angka melek huruf di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu tahun 2007-2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebesar 97,44 persen dan angka ini meningkat menjadi 98,85 persen pada tahun 2011.

Tabel 2.21
Angka Melek Huruf Kabupaten Simeulue Tahun 2007 – 2011

No	Kabupaten	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Simeulue	97,44	98,17	98,58	98,66	98,85

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue Tahun 2012

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu tahun 2007-2010 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,60 tahun pada tahun 2007 menjadi 8,62 tahun pada tahun 2011.

Tabel 2.22
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 – 2011

No	Kabupaten	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Simeulue	7,60	8,00	8,30	8,52	8,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

C. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Simeulue telah menghasilkan beberapa kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator APK digunakan untuk mengukur capaian akses penduduk usia 0-6 tahun di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penduduk usia 13-15 tahun di SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Pesantren Salafiyah Wustha, penduduk usia 16-18 tahun di SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C. Indikator APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

Indikator	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
APK	SD/MI	125,34	119,53	123,59	119,84	116,14	115,01
	SMP/MTs	93,45	96,03	109,57	111,68	95,93	115,50
	SMA/SMK/MA	75,43	83,35	78,76	99,48	89,04	113,70
APM	SD/MI	97,92	97,49	97,64	97,54	95,82	82,77
	SMP/MTs	83,03	83,36	83,49	83,69	76,37	67,23
	SMA/SMK/MA	73,31	75,78	75,83	78,96	64,15	84,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

D. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Simeulue, pada tahun 2007 penduduk yang berusia diatas 10 tahun berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, masing-masing : sebesar 21,25 persen tidak/belum menamatkan SD/ sederajat, sebesar 39,59 persen menamatkan SD/ sederajat, sebesar 22,20 persen menamatkan SMP/ sederajat,

sebesar 12,32 persen menamatkan SMA/ sederajat, dan sebesar 4,64 persen menamatkan S1.

Pada tahun 2011 komposisi tersebut terjadi perubahan. Hal ini terlihat dari komposisi masing-masing kelompok yaitu sebesar 19,33 persen tidak/belum menamatkan SD/ sederajat, sebesar 33,77 persen menamatkan SD/ sederajat, sebesar 21,48 persen menamatkan SMP/ sederajat, sebesar 18,75 persen menamatkan SMA/ sederajat, sebesar 3,90 persen menamatkan Diploma, sebesar 2,77 persen menamatkan S1.

Tabel 2.24
ANGKA PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
TAHUN 2007 - 2011

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Tidak / Belum Tamat SD	21,25%	25,04%	19,88%	19,10%	19,33%
SD Sederajat	39,59%	34,40%	33,36%	33,35%	33,77%
SMP / MTs	22,20%	19,64%	23,93%	21,88%	21,48%
SMA / MA / SMK	12,32%	15,23%	17,38%	17,82%	18,75%
Diploma	-	2,43%	3,50%	4,76%	3,90%
S 1	4,64%	3,26%	1,95%	3,09%	2,77%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

2.2.3.2 Kesehatan

Aspek kesehatan diuraikan mencakup angka kematian, umur harapan hidup, status gizi, angka kesakitan dan penyakit menular.

A. Angka Kematian

Angka kematian difokuskan pada tiga indikator kematian utama, yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah angka kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Simeulue cenderung naik turun. Pada tahun 2007 sebesar 19/1000 kelahiran hidup, di tahun 2008 turun menjadi 17/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 turun menjadi 16/1000 kelahiran hidup, tahun 2010 kembali naik menjadi 40/1000 kelahiran

hidup, pada tahun 2011 menjadi 41/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2012 turun menjadi 22/1000 kelahiran hidup (Dinkes Kabupaten Simeulue, 2012). Adapun penyebab kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.25
Penyebab Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Simeulue Pada Tahun 2012

No	Penyebab AKB	Jumlah Kasus
1.	Aspiksia	11
2.	Berat bayi lahir rendah (BBLR)	9
3.	Pneumonia	4
4.	Febris	4
5.	Kelainan Jantung	3
6.	Kelainan Kongenital	2
7.	Kelainan Saluran Cerna	2
8.	Aspirasi/ Apnue	2
9.	Lain-lain	2
Jumlah		39

Sumber Dinkes Kabupaten Simeulue Tahun 2012

. Kematian bayi diperkirakan masih relatif tinggi di daerah pedesaan, pada keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami "barrier" atau hambatan *financial* atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan. Kelompok inilah yang menjadi tantangan utama dalam mencapai MDGs 2015.

2. Angka Kematian Balita.

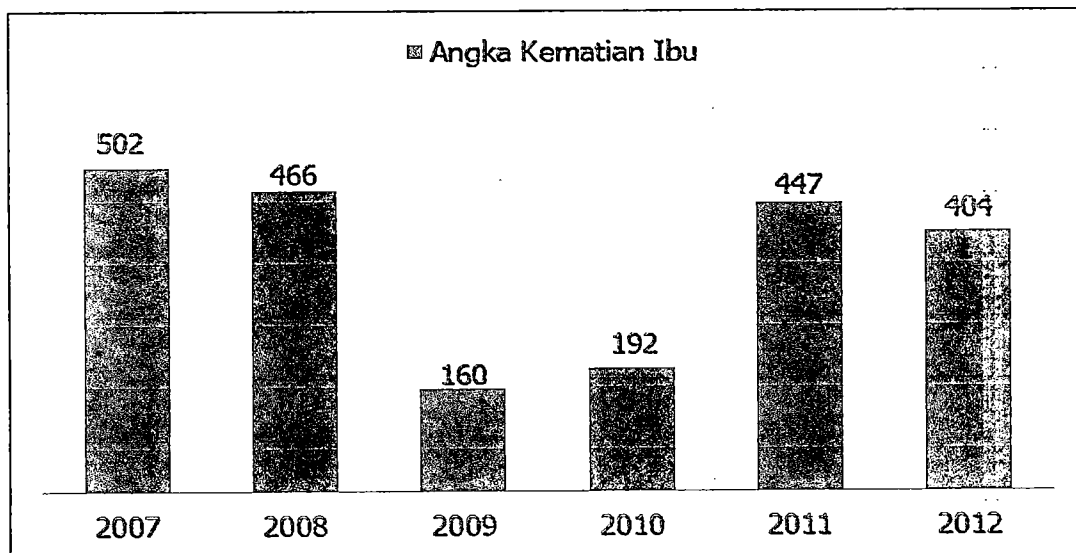
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. AKABA juga merupakan salah satu indikator penting karena memberikan gambaran peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum mencapai umur 5 tahun. Diperkirakan, AKABA juga lebih tinggi pada keluarga yang berpendidikan rendah, keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan pada keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Angka kematian balita di Kabupaten Simeulue terjadi penurunan dari tahun 2007 sebanyak 0,9/1000 kelahiran hidup menjadi 0,2/1000 kelahiran hidup pada tahun 2008, sedangkan

pada tahun 2009 tidak ada kematian balita. Pada tahun 2010 angka kematian balita 0,4/1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,2/1000 kelahiran hidup.

3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Tantangan utama untuk mengurangi Angka Kematian Ibu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang beresiko tinggi dan sistem rujukan persalinan belum efektif disamping faktor medis seperti pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre eklamsi dan infeksi. Selain itu, ketidaksetaraan gender, nilai budaya, serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan juga diperkirakan berkontribusi terhadap kematian ibu.

Grafik 2.2
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s/d 2012



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2012

Angka kematian ibu di Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sebesar 502 per 100.000 kelahiran hidup dan turun secara fluktuatif menjadi 404 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012. Adapun penyebabnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Penyebab Angka Kematian Ibu (AKI)
Di Kabupaten Simeulue Pada Tahun 2012

NO	Penyebab AKI	Jumlah Kasus
1.	Pendarahan Post Partum (Atonia Uteri)	3
2.	Hipertensi dalam kehamilan/eklamsia	1
3.	Lain – lain (TBC, Komplikasi dan Riwayat Jantung)	3
Jumlah		7

Sumber Dinkes Kabupaten Simeulue Tahun 2012

B. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup (UHH) sering dijadikan indikator utama mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan dan juga salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Simeulue, pada Tahun 2008 yaitu 62,84 tahun, meningkat menjadi 63,05 pada tahun 2011. Peningkatan Angka harapan hidup (UHH) disebabkan karena pola hidup masyarakat yang sehat, adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan disertai juga peningkatan program/ kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan angka usia harapan hidup dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.27
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2011

Tahun	2008	2009	2010	2011
Usia Harapan Hidup (UHH)	62,84	62,91	62,98	63,03

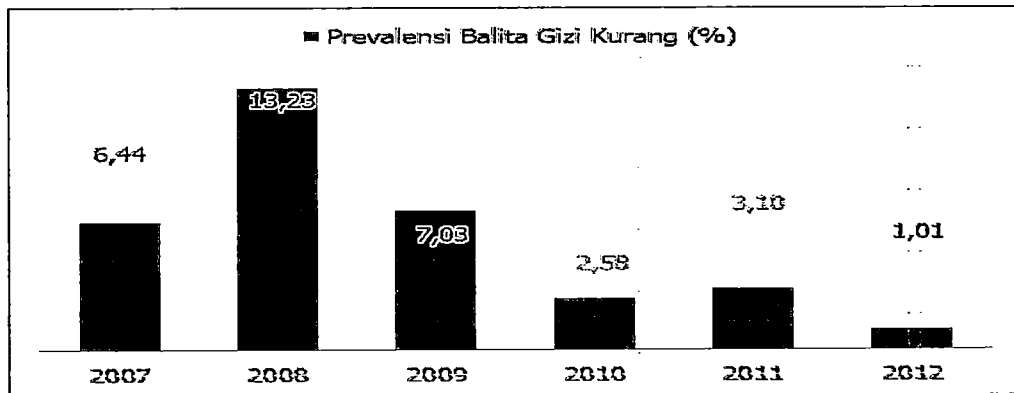
C. Persentase Balita Gizi Kurang/Buruk

Status gizi difokuskan pada status gizi balita yang diukur dari tiga indikator utama: Berat Badan per Usia (BB/U), Tinggi Badan per Usia (TB/U), dan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB).

1. Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)

Secara umum status gizi balita di Kabupaten Simeulue menunjukkan kecenderungan membaik. Pada tahun 2007 angka prevalensi balita gizi kurang mencapai 6,44 % dan menurun menjadi 1,01 % pada tahun 2012.

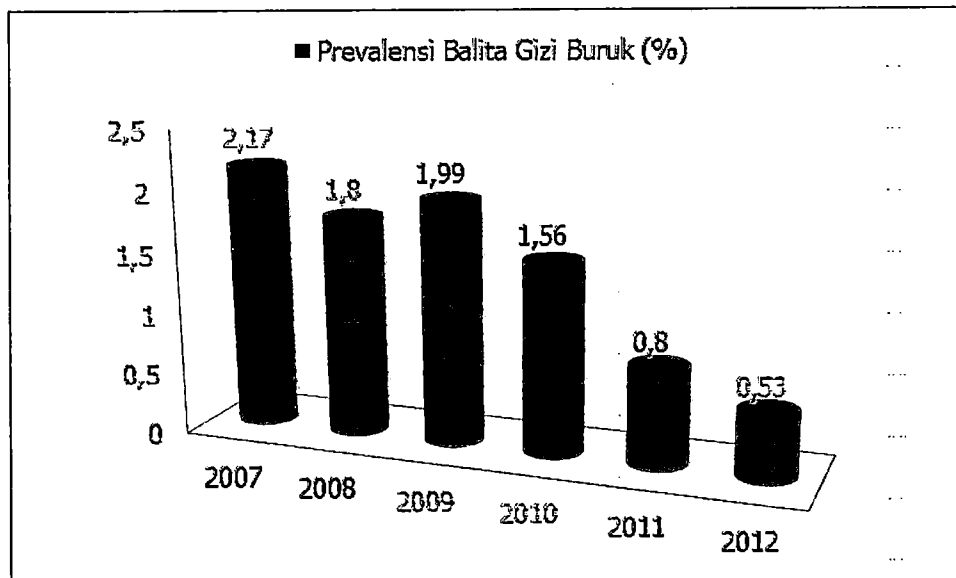
Grafik 2.3
Presentase Prevelensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Simeulue
Tahun 2007 s/d 2012



2. Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

Sebagaimana kecenderungan penurunan status balita gizi kurang, prevalensi balita gizi buruk juga mengalami penurunan. Pada tahun 2007 angka prevalensi balita gizi buruk mencapai 2,17 % dan menurun menjadi 0,53 % pada tahun 2012

Grafik 2.4
Presentase Prevelensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Simeulue
Tahun 2007 s/d 2012

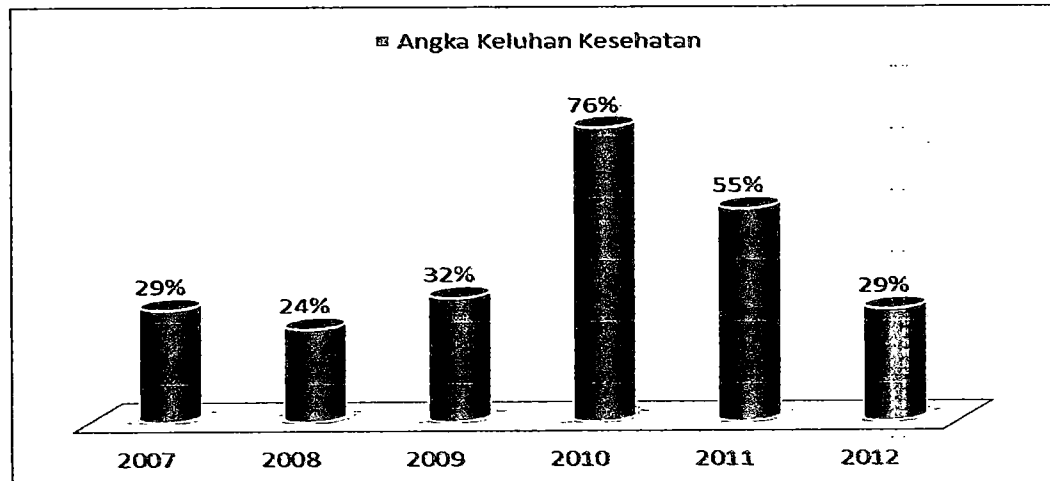


D. Angka Kesakitan

Angka penduduk dengan keluhan kesehatan di Kabupaten Simeulue selama periode lima tahun tidak mengalami perubahan, yaitu 29% pada tahun 2007 dan tetap sebesar 29%

pada tahun 2012. Bahkan dalam rentang waktu lima tahun tersebut angka penduduk dengan keluhan kesehatan mencapai 76% pada tahun 2010.

Grafik 2.5
Penduduk dengan Keluhan Kesehatan di kabupaten Simeulue
Tahun 2007 s/d 2012

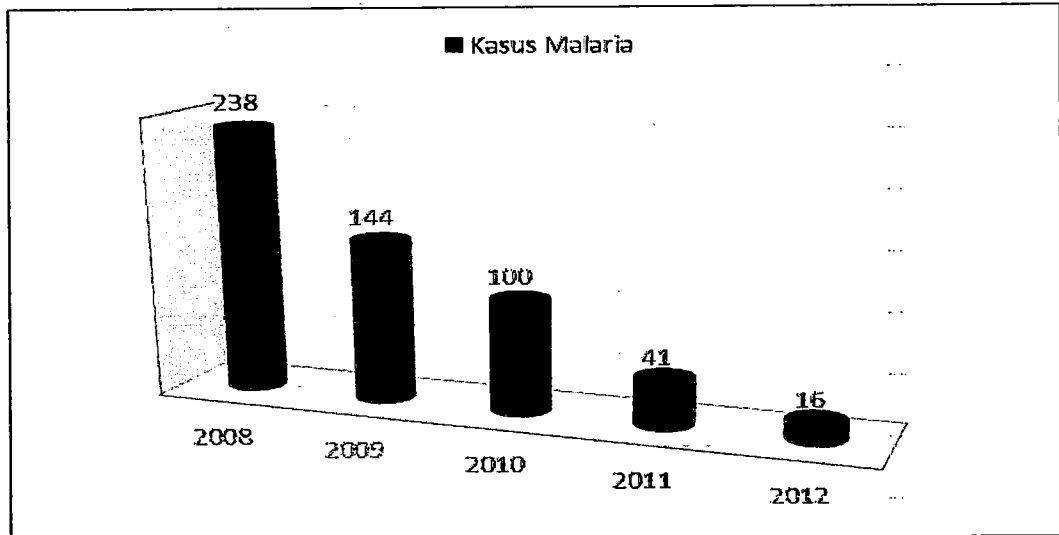


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Sebagian penduduk dengan keluhan menderita salah satu penyakit mencari pertolongan kesehatan ke pusat pelayanan kesehatan, dan sebagian yang lain mengobati sendiri atau tidak mencari pengobatan sama sekali. Berikut beberapa jenis penyakit :

Malaria di Kabupaten Simeulue cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 kasus malaria mencapai 238 kasus dan menurun secara signifikan menjadi 16 kasus pada tahun 2012. Sehubungan hal demikian, maka status malaria di Kabupaten Simeulue mengalami perubahan dari endemis menjadi non endemis. Kedepan sebagaimana Program Pemerintah Aceh dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 40 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Simeulue lebih fokus pada Program Eliminasi Malaria. Direncanakan pada tahun 2015 Kabupaten Simeulue bebas malaria.

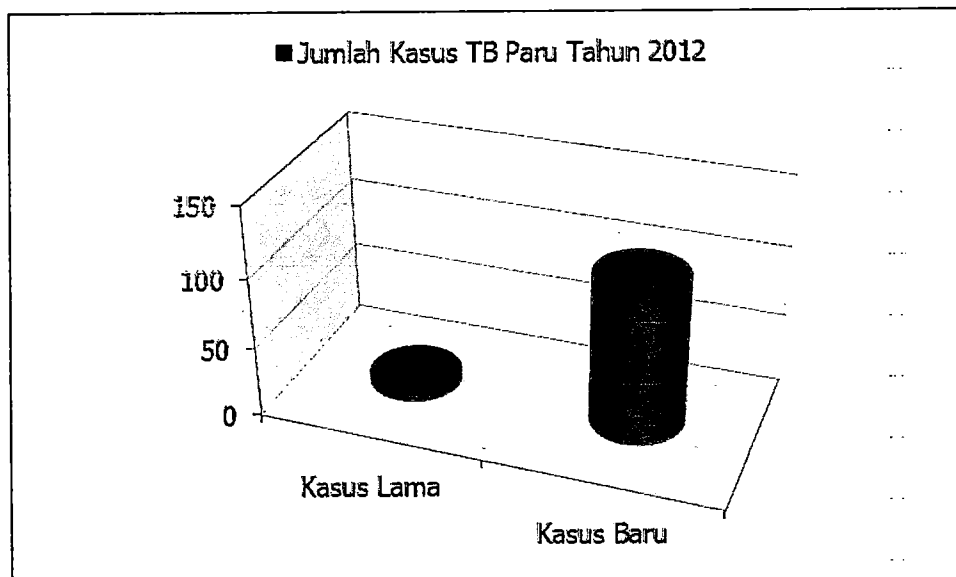
Grafik 2.5
Kasus Malaria di Kabupaten Simeulue Tahun 2008 s/d 2012



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Tuberkulosis (TBC) masih merupakan ancaman kesehatan bagi sebagian masyarakat Simeulue. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan beberapa program pemberantasan TB Paru akan tetapi belum maksimal disebabkan sumber daya yang ada masih terbatas, dimana tenaga TB yang ditunjuk merangkap kegiatan lain sehingga tidak mencapai hasil yang maksimal. Adapun kasus TB Paru di Kabupaten Simeulue tahun 2012 sebanyak 112 kasus yang terdiri dari 107 kasus baru dan 6 kasus lama, seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :

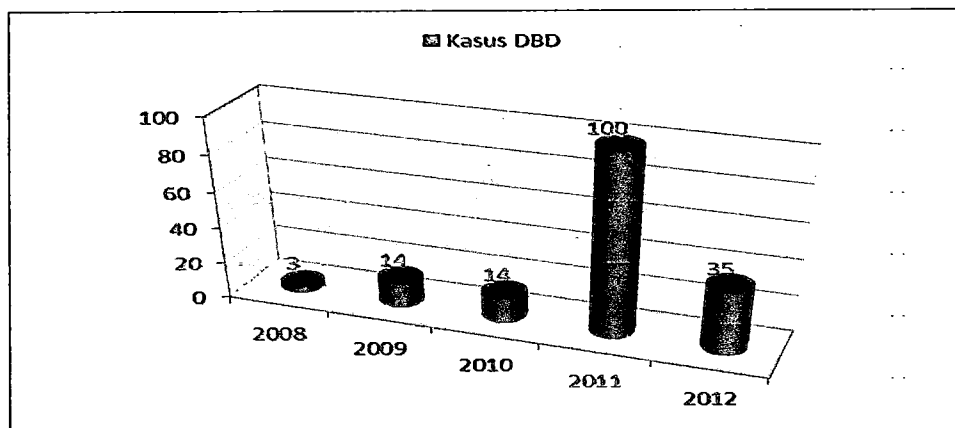
Grafik 2.6
Kasus TB Paru di Kabupaten Simeulue Tahun 2012



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *dengue*, dengan perantara nyamuk *aedes aegypti*. Kasus DBD di Kabupaten Simeulue pada tahun 2008 sebanyak 3 kasus, meningkat menjadi 100 kasus pada tahun 2011, akan tetapi kembali menurun pada tahun 2012 menjadi 35 kasus. Penyakit DBD sangat dipengaruhi oleh tingkat curah hujan dan kesadaran menjaga kesehatan lingkungan oleh masyarakat.

Grafik 2.7
Kasus DBD di Kabupaten Simeulue Tahun 2008 s/d 2012



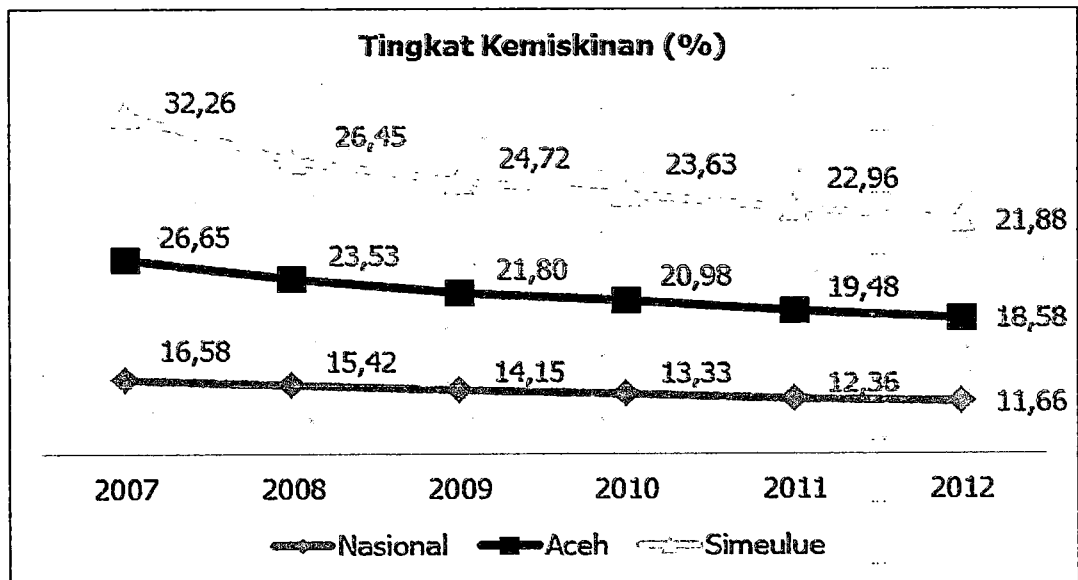
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium leprae*. Kusta dapat bersifat progresif menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, anggota badan dan mata. Kasus kusta di Kabupaten Simeulue hanya ada pada tahun 2009 sebanyak 2 kasus.

2.2.3.3 Tingkat Kemiskinan

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simeulue, akan tetapi sudah menjadi persoalan Pemerintah Aceh dan juga Bangsa Indonesia. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Simeulue, antara lain disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan rendahnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dalam rangka menanggulangi dan mengurangi populasi penduduk miskin/keluarga miskin.

Grafik 2.8
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%)
Tahun 2007 s/d 2012



Sumber : BPS Nasional Tahun 2012

Berdasarkan grafik diatas, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sebesar 32,26% turun menjadi 21,88% pada tahun 2012 atau mengalami penurunan sebesar 10,38% dalam kurun waktu lima tahun atau rata-rata 2,08% setiap tahunnya. Secara Kabupaten penurunan tersebut sudah signifikan, akan tetapi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional masih terlalu tinggi, bahkan berdasarkan RPJMN 2010-2014 sasaran penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10%. Disparitas tingkat kemiskinan Kabupaten Simeulue dibandingkan sasaran tingkat kemiskinan Nasional 2014 (8-10%), mengharuskan Pemerintah Kabupaten Simeulue bekerja keras untuk mencapainya. Paling tidak terdapat perbedaan sebesar 11,88% kondisi existing tingkat kemiskinan Simeulue dengan sasaran penurunan tingkat kemiskinan Nasional tahun 2014. Penurunan jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari dampak pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatnya aktivitas masyarakat dalam akselerasi pembangunan diberbagai sektor.

Secara nasional, jumlah individu menurut kecamatan dan status kesejahteraan terendah sampai dengan 30% berdasarkan basis data terpadu (BDT) PPLS 2011, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Jumlah Individu Menurut Kecamatan Dan
Status Kesejahteraan Terendah Sampai Dengan 30%

No	Kecamatan	Jumlah Individu			
		Desil 10% Terendah	Desil 10-20% Terendah	Desil 20-30% Terendah	Total
1.	Teupah Selatan	1.496	965	1.177	3.638
2.	Simeulue Timur	1.162	1.084	1.763	4.009
3.	Teupah Barat	1.728	1.121	1.238	4.087
4.	Simeulue Tengah	2.230	1.473	1.314	5.017
5.	Teiuk Dalam	1.126	564	437	2.127
6.	Salang	2.671	1.580	1.192	5.443
7.	Simeulue Barat	3.615	1.977	1.325	6.917
8.	Alafan	2.407	723	639	3.769
	Total	16.435	9.487	9.085	35.007

Sumber BDT PPLS 2011

2.2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia

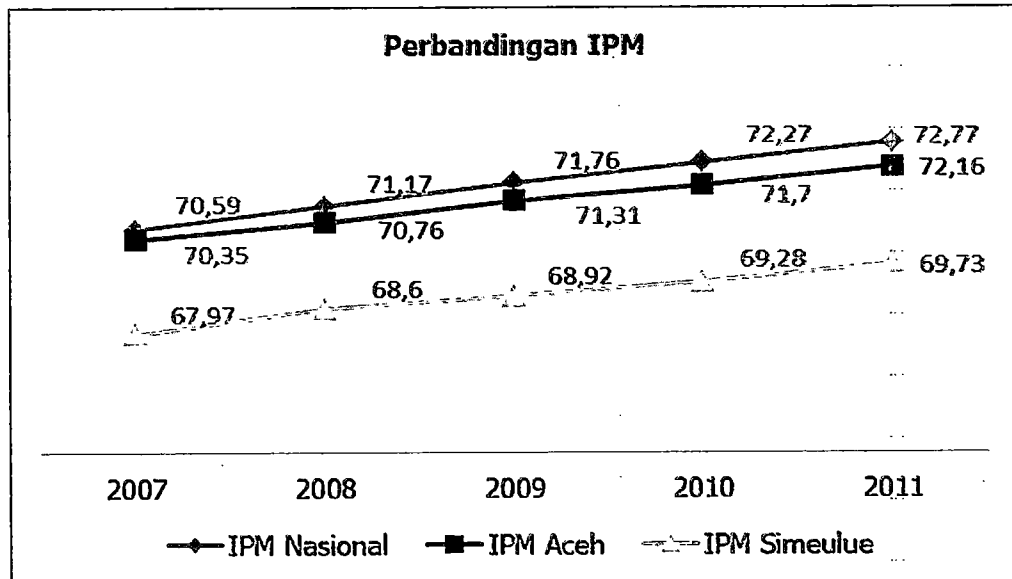
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue untuk periode 2007 – 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 IPM Kabupaten Simeulue sebesar 67,97 mengalami peningkatan menjadi 69,73 pada tahun 2011. Jika IPM semakin meningkat maka secara otomatis sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Simeulue juga semakin baik karena IPM dipengaruhi oleh angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi perkapita (Rp), seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Indikator Komponen IPM Kabupaten Simeulue
Tahun 2008-2011

No	Indikator Komponen IPM	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Angka Harapan Hidup	62,84	62,91	62,98	63,03
2	Melek Huruf	98,17	98,58	98,66	98,85
3	Rata-Rata Lama Sekolah	8,0	8,3	8,52	8,62
4	Konsumsi per kapita (Rp)	496.565	495.619	547.712	462.287

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simeulue cenderung meningkat dari tahun ke tahun. pada tahun 2007 IPM Kabupaten Simeulue sebesar 67,97 meningkat menjadi 69,73 pada tahun 2011. Namun peningkatan ini masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Aceh dan Nasional.

Grafik 2.9
Perbandingan IPM Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional
Tahun 2007-2011



Sumber : BPS Nasional 2012

2.2.4 Fokus Syariat Islam, Seni Budaya dan Olahraga

2.2.4.1 Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Simeulue, selama ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan masih kurangnya kesiapan tenaga penegak pelaksana syariat dimana petugas WH yang ada sebanyak 25 orang dan Da'i 11 orang pada tahun 2012, serta belum memadainya perangkat hukum/qanun sebagai pedoman dalam menjalankan Syariat Islam, meskipun telah banyak program/kegiatan baik sosialisasi maupun bimbingan teknis tentang pelaksanaan Syariat Islam. Disamping pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang Syariat Islam tidak sama terutama dari sudut heterogenitas dan tingkat daya nalar yang berbeda sehingga perlu waktu untuk menselaraskannya.

Kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pendukung pelaksanaan syariat islam di kabupaten simeulue tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.30

Tabel 2.30
Jumlah Sarana dan Prasarana Ibadah Per Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Sarana dan Prasarana Ibadah				
		Mesjid	Meunasah	TPA	Pesantren	Majlis Ta'lim
1.	Teupah Selatan	23	36	47	1	23
2.	Simeulue Timur	43	42	62	3	50
3.	Teupah Barat	18	22	32	1	10
4.	Simeulue Tengah	19	29	32	1	4
5.	Teluk Dalam	11	17	20	0	5
6.	Salang	19	23	21	0	9
7.	Simeulue Barat	18	49	51	2	4
8.	Alafan	10	21	9	0	9
Total		161	239	274	8	114

Sumber : data Kemenag Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Tabel 2.31
Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung
Pelaksana Syariat Islam Per Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Pendukung Pelaksana Syariat Islam					
		Imam Masjid	Bilal	Khatib	Gharim	Penyuluh Agama	P3N
1.	Teupah Selatan	23	23	23	23	11	8
2.	Simeulue Timur	43	43	43	43	14	24
3.	Teupah Barat	18	18	18	18	10	18
4.	Simeulue Tengah	19	19	19	19	10	7
5.	Teluk Dalam	11	11	11	11	8	5
6.	Salang	19	19	19	19	10	9
7.	Simeulue Barat	18	18	18	18	10	11
8.	Alafan	10	10	10	10	7	6
Total		161	161	161	161	80	88

Sumber : data Kemenag Kabupaten Simeulue Tahun 2012

Kepatuhan terhadap pelaksanaan syariat islam dapat dilihat dari banyaknya perkara yang diterima dan diproses pada lembaga Mahkamah Syari'ah Sinabang. Pada tabel 2.31, memperlihatkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kasus cerai gugat, yang pada tahun 2008 hanya 17 kasus meningkat sebesar 106 % menjadi 35 kasus pada tahun 2012. Hal ini perlu diantisipasi dengan peningkatan kesadaran dan penyuluhan agama bagi masyarakat.

Tabel 2.32
Banyaknya Perkara yang Diterima Menurut Jenis Perkara
Pada Mahkamah Syariah Sinabang Tahun 2008-2012

No	Jenis Perkara	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Izin Poligami	1	0	0	0	0
2.	Cerai Talak	8	6	15	13	14
3.	Cerai Gugat	17	28	33	29	35
4.	Harta Bersama	1	1	1	1	2
5.	Pengangkatan Anak	0	1	1	0	1
6.	Itsbat Nikah	3	2	2	3	2
7.	Kewarisan	1	1	1	0	0
8.	Perkara Jinayat	4	1	7	0	2

Sumber : Mahkamah Syariah Sinabang, 2012

2.2.4.2. Group Kesenian

Kabupaten Simeulue memiliki 44 sanggar (group) kesenian yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan kesenian. Hal ini menggambarkan bahwa Simeulue memiliki khasanah budaya yang tinggi dengan berbagai jenis kesenian.

Tabel 2.33

TABEL GROUP KESENIAN DAN GEDUNG KESENIAN DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011		
KECAMATAN	JUMLAH GROUP KESENIAN	JUMLAH GEDUNG KESENIAN
Teupah Selatan	3	0
Simeulue Timur	12	1
Teupah Barat	4	0
Simeulue Tengah	12	0
Teluk Dalam	3	0
Salang	5	0
Simeulue Barat	4	0
Alafan	1	0
Jumlah	44	1

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Simeulue Tahun 2012

2.2.4.3 Club Olah Raga dan Gedung Olah Raga

Kabupaten Simeulue memiliki 138 club olah raga sesuai dengan jenis olah raga yang digemari oleh masyarakat, dimana masing masing desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue memiliki 1 (satu) club olahraga dan kecamatan yang paling banyak club olahraga terdapat di Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Club dan disusul oleh Kecamatan Simeulue Tengah sebanyak 24 (dua puluh empat) Club, sedangkan Kecamatan Alafan memiliki club olahraga yang paling sedikit sebanyak 8 (delapan) club olahraga.

Tabel 2.34

TABEL CLUB OLAH RAGA DAN GEDUNG OLAH RAGA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011		
KECAMATAN	JUMLAH CLUB OLAH RAGA	JUMLAH GEDUNG OLAH RAGA
Teupah Selatan	19	0
Simeulue Timur	29	0
Teupah Barat	18	0
Simeulue Tengah	24	0
Teluk Dalam	10	0
Salang	16	0
Simeulue Barat	14	0
Alafan	8	0
Jumlah	138	0

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Simeulue Tahun 2012

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah

Selama periode tahun 2007-2011, Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar mengalami perubahan yang fluktuatif. APS untuk kelompok usia 7-12 sebesar 98,48% tahun 2007 meningkat menjadi 99% pada tahun 2011, sedangkan untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2007 angka partisipasinya sebesar 93,39% meningkat secara fluktuatif menjadi 94,83%.

Tabel 2.35
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2007 - 2011

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
7 - 12 Tahun	98,48%	98,81%	99,60%	100%	99%
13 - 15 Tahun	93,39%	94,38%	96,23%	98,89%	94,83%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar di sekolah/madrasah dalam suatu daerah. Pada tahun 2012 rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun adalah sebesar 95,89. Rasio ketersediaan SD/MI sebesar 95,89 mengandung arti bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Simeulue tersedia 96 unit SD/MI. Bila dibandingkan dengan jumlah desa yang jumlahnya 138 desa, maka rasio desa dan sekolah SD/MI adalah 1:0,92, yang artinya di setiap 1 desa terdapat 0,92 (nol koma sembilan dua) sekolah. angka ini sudah menunjukkan pemerataan sarana pendidikan, karena penyebarannya sudah sampai ke desa-desa terpencil.

Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun adalah sebesar 98,99. jadi rasio ketersediaan SMP/MTs sebesar 98,99 berarti untuk setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia sekitar 99 unit SMP/MTs. Peningkatan kedua indikator ini mengindikasikan semakin besarnya daya tampung satuan pendidikan dasar untuk mendukung kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Data tahun 2012 memperlihatkan bahwa rasio guru-siswa di Kabupaten Simeulue untuk tingkat SD/MI sebesar 1:15 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 15 siswa) dan di tingkat SMP/MTS sebesar 1:21 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 21 siswa).

Capaian rasio guru-siswa pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Simeulue jauh lebih baik, yang berarti bahwa secara keseluruhan jumlah guru dibandingkan jumlah siswa sudah memadai untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.

Tabel 2.36
Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan Dasar di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
		SD/Mi	SMP/MTs	SD/Mi	SMP/MTs	SD/Mi	SMP/MTs
1	Simeulue Timur	29	12	4186	1876	326	98
2	Teupah Selatan	17	8	1368	558	67	29
3	Teupah Barat	14	6	1185	495	94	23
4	Teluk Dalam	11	4	805	321	47	16
5	Simeulue Barat	21	8	1877	767	87	30
6	Simeulue Tengah	14	6	1460	652	127	40
7	Salang	12	6	1342	638	55	26
8	Alafan	9	4	856	268	48	9
Total		127	54	13079	5575	851	271

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

Dilihat dari kualifikasi pendidikan guru PNS yang mengajar pada tingkat pendidikan dasar, data tahun 2012 memperlihatkan 9,87 persen guru SD/MI telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan sisanya 90,13 persen belum berpendidikan S1, untuk SMP/MTs 70,11 persen sudah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan 29,89 persen belum memenuhi pendidikan S1.

Tabel 2.37
Jumlah Kualifikasi Pendidikan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan Dasar Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Tingkat SD/MI				Tingkat SMP/MTs	
		SPG/SGD/PGA Sederajat	D2	D4/S1	S2	D1/D2/D3	D4/S1
1	Simeulue Timur	49	241	36	0	34	64
2	Teupah Selatan	19	39	9	0	7	22
3	Teupah Barat	29	57	8	0	3	20
4	Teluk Dalam	9	33	5	0	2	14
5	Simeulue Barat	27	54	6	0	5	25
6	Simeulue Tengah	24	91	12	0	18	22
7	Salang	9	42	4	0	11	15
8	Alafan	18	26	3	1	1	8
Jumlah Guru PNS		184	583	83	1	81	190

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

Berdasarkan kondisi riil yang ada pada tingkat pendidikan dasar, diperlukan upaya peningkatan kualifikasi guru kejenjang strata satu (S1) disamping melakukan upaya peningkatan spesialisasi guru dan distribusi guru secara merata.

B. Pendidikan Menengah

1. Angka Partisipasi Sekolah

Pada jenjang pendidikan menengah, perkembangan APS periode tahun 2007-2011 juga menunjukkan capaian sama seperti pada APS pendidikan dasar. APS kelompok usia 16 - 18 tahun pada tahun 2007 sebesar 24,24% meningkat secara fluktuatif menjadi 78,81% pada tahun 2011.

Tabel 3.38

**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)
PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2007 - 2011**

PENDIDIKAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
	2	3	4	5	6
16 - 18 Tahun	24,24%	84,02%	84,04%	86,31%	78,81%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue Tahun 2012

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 16-18 tahun juga terus membaik dari tahun ke tahun.

Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2012 adalah sebesar 69,78. Hal ini bermakna bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Simeulue tersedia 70 unit SMA/MA/SMK untuk menampung siswa usia sekolah tersebut.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru-siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2012 di Kabupaten Simeulue sebesar 1:26 (rata-rata satu orang guru melayani sekitar 26 siswa).

Tabel 2.39
Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan Menengah di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	SMA/SMK/MA		
		Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	Simeulue Timur	10	2128	76
2	Teupah Selatan	5	379	11
3	Teupah Barat	2	290	11
4	Teluk Dalam	2	168	10
5	Simeulue Barat	5	606	24
6	Simeulue Tengah	3	503	32
7	Salang	3	499	12
8	Alafan	2	159	6
Total		32	4732	182

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

Kualifikasi pendidikan guru PNS yang mengajar pada tingkat pendidikan menengah, data tahun 2012 memperlihatkan 79,67 persen guru SMA/SMK/MA telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan sisanya 20,33 persen belum berpendidikan S1.

Tabel 2.40
Jumlah Kualifikasi Pendidikan Guru PNS pada Tingkat Pendidikan Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Tingkat SMA/SMK/MA			
		SMA	D3	D4/S1	S2
1	Simeulue Timur	7	5	61	3
2	Teupah Selatan	0	0	11	0
3	Teupah Barat	2	0	9	0
4	Teluk Dalam	0	0	10	0
5	Simeulue Barat	3	1	20	0
6	Simeulue Tengah	10	5	17	0
7	Salang	1	3	8	0
8	Alafan	0	0	6	0
Jumlah Guru PNS		23	14	142	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Simeulue 2012

2.3.1.2. Kesehatan

Pada tahun 2012 sarana pelayanan kesehatan yang telah beroperasi meliputi 1 (satu) rumah sakit, 8 (delapan) puskesmas tersebar pada 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, dan adanya peningkatan status poskesdes pada tahun 2011 menjadi pustu sebanyak 5 (lima) unit sehingga pustu yang telah beroperasi pada tahun 2012 sebanyak 125 unit.

Tabel 2.41
Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2008 – 2012

No	Sarana Kesehatan	Jumlah				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2.	Puskesmas	8	8	8	8	8
3.	Pustu	97	97	97	120	125
4.	Poskesdes	5	5	24	5	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Simeulue 2012

Indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Simeulue selama periode 2007-2011 menunjukkan kecenderungan meningkat untuk seluruh indikator, kecuali rasio dokter per satuan penduduk, yang menunjukkan peningkatan secara fluktuatif. Ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Simeulue menjadi perhatian utama, oleh karena itu strategi yang digunakan adalah meningkatkan kapasitas dokter atau calon dokter yang selama ini berada/berdomisili di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2011

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Rasio posyandu per satuan balita	14,53	14,53	13,97	13,97	15,81
2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk	1,25	1,31	1,26	1,52	1,54
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,10	0,11	0,14	0,43	0,22
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,89	3,01	2,89	3,42	3,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Simeulue 2012

A. Rasio Posyandu Per satuan Balita

Jumlah balita yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun 2011 adalah 10.055 dan jumlah posyandu yang ada sebanyak 159 unit sehingga Rasio posyandu per 1.000 balita adalah sebesar 15,81. Hal ini bermakna bahwa 16 posyandu melayani 1.000 balita.

B. Rasio Puskesmas Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Jumlah puskesmas, polindes dan pustu yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebanyak 133 unit dengan total penduduk di Kabupaten Simeulue sebesar 86.190 sehingga rasio Puskesmas, polindes dan pustu per 1.000 penduduk adalah 1,54. Hal ini bermakna bahwa 2 (dua) puskesmas, polindes dan pustu melayani 1.000 penduduk.

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit yang di Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebanyak 1 unit dengan total penduduk di Simeulue sebesar 86.190 sehingga rasio rumah sakit per 1.000 penduduk adalah 0,01. Hal ini bermakna bahwa 0,01 rumah sakit melayani 1.000 penduduk.

D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebanyak 19 orang dengan total penduduk di Kabupaten Simeulue sebesar 86.190 sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,22. Hal ini bermakna bahwa 0,22 dokter melayani 1.000 penduduk.

E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue tahun 2011 sebanyak 325 orang dengan total penduduk di Kabupaten Simeulue sebesar 86.190 sehingga rasio tenaga medis per 1.000 penduduk adalah 3,77. Hal ini bermakna bahwa 4 (empat) tenaga medis melayani 1.000 penduduk.

2.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.3.2.1 Fokus Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur penduduk Kabupaten Simeulue, terdapat 58.042 jiwa atau 65,24% dari jumlah penduduk merupakan angkatan kerja, yang terdiri atas 51,46% angkatan kerja laki-laki dan 48,53% angkatan kerja perempuan. 61,03% angkatan kerja di Kabupaten Simeulue memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (BDT PPLS, 2011), dan hanya 2,77% (2011) angkatan kerja yang menamatkan pendidikan S1.

2.3.2.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio tingkat ketergantungan di Kabupaten Simeulue mengalami perbaikan, tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur ≥ 65 tahun maka semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup yang akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan produktifitasnya. Pada tahun 2008 angka rasio ketergantungan hidup mencapai 58,66 persen dan turun secara fluktuatif menjadi 53,26 persen pada tahun 2012.

Tabel 2.43
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Simeulue
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	29.546	24.460	28.369	25.824	27.539
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	1.904	2.977	2.376	3.361	3.378
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	31.450	27.437	30.745	29.185	30.917
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	53.610	59.706	49.929	57.005	58.046
5	Rasio ketergantungan = (3)/(4)%	58,66	45,95	61,58	51,20	53,26

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab; serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Artinya daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi sumber daya di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis atas sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila tersedia pendanaan yang cukup. Pemerintah daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensi penerimaan daerah sehingga pelaksanaan atas rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik (*money follow function*).

Maksud dari analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Simeulue ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan prediksi atas komponen APBK dan laporan keuangan daerah. Dengan demikian, analisis dilakukan terhadap realisasi kinerja keuangan Kabupaten Simeulue 5 (lima) tahun sebelumnya.

Analisis pendanaan Kabupaten Simeulue dilakukan terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis dilakukan terhadap jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan susunan/struktur APBK Simeulue, yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis juga dilakukan terhadap unsur-unsur neraca daerah, yakni aset, hutang daerah, dan ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah memperlihatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah dan sumber penerimaan lainnya, sehingga dapat dipahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Dalam konsep penganggaran yang membolehkan terjadinya defisit pada batas-batas tertentu, kebijakan pendanaan menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang adil, akuntabel, dan partisipatif.

3.1. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue

3.1.1 Analisis Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan daerah, diantaranya angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, dan kebijakan di bidang keuangan negara.

Perkembangan APBK dan rata-rata realisasi APBK Simeulue tahun 2007-2012 dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Simeulue
Tahun 2007 s/d 2012

KODE	URAIAN	TAHUN						RATA-RATA
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	PENDAPATAN	270.950.956.139	317.675.245.190	314.099.068.645	307.496.948.198	407.387.549.508	420.240.614.402	9,93
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.625.105.935	6.120.735.835	10.585.952.000	8.107.924.049	7.231.094.032	14.790.455.421	44,94
1.1.1.	Pajak daerah	17.240.000	635.231.894	476.838.495	779.699.764	1.455.425.649	2.810.716.251	909,03
1.1.2.	Retribusi daerah	541.919.260	490.611.130	1.132.314.280	1.911.174.174	1.241.968.347	6.600.509.436	120,53
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.395.044.785	4.522.384.844	4.917.542.614	2.246.709.829	1.652.621.609	1.694.682.925	6,23
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	669.901.890	2.272.505.958	4.060.256.611	3.170.340.262	1.230.811.313	2.161.675.043	62,09
1.1.5.	Zakat					1.640.257.114	1.122.871.764	(31,54)
1.2.	Dana Perimbangan	260.902.916.996	292.492.509.574	284.216.365.391	287.556.446.618	342.889.690.872	381.577.673.585	8,20
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	32.210.916.996	34.328.649.574	28.977.309.391	34.907.342.618	32.731.293.872	29.543.687.585	(0,90)
1.2.2.	Dana alokasi umum	184.733.000.000	205.553.850.000	209.826.056.000	218.813.604.000	250.138.597.000	309.799.056.000	11,12
1.2.3.	Dana alokasi khusus	43.959.000.000	52.610.000.000	45.413.000.000	33.835.500.000	50.019.800.000	42.234.930.000	2,55
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.422.933.208	17.061.999.780	19.295.751.254	11.832.577.531	57.266.774.604	23.872.485.396	93,14
1.3.1.	Hibah		3.150.000.000	0	-	0	0	(100,00)
1.3.2.	Dana darurat	-	0	0	-	0	0	
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	-	10.881.446.578	5.476.601.254	5.319.929.131	7.722.957.284	8.461.025.396	0,55
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus(***)	-	1.495.100.000	3.819.150.000	450.000.000	47.586.550.240	12.315.860.000	2.616,97
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.422.933.208	1.535.453.202	10.000.000.000	6.062.648.400	1.957.267.080	3.695.600.000	85,25

Berdasarkan tabel di atas rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan sebesar 9,93%, dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per jenis pendapatan terhadap pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan sebesar 8,20%, lain-lain pendapatan daerah sebesar 93,14%, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 44,94%

Berdasarkan data tersebut diatas pendapatan daerah Kabupaten Simeulue masih lebih didominasi oleh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum, Bagi hasil SDA dan non SDA, serta Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya diikuti oleh lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang terdiri dari bagi hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi, serta dana penyesuaian, Sedangkan kontribusi PAD menjadi komponen terkecil dalam struktur Pendapatan daerah yang lebih didominasi oleh Retribusi daerah.

Pencapaian target tersebut merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial maupun penyesuaian tarif terhadap pengenaan Pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja, dimana arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dengan menganut pada Pro Poor, Pro growth, dan pro job.

Di Kabupaten Simeulue rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama kurun waktu 2007-201 sebesar 9,60%, pertumbuhan belanja langsung sebesar 17,11 % dan belanja langsung sebesar 5,35%. Sedangkan untuk Proporsi, belanja tidak langsung lebih dominan bila dibandingkan dengan belanja langsung hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan daerah digunakan untuk belanja pegawai. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Simeulue tahun (2007-2012)

KODE	URAIAN	TAHUN						RATA-RATA
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
2	BELANJA	258.888.854.595	290.689.870.384	349.408.907.464	307.791.983.201	337.884.737.773	397.482.968.006	9,60
2.1	Belanja Tidak Langsung	95.333.757.851	128.888.796.800	158.192.382.633	173.465.424.747	188.718.829.486	206.031.895.630	17,11
1	Belanja Pegawai	74.538.574.401	103.482.175.185	125.280.870.633	144.383.203.341	160.276.584.263	184.797.097.378	20,29
2	Belanja Bunga	-	43.793.950		1.020.499.124	1.083.570.742	120.000	(64,60)
3	Belanja Subsidi	745.200.000	366.670.800	0	-	0		(75,40)
4	Belanja Hibah	2.986.000.000	2.137.080.000	20.095.301.000	14.249.630.000	10.681.646.657	13.835.272.053	157,27
5	Belanja Bantuan Sosial	14.376.246.700	22.751.456.865	4.638.500.500	5.939.747.132	2.289.543.452	3.326.450.000	(9,16)
6	Belanja Bagi Hasil	-	0	0	-	0		
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.592.000.000	0	6.900.000.000	7.472.975.000	13.905.124.972	3.857.337.119	(19,47)
8	Belanja Tidak Terduga	95.736.750	167.700.000	1.077.710.500	479.370.150	282.359.400	214.819.080	158,52
2.2	Belanja Langsung	163.555.096.744	161.801.073.584	191.216.524.831	134.326.558.454	149.165.908.288	191.451.072.376	5,35
1	Belanja Pegawai	19.382.519.810	19.382.519.810	25.012.744.975	20.792.817.260	18.131.963.575	52.778.607.462	38,09
2	Belanja Barang dan Jasa	38.918.564.115	61.915.881.283	88.729.722.204	64.827.673.265	49.877.770.690	79.806.368.776	22,16
3	Belanja Modal	105.254.012.819	80.502.672.491	77.474.057.652	48.706.067.989	81.156.174.023	59.866.096.138	(4,85)

Pada lima tahun ke depan, proporsi alokasi ini akan dicermati dengan lebih baik sejalan dengan dinamika perekonomian dan kondisi sosial di Kabupaten Simeulue. Kebijakan pengalokasian anggaran setiap tahun akan disepakati oleh Bupati Simeulue dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (DPRK) dalam Kebijakan Umum APBK (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue (APBK), sesuai dengan substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan pendekatan perencanaan lainnya (seperti *top-down* dan teknokratik).

Tabel 3.3. menyajikan informasi tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Simeulue selama tahun 2007-2011. Penyajian informasi ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana porsi anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib, mengikat, serta menjadi prioritas dalam anggaran Kabupaten Simeulue.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Simeulue bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan serta keberlangsungan pelayanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan yang wajib, mengikat dan prioritas utama adalah pengeluaran pembiayaan yang harus dibayai, baik karena amanat perundang-undangan maupun komitmen/kontrak perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Data analisis realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 3.3
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Simeulue

No	Uraian	2007 (RP)	2008 (RP)	2009 (RP)	2010 (RP)	2011 (RP)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	41.565.576.386	52.266.702.449	49.745.864.612	58.827.599.696	67.484.492.505	13,47
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	29.502.037.686	32.737.107.134	38.505.320.778	48.550.521.718	60.344.699.957	19,74
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	506.000.000	560.835.000	593.000.000	271.000.000	242.300.000	-12,08
3	Belanja Bunga	-	43.793.950	(49.556.166)	1.020.499.124	237.744.908	-816,38
4	Belanja bantuan Sosial	9.703.988.700	18.893.466.365	3.532.100.000	2.398.211.854	1.584.317.640	-13,16
5	Belanja bantuan keuangan	1.823.550.000	-	6.900.000.000	6.370.625.000	5.027.000.000	-42,92
6	Belanja Tak terduga	30.000.000	31.500.000	265.000.000	206.742.000	48.430.000	161,93
B	Belanja Langsung	10.067.722.821	9.364.990.815	10.142.732.622	6.712.689.766	7.630.538.800	-4,70
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7.876.277.500	7.444.508.000	8.124.782.000	4.551.237.500	5.794.439.850	-3,25
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	1.600.649.571	1.375.674.131	1.577.962.485	1.701.167.266	1.716.063.950	2,33
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	311.320.750	494.833.684	330.788.137	361.290.000	90.850.000	-9,96
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	279.475.000	49.975.000	109.200.000	98.995.000	29.185.000	-10,87
C	Pembiayaan Pengeluaran	20.780.427.356	16.700.000.000	12.297.116.516	5.299.100.000	1.159.519.000	-45,26
1	Pembentukan Dana Cadangan						
	Penyertaan modal investasi	20.780.427.356	16.700.000.000	12.297.116.516	5.299.100.000	1.159.519.000	-45,26
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-		
	TOTAL (A+B+C)	72.413.726.563	78.331.693.264	72.185.713.750	70.839.389.462	76.274.550.305	1,53

Sumber : DPPKKD tahun 2012

3.1.3 Analisis Pembiayaan

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan menggunakan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Secara historis, jumlah seluruh penerimaan, yakni gabungan dari penerimaan dari pendapatan daerah dan penerimaan dalam pembiayaan daerah, selalu meninggalkan sisa dana pada akhir tahun, yang disebut sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Untuk tahun anggaran 2007 sampai 2012, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan cenderung mengalami penurunan, yakni sebesar Rp. 27.912.925.366 pada tahun 2009 menjadi Rp. 24.141.558.987,- pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan utamanya berkaitan dengan pencapaian target kinerja (output dan outcome) dan atau adanya perencanaan anggaran yang kurang akurat. Rincian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut.

Tabel 3.3
Rincian Pembiayaan Kabupaten Simeulue Tahun 2007 s/d 2012

KODE	URAIAN	REALISASI					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah (SILPA)	56.350.823.822	44.533.425.871	49.518.800.677	1.415.291.858	(17.379.743.144)	28.383.912.591
	Penerimaan Pinjaman Daerah				13.000.000.000		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.500.000.000	22.000.000.000	25.793.670.000	18.500.000.000	23.739.156.000	27.000.000.000
	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah					10.739.156.000	
	Pembayaran Pokok Utang					13.000.000.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	15.850.823.822	22.533.425.871	23.725.130.677	(17.084.708.142)	(41.118.899.144)	1.383.912.591
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	27.912.925.366	49.518.800.677	(11.584.708.142)	(17.379.743.144)	28.383.912.591	24.141.558.987

3.1.4 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Neraca Kabupaten Simeulue periode tahun 2007, yaitu jumlah aset lancar sebesar **Rp 536.587.525** sedangkan jumlah aset tetap sebesar **Rp 409.339.818.996**. Selain itu, nilai aset lainnya sebesar **Rp 9.783.473.517,00**. Total Aset Daerah Kabupaten Simeulue yang tercatat pada tahun 2007 adalah sebesar **Rp 591.214.730.529**.

Kewajiban (utang) Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek pada tahun 2007 tercatat sebesar **Rp 150.000.000,00** sedangkan kewajiban jangka panjang tercatat sebesar **Rp 0,00**. Untuk lebih jelasnya mengenai aset daerah Kabupaten Simeulue pada tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Simeulue TAHUN 2007-2011**

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2008
1	2	3	4	5	6	7
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	636.687.628	7.044.448.464	4.893.015.433	6.269.338.048	6.214.823.076	1.219
Kas di Kas Daerah	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pemerintah	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pelaksanaan	-	-	-	-	-	-
Inventari Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang						
Piutang Pajak	5.630.000	501.276.429	223.744.822	474.315.852	993.760.429	13.129
Piutang Retribusi	315.051.430	261.534.540	642.304.470	1.136.050.554	204.385.229	(144)
Piutang Dana Bagi Hasil	30.809.814.402	25.557.375.781	16.611.008.292	23.291.875.000	25.170.317.829	(171)
Piutang Dana Alokasi Umum	76.972.088.000	122.772.632.000	37.427.851.020	24.172.335.000	108.391.055.000	34
Piutang Dana Alokasi Khusus	36.013.000.000	36.827.000.000	31.782.100.000	23.554.850.000	52.012.000.000	3
Piutang Lainnya	6.422.933.593	9.313.020.978	12.295.751.254	8.277.653.331	45.809.360.021	46
Persediaan	160.648.787.043	176.343.139.818	157.691.719.929	148.877.121.863	230.968.251.485	19
	215.835.095	1.658.049.451	5.203.876.341	1.029.276.504	701.510.244	885
	160.774.422.138	177.001.389.379	160.620.565.949	150.046.400.547	231.779.285.709	17
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Piutaman Kepada Pemerintah Negara	-	-	-	-	-	-
Piutaman Kepada Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
Piutaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Bentuk Utang Negara	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen						
Pembiayaan Modal Pemerintah Daerah	20.730.427.392	16.700.000.000	12.297.116.516	5.229.100.000	1.159.519.000	(50)
Pembiayaan Modal Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Modal Perusahaan Perumahan	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
ASET TETAP						
Tanah	49.731.012.874	51.174.022.928	42.077.343.100	60.547.746.540	74.717.360.429	3
Peralatan dan Ueduk	75.837.037.500	88.308.500.878	144.581.650.528	159.598.455.753	171.212.357.779	(110)
Gedung dan Bangunan	134.021.616.535	158.248.379.514	224.822.478.394	309.441.924.443	311.739.256.857	(7)
Jalan, Jembatan dan Jaringan	143.717.317.000	70.589.850.440	143.727.681.321	150.419.532.493	227.141.000.371	(61)
Aset Tetap Lainnya	9.071.522.630	4.192.512.420	5.285.430.921	9.120.851.040	11.059.206.921	(117)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6.732.342.320	465.000.000	5.280.563.574	3.201.716.434	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

ASET LAINNYA							
Teghas Perwakilan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-
Teghas Wakil Gubernur Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
Kembaraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	9.783.473.517	1.643.000.000	-	-	-	2.559.326.244	(80)
RUNJAH ASET							
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-
Sajian Letter Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	13.000.000.000	-	-
Persediaan Denda Denda	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	150.000.000	-	-	-	-	1.029.000	(100)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Ekam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA							
EKUITAS DANA LANCAR							
Saldo Lebih Pembelian Anggaran (SILPA)	28.377.600.404	40.503.600.677	(11.584.708.142)	(17.372.743.144)	23.175.248.351	74	
Cesahan Piutang	-	24.001.000	-	-	1.740.000	-	
Cesahan Perbedaan	-	1.683.074.907	1.075.191.245	2.060.300.000	1.443.700.000	-	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -							
Utang Jangka Pendek	(150.000.000)	-	-	(13.000.000.000)	(1.000.000)	(100)	
Persediaan yang Ditanggung	-	-	-	-	-	-	
EKUITAS DANA INVESTASI							
Dan investasi dalam Investasi Jangka Panjang	137.000.000.000	137.569.821.570	339.300.491.570	339.300.491.570	193.505.479.800	83	
Dan investasi dalam Aset Tetap	409.339.616.000	329.243.514.370	640.829.464.200	609.921.233.481	504.370.455.905	(50)	
Dan investasi dalam Aset Lainnya	9.783.473.517	1.643.000.000	-	-	2.559.326.244	(80)	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -							
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	
EKUITAS DANA CADANGAN							
Dan investasi dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
RUNJAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	564.416.692.617	682.272.212.663	947.611.458.933	898.482.348.169	1.022.856.136.493	(4)	

Tabel 3.6
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Simeulue

NO	Ukuran	2007	2008	2009	2010	2011
1	Aktiva Lancar	23.377.500,404	49.515.800,677	(11.554.703,142)	(17.039.068,144)	23.383.912,591
	Kewajiban jangka pendek	150.000,000	-	-	13.000.000,000	1.995,000
	Rasio Lancar (current Ratio)	159	-	-	(1)	14,223
2	Aktiva Lancar	23.377.500,404	49.515.800,677	(11.554.703,142)	(17.039.068,144)	23.383.912,591
	Penjualan	-	1.582.674,997	1.076.191,243	2.060.366,292	1.443.700,516
	Kewajiban jangka pendek	150.000,000	-	-	13.000.000,000	1.995,000
	Rasio Quick (quick ratio)	159	-	-	(1)	13,504
3	Total Hutang	150.000,000	-	-	13.000.000,000	1.995,000
	Total Aset	584.566.092,917	562.272.212,683	847.511.433,823	911.803.023,199	1.030.864.854,733
	Rasio Hutang terhadap total aset	0	-	-	0	0
4	Total Hutang	150.000,000	-	-	13.000.000,000	1.995,000
	Total Ekuitas	584.416.092,917	562.272.212,683	847.511.433,823	898.803.023,199	1.028.869.859,733
	Rasio Hutang terhadap ekuitas	0	-	-	0	0

3.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2012-2017 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2007-2012), maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2012-2017. Berdasarkan potensi pendanaan, Kabupaten Simeulue mempunyai potensi pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah dan juga didukung oleh Dana Perimbangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya sbb :

Tabel 3.7

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Simeulue Tahun 2013-2017 (masukan dana Otsus di Pendapatan)

KODE	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PENDAPATAN	484.193.254.633	524.832.671.393	569.679.129.669	571.825.968.762	621.513.179.849
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	374.816.911.000	413.811.841.840	457.465.917.921	459.440.917.962	496.603.801.879
1.1.1.	Pajak daerah	2.145.000.000	2.810.718.351	3.810.718.351	3.810.718.351	3.810.718.351
1.1.2.	Retribusi daerah	9.195.000.000	9.195.000.000	9.195.000.000	9.195.000.000	9.195.000.000
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.930.000.000	2.421.049.546	2.571.738.668	2.872.738.668,14	2.930.011.561,01
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	2.125.191.000	2.161.679.043	2.161.679.043	2.161.679.043	2.161.679.043
1.1.5.	Denda	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
1.2.	Dana Perimbangan	641.576.343.633	482.581.184.980	507.018.914.422	529.875.710.125	574.882.603.279
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/dag hasil bukan pajak	29.543.687.889	29.276.491.440	29.589.124.345	29.864.947.898	30.161.801.399
1.2.2.	Dana alokasi umum	344.343.037.482	382.541.783.652	408.045.771.758	425.029.771.768,90	472.342.430.081,62
1.2.3.	Dana alokasi khusus	69.000.000.000	70.763.911.488	71.379.964.369	74.475.000.459	76.576.809.011
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.919.911.989	21.965.648.573	24.012.609.314	24.029.269.614	24.059.831.403
1.3.1.	Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2.	Dana darurat	0	0	0	0	0
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya (***)	8.501.479.989	8.554.385.573	8.501.479.984	8.501.349.514,25	8.642.571.494,82
1.3.4.	Dana partisipasi dan subsidi khusus (***)	13.418.432.000	13.411.263.000	15.511.129.330	15.527.920.100	15.417.256.908
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

Tabel Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas rill kemampuan keuangan	(16,519,789,308.00)	(31,081,706,048.41)	(45,643,622,788.82)	(60,205,539,529.23)	(74,767,456,269.64)	(89,329,373,010.05)
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	194,864,948,047.00	201,924,628,848.62	208,984,309,650.24	216,043,990,451.86	223,103,671,253.48	230,163,352,055.10
II.b	Pembentukan dana cadangan	400,442,275,700.00	417,564,042,144.00	434,685,808,588.00	451,807,575,032.00	468,929,341,476.00	486,051,107,920.00
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	194,864,948,047.00	201,924,628,848.62	208,984,309,650.24	216,043,990,451.86	223,103,671,253.48	230,163,352,055.10
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	27,000,000,000.00	28,468,519,381.20	29,937,038,762.40	31,405,558,143.60	32,874,077,524.80	34,342,596,906.00
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	232,577,327,653.00	244,107,932,676.58	255,638,537,700.16	267,169,142,723.74	278,699,747,747.32	290,230,352,770.90
	Sisa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	216,057,538,345.00	213,026,226,628.17	209,994,914,911.34	206,963,603,194.51	203,932,291,477.68	200,900,979,760.85
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	216,707,869,602.00	224,817,838,022.83	232,927,806,443.66	241,037,774,864.49	249,147,743,285.32	257,257,711,706.15
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	216,707,869,602.00	224,817,838,022.83	232,927,806,443.66	241,037,774,864.49	249,147,743,285.32	257,257,711,706.15
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	216,707,869,602.00	224,817,838,022.83	232,927,806,443.66	241,037,774,864.49	249,147,743,285.32	257,257,711,706.15
	Surplus anggaran rill atau Berimbang (I-II-III)*	(650,331,257.00)	(11,791,611,394.66)	(22,932,891,532.32)	(34,074,171,669.98)	(45,215,451,807.64)	(56,356,731,945.30)

Catatan :

sisa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya semakin menurun, fenomena ini dibarengi surplus/defisit anggaran rill atau berimbang yang setiap tahunnya semakin bertambah setiap tahunnya.

Kesimpulannya, Sisa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah berbanding terbalik dengan surplus/defisit anggaran rill atau berimbang

Tabel 3.14 Estimasi Penerimaan Kabupaten Simeulue 2012-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH	480,332,098,700	547,746,972,890	624,623,561,744	712,289,822,118	712,289,822,118
Pendapatan Asli Daerah	17,478,691,000	17,856,829,042	18,234,967,085	18,613,105,127	18,991,243,169
Hasil Pajak Daerah	2,145,000,000	2,183,316,653	2,221,633,306	2,259,949,959	2,298,266,612
Hasil Retribusi Daerah	10,895,500,000	10,944,674,291	10,993,848,581	11,043,022,872	11,092,197,162
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,280,000,000	2,386,528,605	2,493,057,209	2,599,585,814	2,706,114,419
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2,158,191,000	2,272,259,234	2,386,327,468	2,500,395,703	2,614,463,937
Dana Perimbangan	443,326,251,756	462,484,933,806	481,643,615,856	500,802,297,906	519,960,979,957
Bagi Hasil Pajak		1,079,644,261	2,159,288,521	3,238,932,782	4,318,577,043
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28,881,133,756	30,341,376,595	31,801,619,435	33,261,862,274	34,722,105,114
Dana Alokasi Umum	345,242,688,000	358,185,004,950	371,127,321,900	384,069,638,850	397,011,955,800
Dana Alokasi Khusus	69,202,430,000	72,878,908,000	76,555,386,000	80,231,864,000	83,908,342,000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	19,527,155,944	21,242,581,454	22,958,006,964	24,673,432,474	26,388,857,984
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	7,211,295,944	7,674,787,858	8,138,279,773	8,601,771,687	9,065,263,602
Dana Penyesuaian Otonomi Daerah	12,315,860,000	13,235,866,037	14,155,872,075	15,075,878,112	15,995,884,149
Dana Bantuan Dari Propinsi		331,927,558	663,855,116	995,782,675	1,327,710,233
BELANJA	480,832,098,699,98				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	236,622,956,175				
Belanja Pegawai	222,672,353,197				
Bantuan Hibah	6,270,625,000				
Bantuan Sosial	3,050,000,000				
Bantuan Keuangan	4,129,977,978				
Belanja Subsidi					
Dana Tidak Terduga	500,000,000				
BELANJA LANGSUNG	244,209,142,525				
Belanja Pegawai	28,395,000,000				
Belanja Barang Jasa/	121,180,327,947				
Belanja Modal (sharing)	94,633,814,578				
SURPLUS/DEFISIT	(500,000,000)				
PEMBIAYAAN DAERAH	500,000,000				
Penerimaan Pembiayaan	2,000,000,000				
- Penerimaan Pinjaman Daerah					

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SIL)	2,000,000,000			
Pengeluaran Pembiayaan	1,500,000,000			
Penyertaan modal pemerintah daerah	1,500,000,000			
- Penyertaan Modal PDKS				
- Penyertaan Modal PT BPD Aceh	1,000,000,000			
- PDAM	500,000,000			
PEMBIAYAAN NETTO				
SILPA				

catatan

Pada Pendapatan Asli Daerah tambahan pendapatan berupa zakat/hibah tidak dimasukkan

TAHUN

	PENDAPATAN DAERAH	Total pengeluaran (Belanj Prosentase	
	(Rp)	(Rp)	(a) / (b) x 100%
	(a)	(b)	
2013	71750045560	1.5555E+11	46.12670491
2014	80025389187	1.65526E+11	48.34608582
2015	78846240596	1.05277E+11	74.89419151
2016	91169870662	1.30852E+11	69.67422002
2017	0	0	0

Tabel 3.14 Estimasi Penerimaan Kabupaten Simeulue 2012-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH	480,332,098,700	547,746,972,890	624,623,561,744	712,289,822,118	812,260,090,345
Pendapatan Asli Daerah	17,478,691,000	17,856,829,042	18,234,967,085	18,613,105,127	18,991,243,169
Hasil Pajak Daerah	2,145,000,000	2,183,316,653	2,221,633,306	2,259,949,959	2,298,266,612
Hasil Retribusi Daerah	10,895,500,000	10,944,674,291	10,993,848,581	11,043,022,872	11,092,197,162
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,280,000,000	2,386,528,605	2,493,057,209	2,599,585,814	2,706,114,419
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2,158,191,000	2,272,259,234	2,386,327,468	2,500,395,703	2,614,463,937
Dana Perimbangan	443,326,251,756	462,484,933,806	481,643,615,856	500,802,297,906	519,960,979,957
Bagi Hasil Pajak		1,079,644,261	2,159,288,521	3,238,932,782	4,318,577,043
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28,881,133,756	30,341,376,595	31,801,619,435	33,261,862,274	34,722,105,114
Dana Alokasi Umum	345,242,688,000	358,185,004,950	371,127,321,900	384,069,638,850	397,011,955,800
Dana Alokasi Khusus	69,202,430,000	72,878,908,000	76,555,386,000	80,231,864,000	83,908,342,000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	19,527,155,944	21,242,581,454	22,958,006,964	24,673,432,474	26,388,857,984
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	7,211,295,944	7,674,787,858	8,138,279,773	8,601,771,687	9,065,263,602
Dana Penyesuaian Otonomi Daerah	12,315,860,000	13,235,866,037	14,155,872,075	15,075,878,112	15,995,884,149
Dana Bantuan Dari Propinsi		331,927,558	663,855,116	995,782,675	1,327,710,233
BELANJA	480,832,098,699.98				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	236,622,956,175				
Belanja Pegawai	222,672,353,197				
Bantuan Hibah	6,270,625,000				
Bantuan Sosial	3,050,000,000				
Bantuan Keuangan	4,129,977,978				
Belanja Subsidi					
Dana Tidak Terduga	500,000,000				
BELANJA LANGSUNG	244,209,142,525				
Belanja Pegawai	28,395,000,000				
Belanja Barang Jasa/	121,180,327,947				
Belanja Modal (sharing)	94,633,814,578				
SURPLUS/DEFISIT	(500,000,000)				
PEMBIAYAAN DAERAH	500,000,000				
Penerimaan Pembiayaan	2,000,000,000				
- Penerimaan Pinjaman Daerah					

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILP)	2,000,000,000				
Pengeluaran Pembiayaan	1,500,000,000				
Penyertaan modal pemerintah daerah	1,500,000,000				
- Penyertaan Modal PDKS					
- Penyertaan Modal PT BPD Aceh	1,000,000,000				
- PDAM	500,000,000				
PEMBIAYAAN NETTO					
SILPA					

catatan

Pada Pendapatan Asli Daerah tambahan pendapatan berupa zakat/hibah tidak dimasukkan

TAHUN	PENDAPATAN DAERAH
2013	480,332,098,700
2014	547,746,972,890
2015	624,623,561,744
2016	712,289,822,118
2017	812,260,090,345

Tabel 3.11 Penutup Defisit Rill Anggaran

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	283.269,411,572.00	294,277,360,000.00	352,492,460,031.00	320,204,409,871.00	404,487,572,462.00	14,070,691,710.00
	Dikurangi realisasi:	132,494,988,437.00	112,753,585,777.00	190,371,864,082.22	167,911,299,494.68	170,082,651,557.47	15,678,691,000.00
2.	Belanja Daerah	255,117,408,600.00	287,204,747,400.00	299,471,504,160.00	217,701,818,697.98	288,375,178,139.93	411,572,817,649.00
3.	Pengeluaran Pembayaan Daerah	20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	6,034,519,000.00	27,000,000,000.00
A	Defisit rill	(83,562,558,109.00)	(88,980,973,177.00)	(125,053,791,695.22)	(60,109,608,321.66)	(47,935,738,235.40)	(4,895,826,597.00)
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	56,350,823,822.00	44,533,425,871.00	49,518,800,677.00	(11,584,708,141.54)	(17,379,743,144.16)	
5	Percatran Dana Cadangan	0.00	1,982,074,997.00	1,076,191,245.10	2,060,366,291.71	1,443,700,016.00	
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	4,522,384,844.00	1,200,000,000.00	2,246,709,829.23	1,662,621,609.03	
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	4,324,503,776.00	5,476,601,254.00	5,319,929,131.00	5,543,824,701.00	
8	Penerimaan Kembali Pembehan Pinjaman Daerah	0.00	308,064,000.00	3,819,150,000.00	450,000,000.00	38,307,288,240.00	
9	Penerimaan Piktang Daerah	6,422,939,208.00	1,535,453,202.00	10,000,000,000.00	3,207,724,200.00	1,957,267,080.00	
B	Total Realisasi Penerimaan Pembayaan Daerah	62,773,757,030.00	57,205,906,690.00	71,090,743,176.10	1,700,021,310.40	31,534,958,501.87	
A-B	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran tahun berkenaan	(20,788,801,079.00)	(31,775,066,487.00)	(53,963,048,519.12)	(58,409,587,011.26)	(16,400,779,733.53)	

Tabul 3.11 Realisasi dan lebih perhitungan anggaran

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Berkas SILPA	28.377.800,403,79	49.518.800,877,00	(11.594.708,141,54)	(17.379.743,144,16)	(33,34)	20.176.248,350,65
		Rp	Rp	Rp	Rp	% dari SILPA	Rp
		% dari SILPA	% dari SILPA	% dari SILPA	% dari SILPA	% dari SILPA	% dari SILPA
2.	Pembiayaan pemerintahan PAD	4.500.000,000,00	6.957.300,000,00	83,35	14.068.000,000,00	63,77	10.068.000,000,00
		88,08	(1,11)	83,35	63,77	50,19	45,82
3.	Pembiayaan pemerintahan dengan pertambangan	272.051,000,000,00	287.310,060,000,00	301.518,193,422,00	288.911,343,398,00	339,851,467,256,00	339,851,467,256,00
		47,14	42,51	54,29	54,29	47,88	47,88
4.	Pembiayaan pemerintahan lain-lain pertambangan daerah yang sah	6.718,411,572,00	4,40	20.874,266,604,00	17.225,066,473,00	55.568,105,206,00	17,56
		4,40	(100,00)	8,00	8,00	55,568,105,206,00	17,56
5.	Sisa pembiayaan belanja atau ekuitas kembali lainnya	-	-	-	-	-	-
6.	Sisa pembiayaan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum	-	-	-	-	-	-
7.	Kelebihan (kurang)	-	-	-	-	-	-

2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012

Tabel Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan daerah

No.	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Pendapatan						
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3.	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran						
	Total penerimaan						
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama						
	Kapasitas rill kemampuan keuangan						

Tabel Rencana penggunaan kapasitas rill kemampuan keuangan daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
I	Kapasitas rill kemampuan keuangan						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung						
II.b	Pembentukan dana cadangan						
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama						
ii	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)						
	Sisa kapasitas rill kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung						
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)						
	Surplus anggaran rill atau Berimbang (I-II-III)*						

Tabel 3.14 Estimasi Penerimaan Kabupaten Simeulue, 2013-2017

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH						
Pendapatan Asli Daerah						
Hasil Pajak Daerah						
Hasil Retribusi Daerah						
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan						
Dana Perimbangan						
Baql Hasil Pajak						
Baql Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam						
Dana Alokasi Umum						
Dana Alokasi Khusus						
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah						
Dana Baql Hasil Pajak Dari Propinsi						
Dana Penyesuaian Otonomi Daerah						
Dana Bantuan Dari Propinsi						
JUMLAH PENDAPATAN						

Tabel 3.11 Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran

No.	Uraian	2007		2008		2009		2010		2011	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah SILPA	28,377,800,404	(101)	49,518,800,677	9.76	(11,584,708,142)	(327.45)	(17,379,743,144)	(33.34)	20,176,248,351	13.86
2.	Pelampauan penerimaan PAD	4,500,000,000	88	6,967,300,000	(1.11)	30,000,000,000	83.35	14,068,000,000	63.77	10,068,000,000	50.19
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	272,051,000,000	47	287,310,060,000	42.51	301,518,193,427	54.29	288,911,343,398	52.16	338,851,467,256	45.82
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	6,718,411,572	4	-	(100.00)	20,974,266,604	8.00	17,225,066,473	47.88	55,568,105,206	17.56
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2007 Rata-rata per tahun sebesar 3,23%

2008 Rata-rata per tahun sebesar (4,07%)

2009 Rata-rata per tahun sebesar (15,15%)

2010 Rata-rata per tahun sebesar 10,87%

2011 Rata-rata per tahun sebesar 10,62%

2012 Rata-rata per tahun sebesar

Tabel Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan daerah

No.	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Pendapatan						
2.	Pencaliran dana cadangan (sesuai Perda)						
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran						
	Total penerimaan						
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama						
	Kapasitas riil kemampuan keuangan						

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	283,269,411,572.00	294,277,360,000.00	352,492,460,031.00	320,204,409,871.00	404,487,572,462.00	14,070,691,710.00
	Dikurangi realisasi:	132,494,988,437.00	112,753,585,777.00	190,371,864,082.22	167,911,299,494.68	170,082,651,557.47	15,678,691,000.00
2.	Belanja Daerah	255,117,408,600.00	287,204,747,400.00	299,471,504,160.00	217,701,818,697.98	288,375,178,139.93	411,572,817,649.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	6,034,519,000.00	27,000,000,000.00
	Defisit riil	(83,562,558,109.00)	(88,980,973,177.00)	(125,053,791,695.22)	(60,109,608,321.66)	(47,935,738,235.40)	(4,895,826,597.00)

2007 Defisit sebesar (Rp 83.562.558.109,00) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 56.350.823.822,00, jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 27.211.734.287,00)

2008 Defisit sebesar (Rp 88.980.973.177,00) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 44.533.425.871,00 jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 44.447.547.306,00)

2009 Defisit sebesar (Rp 125.053.791.695,22) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 49.518.800.677,00 jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 75.534.991.018,22)

2010 Defisit sebesar (Rp 60.109.608.321,66) belum ditambahkan SIKPA sebesar (Rp. 11.584.708.141,54) jika ditambahkan maka defisit bertambah menjadi (Rp 71.694.316.463,20)

2011 Defisit sebesar (Rp 47.935.738.235,40) belum ditambahkan SIKPA sebesar (Rp. 17.379.743.144,16) jika ditambahkan maka defisit bertambah menjadi (Rp 65.315.481.379,56)

2012 Defisit sebesar (Rp 4.895.826.597,00) belum ditambahkan SILPA sebesar (Rp. 5.932.061.641,00) jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 1.036.235.044,00)

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(Rp) (a)	(Rp) (b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2007	53,704,248,364.00	145,721,299,680.00	36.85
2	Tahun anggaran 2008	71,750,045,560.00	155,549,904,759.00	46.13
3	Tahun anggaran 2009	80,025,389,187.00	165,526,097,586.00	48.35
4	Tahun anggaran 2010	78,846,240,595.98	105,276,843,245.00	74.89
5	Tahun anggaran 2011	91,169,870,662.11	130,851,655,950.91	69.67
6	Tahun anggaran 2012	-	-	-

No	Uralan	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						(%)
A	Belanja Tidak Langsung	41,565,576,386.00	52,266,702,449.00	49,745,864,612.00	58,827,599,696.98	67,484,492,505.11		25.75	(4.82)	18.26	14.72	13.47
1	Belanja Caji dan Tunjangan	29,502,037,686.00	32,737,107,134.00	38,505,320,778.00	48,560,521,718.00	60,344,699,957.00		10.97	17.62	26.11	24.27	19.74
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	506,000,000.00	560,835,000.00	593,000,000.00	271,000,000.00	242,300,000.00		10.84	5.74	(54.30)	(10.59)	(12.08)
3	Belanja Bunga	0.00	43,793,950.00	(49,556,166.00)	1,020,499,123.98	237,744,908.11			(213.16)	(2,159.28)	(76.70)	(816.38)
4	Belanja bantuan Sosial	9,703,988,700.00	18,893,466,365.00	3,532,100,000.00	2,398,211,854.00	1,584,317,640.00		94.70	(81.31)	(32.10)	(33.94)	(13.16)
5	Belanja bantuan keuangan	1,823,550,000.00	0.00	6,900,000,000.00	6,370,625,000.00	5,027,000,000.00		(100.00)		(7.67)	(21.09)	(42.92)
6	Belanja Tak terduga	30,000,000.00	31,500,000.00	265,000,000.00	206,742,000.00	48,430,000.00		5.00	741.27	(21.98)	(76.57)	161.93
B	Belanja Langsung	10,067,722,821.00	9,364,990,815.00	10,142,732,622.00	6,712,689,766.00	7,630,538,800.00		(6.98)	8.30	(33.82)	13.67	(4.70)
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7,876,277,500.00	7,444,508,000.00	8,124,782,000.00	4,551,237,500.00	5,794,439,850.00		(5.48)	9.14	(43.98)	27.32	(3.25)
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	1,600,649,571.00	1,375,674,131.00	1,577,962,485.00	1,701,167,266.00	1,716,063,950.00		(14.06)	14.70	7.81	0.88	2.33
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	311,320,750.00	494,833,684.00	330,788,137.00	361,290,000.00	90,850,000.00		58.95	(33.15)	9.22	(74.85)	(9.96)
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	279,475,000.00	49,975,000.00	109,200,000.00	98,995,000.00	29,185,000.00		(82.12)	118.51	(9.35)	(70.52)	(10.87)
C	Pembiayaan Pengeluaran	20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	1,159,519,000.00		(19.64)	(26.36)	(56.91)	(78.12)	(45.26)
1	Pembentukan Dana Cadangan											
	Penyertaan modal investasi	20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	1,159,519,000.00		(19.64)	(26.36)	(56.91)	(78.12)	(45.26)
2	Pembayaran pokok utang	0.00	0.00	0.00	0.00							
	Dst...											
	TOTAL (A+B+C)	72,413,728,583.00	78,331,693,264.00	72,185,713,750.00	70,839,389,461.98	76,274,550,305.11		8.17	(7.85)	(1.87)	7.67	1.53

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung	41,565,576,386	52,266,702,449	49,745,864,612	58,827,599,696	67,484,492,505	13.47
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	29,502,037,686	32,737,107,134	38,505,320,778	48,560,521,718	60,344,699,957	19.74
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDHWKDH	506,000,000	560,835,000	593,000,000	271,000,000	242,300,000	-12.08
3	Belanja Bunga	-	43,793,950	(49,556,166)	1,020,499,124	237,744,908	-816.38
4	Belanja bantuan Sosial	9,703,988,700	18,893,466,365	3,532,100,000	2,398,211,854	1,584,317,640	-13.16
5	Belanja bantuan keuangan	1,823,550,000	-	6,900,000,000	6,370,625,000	5,027,000,000	-42.92
6	Belanja Tak terduga	30,000,000	31,500,000	265,000,000	206,742,000	48,430,000	161.93
B	Belanja Langsung	10,067,722,821	9,364,990,815	10,142,732,622	6,712,689,766	7,630,538,800	-4.70
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7,876,277,500	7,444,508,000	8,124,782,000	4,551,237,500	5,794,439,850	-3.25
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	1,600,649,571	1,375,674,131	1,577,962,485	1,701,167,266	1,716,063,950	2.33
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	311,320,750	494,833,684	330,788,137	361,290,000	90,850,000	-9.96
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	279,475,000	49,975,000	109,200,000	98,995,000	29,185,000	-10.87
C	Pembiayaan Pengeluaran	20,780,427,356	16,700,000,000	12,297,116,516	5,299,100,000	1,159,519,000	-45.26
1	Pembentukan Dana Cadangan						
	Penyertaan modal investasi	20,780,427,356	16,700,000,000	12,297,116,516	5,299,100,000	1,159,519,000	-45.26
2	Pembayaranpokokutang	-	-	-	-	-	-
	Dst...						
	TOTAL (A+B+C)	72,413,726,563	78,331,693,264	72,185,713,750	70,839,389,462	76,274,550,305	1.53

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Aktiva Lancar	28,377,800,404	49,518,800,677	(11,584,708,142)	(17,039,068,144)	28,383,912,591
	Kewajiban jangka pendek	150,000,000			13,000,000,000	1,995,000
	Rasio Lancar (current Ratio)	189			(1)	14,228
2	Aktiva Lancar	28,377,800,404	49,518,800,677	(11,584,708,142)	(17,039,068,144)	28,383,912,591
	Persediaan	-	1,982,074,997	1,076,191,245	2,060,366,292	1,443,700,016
	Kewajiban jangka pendek	150,000,000	-	-	13,000,000,000	1,995,000
	Rasio Quick (quick ratio)	189			(1)	13,504
3	Total Hutang	150,000,000	-	-	13,000,000,000	1,995,000
	Total Aset	584,566,092,917	562,272,212,683	847,511,438,883	911,803,023,199	1,030,864,854,738
	Rasio Hutang terhadap total aset	0	-	-	0	0
4	Total Hutang	150,000,000	-	-	13,000,000,000	1,995,000
	Total Ekuitas	584,416,092,917	562,272,212,683	847,511,438,883	898,462,348,199	1,022,655,195,498
	Rasio Hutang terhadap ekuitas	0	-	-	0	0

Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA											
EKUITAS DANA LANCAR											
Sisa Lebih Pembayaan Anggaran (SILPA)	28,377,800,404	49,518,800,677	(11,584,708,142)	(17,379,743,144)	20,178,248,351	74	(123)	50	(216)	(53.74)	
Cadangan Piutang	-	24,001,069	-	-	1,740,000	-	(100)	-	-	(100.00)	
Cadangan Persediaan	-	1,982,074,997	1,076,191,245	2,060,366,292	1,443,700,016	-	(46)	91	(30)	5.27	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -											
Utang Jangka Pendek	(150,000,000)	-	-	(13,000,000,000)	(1,995,000)	(100)	-	-	-	(100.00)	
Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EKUITAS DANA INVESTASI											
Dimvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	137,065,000,000	182,568,821,570	208,360,491,570	226,860,491,570	193,505,479,892	33	14	9	(15)	10.38	
Dimvestasikan dalam Aset Tetap	409,339,818,996	326,240,514,370	649,659,464,209	699,921,233,481	804,870,696,995	(20)	99	8	15	25.39	
Dimvestasikan dalam Aset Lainnya	9,783,473,517	1,940,000,000	-	-	2,659,326,244	(80)	(100)	-	-	(90.09)	
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -											
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EKUITAS DANA CADANGAN											
Dimvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	584,416,092,917	582,272,212,683	847,511,438,883	898,462,948,199	1,022,555,195,498	(4)	51	6	14	16.69	

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata2 Pertumbuhan %
1	2	3	4	5	6	7
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	536,587,525	7,044,445,464	4,996,015,433	5,096,396,046	5,014,838,075	296.04
Kas di Kas Daerah	-	-	-	-	-	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	0.00
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0.00
Piutang						
Piutang Pajak	5,880,000	601,276,499	223,744,622	474,315,659	993,782,406	2571.13
Piutang Retribusi	305,051,430	262,534,640	642,394,470	1,136,090,664	604,386,229	40.20
Piutang Dana Bagi Hasil	30,809,814,402	25,557,375,781	18,612,208,262	23,361,875,999	25,170,817,809	-2.74
Piutang Dana Alokasi Umum	76,972,088,000	102,776,932,000	87,427,521,000	91,172,335,000	108,391,085,000	10.44
Piutang Dana Alokasi Khusus	36,033,000,000	36,827,000,000	31,789,100,000	23,684,850,000	50,019,800,000	18.55
Piutang Lainnya	6,422,933,208	9,318,020,978	19,295,751,254	8,977,653,331	45,808,380,021	127.23
	150,548,767,040	175,343,139,898	157,990,719,608	148,807,120,653	230,988,251,465	14.00
Persediaan	225,656,095	1,658,249,481	2,929,876,341	1,239,279,894	791,032,244	154.42
	150,774,423,135	177,001,389,379	160,920,595,949	150,046,400,547	231,779,283,709	14.01
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	0.00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	0.00
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
Investasi Dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20,780,427,356	16,700,000,000	12,297,116,516	5,299,100,000	1,159,519,000	-45.26
Penyertaan Modal Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	0.00
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	-	0.00
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
ASET TETAP						
Tanah	49,731,219,974	51,174,002,966	62,077,343,100	66,547,748,546	74,717,386,403	10.92
Peralatan dan Mesin	75,837,687,606	68,308,896,678	144,280,950,508	158,698,455,759	171,312,327,779	29.81
Gedung dan Bangunan	134,981,825,586	125,245,879,514	296,822,478,394	309,441,994,448	311,739,256,067	33.69
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143,717,317,000	70,588,880,442	140,727,261,301	150,419,589,493	227,141,002,371	26.59
Aset Tetap Lainnya	5,071,768,830	4,190,512,400	5,285,430,961	9,130,851,962	11,059,006,961	25.66
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6,732,342,370	466,000,000	5,682,593,274	8,901,716,414	361.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	0.00
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0.00

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata2 Pertumbuhan %
1	2	3	4	5	6	7
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0.00
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	0.00
Aset Lain-lain	9,783,473,517	1,940,000,000	-	-	2,659,326,244	-90.09
JUMLAH ASET						
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0.00
Utang Bunga	-	-	-	-	-	0.00
Utang Pajak	-	-	-	-	-	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	13,000,000,000	-	-100.00
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	150,000,000	-	-	-	1,995,000	-100.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0.00
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	28,377,800,404	49,518,800,677	(11,584,708,142)	(17,379,743,144)	20,176,248,351	-53.74
Cadangan Piutang	-	24,001,069	-	-	1,740,000	-100.00
Cadangan Persediaan	-	1,982,074,997	1,076,191,245	2,060,366,292	1,443,700,016	5.27
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -						
Utang Jangka Pendek	(150,000,000)	-	-	(13,000,000,000)	(1,995,000)	-100.00
Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	0.00
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	137,065,000,000	182,566,821,570	208,360,491,570	226,860,491,570	193,505,479,892	10.38
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	409,339,818,996	326,240,514,370	649,659,464,209	699,921,233,481	804,870,695,995	25.39
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9,783,473,517	1,940,000,000	-	-	2,659,326,244	-90.09
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -						
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0.00
EKUITAS DANA CADANGAN						
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	584,416,092,917	562,272,212,683	847,511,438,883	898,462,348,199	1,022,655,195,498	16.69

Tabel 3.1 Pertumbuhan APBK Kabupaten Simeulue, 2007-2012

KODE	URAIAN	REALISASI (RP)						PERTUMBUHAN (%)				RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	(%)
1	PENDAPATAN							18.29	(10.69)	(8.04)	56.58	14.04
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	536,587,525	7,044,445,464	4,996,015,433	5,096,396,046		15,678,691,000		(29.08)	2.01	(20.50)	(15.86)
1.1.1.	Pajak daerah	5,880,000	601,276,499	223,744,622	474,315,659	993,782,406	2,145,000,000		(62.79)	111.99	109.52	52.91
1.1.2.	Retribusi daerah	305,051,430	262,534,640	642,394,470	1,136,090,664	604,386,229	9,095,500,000		144.69	76.85	(46.80)	58.25
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-	4,522,384,844	1,200,000,000	2,246,709,829	1,662,621,609	2,280,000,000		(73.47)	87.23	(26.00)	(4.08)
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	225,656,095	1,658,249,481	2,929,876,341	1,239,279,894	791,032,244	2,158,191,000		76.68	(57.70)	(36.17)	(5.73)
1.2.	Dana Perimbangan	143,814,902,402	165,161,307,781	137,828,829,262	138,219,060,999	183,581,702,809	380,915,119,756	14.84	(16.55)	0.28	32.82	7.85
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	30,809,814,402	25,557,375,781	18,612,208,262	23,361,875,999	25,170,817,809	28,881,133,756	(17.05)	(27.17)	25.52	7.74	(2.74)
1.2.2.	Dana alokasi umum	76,972,088,000	102,776,932,000	87,427,521,000	91,172,335,000	108,391,085,000	309,799,056,000	33.52	(14.93)	4.28	18.89	10.44
1.2.3.	Dana alokasi khusus	36,033,000,000	36,827,000,000	31,789,100,000	23,684,850,000	50,019,800,000	42,234,930,000	2.20	(13.68)	(25.49)	111.19	18.55
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		9,318,020,978	19,295,751,254		45,808,380,021		2.30	107.08	(70.10)	693.92	183.30
1.3.1.	Hibah	2,686,000,000	3,150,000,000	0	-	0	0	17.27				
1.3.2.	Dana darurat		0	0	-	0	0					
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ****)		4,324,503,776	5,476,601,254	5,319,929,131	5,543,824,701	7,211,295,944		26.64	(2.86)	4.21	9.33
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)		308,064,000	3,819,150,000	450,000,000	38,307,288,240	12,315,860,000					
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6,422,933,208	1,535,453,202	10,000,000,000	-	1,957,267,080	0	(76.09)	551.27	(100.00)		125.06
	BELANJA	178,645,120,688	210,599,950,319	233,254,370,257	178,823,983,841	215,938,577,613	411,572,817,649	17.89	10.76	(23.34)	20.75	6.52
A	Belanja Tidak Langsung	53,704,248,364	71,750,045,560	80,025,389,187	78,846,240,596	91,121,440,662	216,707,869,602	33.60	11.53	(1.47)	15.57	14.81
1	Belanja Pegawai	39,437,149,664	50,644,285,245	57,306,326,253	62,831,438,618	75,419,628,457	193,217,673,925	28.42	13.15	9.64	20.03	17.81
2	Belanja Bunga	-	43,793,950	-49,556,166	1,020,499,124	237,744,908	16,674,744,711					
3	Belanja Subsidi	23,560,000	0	0	0	0	2,420,000,000					
4	Belanja Hibah	2,686,000,000	2,137,000,000	12,071,519,100	6,018,724,000	8,852,749,657	3,895,450,966	(20.44)	464.88	(50.14)	47.09	110.35
5	Belanja Bantuan Sosial	9,703,988,700	18,893,466,365	3,532,100,000	2,398,211,854	1,584,317,640	0	94.70	(81.31)	(32.10)	(33.94)	(13.16)
6	Belanja Bagi Hasil	-	0	0	-	0	500,000,000					
7	Belanja Bantuan Keuangan	1,823,550,000	0	6,900,000,000	6,370,625,000	5,027,000,000	0					
8	Belanja Tidak Terduga	30,000,000	31,500,000	265,000,000	206,742,000		0	5.00	741.27	(21.98)	(100.00)	156.07

B	Belanja Langsung	124,940,872,324	138,849,904,759	153,228,981,070	99,977,743,245	124,817,136,951	194,864,948,047	11.13	10.36	(34.75)	24.84	2.90
1	Belanja Pegawai	19,382,519,810	16,282,261,500	25,012,744,975	20,792,817,200	18,131,963,575	28,377,600,000	(16.00)	53.62	(16.87)	(12.80)	1.99
2	Belanja Barang dan Jasa	29,086,064,602	45,962,846,178	61,999,102,192	40,307,091,188	34,297,002,849	117,494,829,247	58.02	34.89	(34.99)	(14.91)	10.75
3	Belanja Modal	76,472,287,912	76,604,797,081	66,217,133,903	38,877,834,857	72,388,170,527	48,992,518,800	0.17	(13.56)	(41.29)	86.19	7.88
	Surplus / (Defisit)	(25,184,697,553)	(29,076,176,096)	(71,133,774,308)	(29,738,597,665)	17,503,327,705	4,548,149,051	15.45	144.65	(58.19)	(158.86)	(14.24)
	PEMBIAYAAN DAERAH	35,570,396,466	27,833,425,871	37,221,684,161	(15,383,808,142)	(23,414,262,144)	1,383,912,590	(21.75)	33.73	(141.33)	52.20	(19.29)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	56,350,823,822	44,533,425,871	49,518,800,677	(10,084,708,142)	-17,379,743,144	28,383,912,590	(20.97)	11.19	(120.37)	72.34	(14.45)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,780,427,356	16,700,000,000	12,297,116,516	5,299,100,000	6,034,519,000	27,000,000,000	(19.64)	(26.36)	(56.91)	13.88	(22.26)
	PEMBIAYAAN NETTO	(60,755,094,019)	(56,909,601,967)	(108,355,458,469)	(14,354,789,523)	40,917,589,849	3,164,236,461	(6.33)	90.40	(86.75)	(385.04)	(96.93)
SILPA/ SIKPA		(85,939,791,572)	(85,985,778,063)	(179,489,232,777)	(44,093,387,188)	58,420,917,553	7,712,385,512	0.05	108.74	(75.43)	(232.49)	(49.78)

KODE	URAIAN	REALISASI (RP)						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1	PENDAPATAN							14,04
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	536.587.525	7.044.445.464	4.996.015.433	5.096.396.046		15.678.691.000	-15,86
1.1.1.	Pajak daerah	5.880.000	601.276.499	223.744.622	474.315.659	993.782.406	2.145.000.000	52,91
1.1.2.	Retribusi daerah	305.051.430	262.534.640	642.394.470	1.136.090.664	604.386.229	9.095.500.000	58,25
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-	4.522.384.844	1.200.000.000	2.246.709.829	1.662.621.609	2.280.000.000	-4,08
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	225.656.095	1.658.249.481	2.929.876.341	1.239.279.894	791.032.244	2.158.191.000	-5,73
1.2.	Dana Perimbangan	143.814.902.402	165.161.307.781	137.828.829.262	138.219.060.999	183.581.702.809	380.915.119.756	7,85
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	30.809.814.402	25.557.375.781	18.612.208.262	23.361.875.989	25.170.817.809	28.881.133.756	-2,74
1.2.2.	Dana alokasi umum	76.972.088.000	102.776.932.000	87.427.521.000	91.172.335.000	108.391.085.000	309.799.056.000	10,44
1.2.3.	Dana alokasi khusus	36.033.000.000	36.827.000.000	31.789.100.000	23.684.850.000	50.019.800.000	42.234.930.000	18,55
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		9.318.020.978	19.295.751.254		45.808.380.021		183,30
1.3.1	Hibah	2.686.000.000	3.150.000.000	0	-	0	0	
1.3.2	Dana darurat		0	0	-	0	0	
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)		4.324.503.776	5.476.601.254	5.319.929.131	5.543.824.701	7.211.295.944	9,33
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)		308.064.000	3.819.150.000	450.000.000	38.307.288.240	12.315.860.000	
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.422.933.208	1.535.453.202	10.000.000.000	-	1.957.267.080	0	125,06
	BELANJA	178.645.120.688	210.599.950.319	233.254.370.257	178.823.983.841	215.938.577.613	411.572.817.649	6,52
A	Belanja Tidak Langsung	53.704.248.364	71.750.045.560	80.025.389.187	78.846.240.596	91.121.440.662	216.707.869.602	14,81
1	Belanja Pegawai	39.437.149.664	50.644.285.245	57.306.326.253	62.831.438.618	75.419.628.457	193.217.673.925	17,81
2	Belanja Bunga	-	43.793.950	-49.556.166	1.020.499.124	237.744.908	16.674.744.711	
3	Belanja Subsidi	23.560.000	0	0	-	0	2.420.000.000	
4	Belanja Hibah	2.686.000.000	2.137.000.000	12.071.519.100	6.018.724.000	8.852.749.657	3.895.450.966	110,35
5	Belanja Bantuan Sosial	9.703.988.700	18.893.466.365	3.532.100.000	2.398.211.854	1.584.317.640	0	-13,16
6	Belanja Bagi Hasil	-	0	0	-	0	500.000.000	
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.823.550.000	0	6.900.000.000	6.370.625.000	5.027.000.000	0	
8	Belanja Tidak Terduga	30.000.000	31.500.000	265.000.000	206.742.000		0	156,07
B	Belanja Langsung	124.940.872.324	138.849.904.759	153.228.981.070	99.977.743.245	124.817.136.951	194.864.948.047	2,90
1	Belanja Pegawai	19.382.519.810	16.282.261.500	25.012.744.975	20.792.817.200	18.131.963.575	28.377.600.000	1,99
2	Belanja Barang dan Jasa	29.086.064.602	45.962.846.178	61.999.102.192	40.307.091.188	34.297.002.849	117.494.829.247	10,75
3	Belanja Modal	76.472.287.912	76.604.797.081	66.217.133.903	38.877.834.857	72.388.170.527	48.992.518.800	7,88
	Surplus / (Defisit)	(25.184.697.553)	(29.076.176.096)	(71.133.774.308)	(29.738.597.665)	17.503.327.705	4.548.149.051	-14,24
	PEMBIAYAAN DAERAH	35.570.396.466	27.833.425.871	37.221.684.161	(15.383.808.142)	(23.414.262.144)	1.383.912.590	-19,29
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	56.350.823.822	44.533.425.871	49.518.800.677	(10.084.708.142)	-17.379.743.144	28.383.912.590	-14,45
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.780.427.356	16.700.000.000	12.297.116.516	5.299.100.000	6.034.519.000	27.000.000.000	-22,26
	PEMBIAYAAN NETTO	(60.755.094.019)	(56.909.601.967)	(108.356.458.469)	(14.354.789.523)	40.917.589.849	3.164.236.461	-96,93
SILPA/ SIKPA		(85.939.791.572)	(85.985.778.063)	(179.489.232.777)	(44.093.387.188)	58.420.917.553	7.712.385.512	-49,78

KODE	URAIAN	REALISASI (RP)						RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	(%)
	BELANJA	178.645.120.688	210.599.950.319	233.254.370.257	178.823.983.841	215.938.577.613	411.572.817.649	6,52
A	Belanja Tidak Langsung	53.704.248.364	71.750.045.560	80.025.389.187	78.846.240.596	91.121.440.662	216.707.869.602	14,81
1	Belanja Pegawai	39.437.149.664	50.644.285.245	57.306.326.253	62.831.438.618	75.419.628.457	193.217.673.925	17,81
2	Belanja Bunga	-	43.793.950	-49.556.166	1.020.499.124	237.744.908	16.674.744.711	
3	Belanja Subsidi	23.560.000	0	0	-	0	2.420.000.000	
4	Belanja Hibah	2.686.000.000	2.137.000.000	12.071.519.100	6.018.724.000	8.852.749.657	3.895.450.966	110,35
5	Belanja Bantuan Sosial	9.703.988.700	18.893.466.385	3.532.100.000	2.398.211.854	1.584.317.640	0	-13,16
6	Belanja Bagi Hasil	-	0	0	-	0	500.000.000	
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.823.550.000	0	6.900.000.000	6.370.625.000	5.027.000.000	0	
8	Belanja Tidak Terduga	30.000.000	31.500.000	265.000.000	206.742.000	-	0	156,07
B	Belanja Langsung	124.940.872.324	138.849.904.759	153.228.981.070	99.977.743.245	124.817.136.951	194.864.948.047	2,90
1	Belanja Pegawai	19.382.519.810	16.282.261.500	25.012.744.975	20.792.817.200	18.131.963.575	28.377.600.000	1,99
2	Belanja Barang dan Jasa	29.086.064.602	45.962.846.178	61.999.102.192	40.307.091.188	34.297.002.849	117.494.829.247	10,75
3	Belanja Modal	76.472.287.912	76.604.797.081	66.217.133.903	38.877.834.857	72.388.170.527	48.992.518.800	7,88

Tabel 3.1 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Simeulue, 2007-2012

KODE	URAIAN	TAHUN 2007			TAHUN 2008			TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TARGET TAHUN 2012		
		PAUANGGARAN	REALISASI	(%)	PAUANGGARAN	REALISASI	(%)	PAUANGGARAN	REALISASI	(%)	PAUANGGARAN	REALISASI	(%)	PAUANGGARAN	REALISASI	(%)	PAUANGGARAN	REALISASI	(%)
1	PENDAPATAN	293,269,411,572	150,774,422,133		294,277,360,000	181,323,774,223		332,492,460,011	162,120,393,949		320,204,409,871	152,293,110,376		404,467,572,462	234,404,920,903		410,404,771,630	416,120,966,700	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	4,500,000,000	336,347,323	11.92	6,967,300,000	7,044,443,464	101.11	30,000,000,000	4,996,013,433	16.65	14,068,000,000	5,096,396,046	36.23	10,060,000,000	5,014,830,073	49.81	14,070,691,210	15,678,691,000	111.43
1.1.1.	Pajak daerah	367,749,000	3,880,000	1.52	6,285,300,000	601,276,499	79.90	6,285,300,000	223,744,622	3.56	1,041,000,000	474,215,659	45.56	1,943,342,000	993,702,406	51.14	2,267,341,200	2,143,000,000	94.60
1.1.2.	Retribusi daerah	1,003,098,929	303,051,430	30.47	1,011,248,000	263,534,640	25.92	3,963,000,000	642,394,470	16.12	2,912,000,000	1,136,099,664	39.01	2,271,000,000	604,386,229	26.61	3,534,991,710	7,393,500,000	208.04
1.1.3.	Hasil pengelolaan kasungun daerah yang dipfikan	-	-	-	3,730,000,000	4,522,384,044	120.69	13,106,500,000	1,200,000,000	9.16	3,000,000,000	2,246,279,623	74.89	2,269,000,000	1,664,621,695	72.92	2,200,000,000	2,200,000,000	100.00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	3,111,132,011	223,656,093	7.25	1,451,932,000	1,638,249,481	114.21	6,620,000,000	2,929,876,341	44.26	7,115,000,000	1,239,279,894	17.42	109,754,993	791,032,244	90.93	3,268,430,000	2,138,010,000	66.03
1.1.5.	Zakat	-	-	-	0	0	0.00	0	0	0.00	-	-	0.00	2,703,903,007	963,013,587	35.62	2,700,000,000	1,700,000,000	62.96
1.2.	Dana Pembiayaan	273,051,000,000	143,814,902,402	52.66	287,310,060,000	163,161,307,781	57.49	301,318,193,427	137,628,282,262	45.71	268,911,343,398	138,219,060,999	47.84	338,831,467,236	183,561,702,899	54.18	380,915,119,736	380,915,119,736	100.00
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak	12,560,000,000	4,933,021,068	39.28	17,733,740,000	14,532,836,363	82.00	46,279,137,427	18,612,208,262	40.22	36,263,239,398	23,361,873,999	64.42	28,683,570,256	23,170,817,000	80.79	26,881,133,736	28,881,133,736	100.00
1.2.2.	Dana bagi hasil bukan pajak	30,860,000,000	27,277,893,928	88.36	11,412,460,000	19,775,811,211	173.28	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.2.3.	Dana alokasi umum	184,730,000,000	194,733,000,000	100.00	203,533,860,000	203,533,860,000	100.00	200,828,036,000	87,427,521,000	41.67	218,813,604,000	91,172,333,000	41.67	260,138,597,000	108,291,083,000	41.67	309,799,035,000	309,799,035,000	100.00
1.2.4.	Dana alokasi khusus	43,959,000,000	43,959,000,000	100.00	52,610,000,000	52,610,000,000	100.00	45,413,000,000	31,789,100,000	70.00	33,835,500,000	23,684,850,000	70.00	50,029,300,000	50,019,000,000	99.98	42,234,930,000	42,234,930,000	100.00
1.2.5.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-	0.00	0	1,887,036,000	100.00	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.2.6.	Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	0.00	0	5,025,997,319	100.00	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,718,411,572	6,422,933,208	95.60	-	9,318,000,878	100.00	20,974,266,604	19,205,751,234	92.00	17,225,064,473	8,977,653,331	52.12	35,668,105,286	45,886,360,021	128.44	15,418,960,194	19,527,155,944	126.64
1.3.1.	Hibah	-	-	0.00	0	3,150,000,000	100.00	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.3.2.	Dana darurat	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	293,478,364	-	0.00	0	4,324,503,776	100.00	3,974,266,604	5,476,661,234	91.67	6,696,068,073	66,639,938	1.00	6,048,227,886	5,543,824,701	91.66	7,211,293,944	7,211,293,944	100.00
1.3.4.	Dana penyusutan dan lainnya khusus****)	-	-	0.00	0	306,064,000	100.00	5,000,000,000	3,819,150,000	76.38	450,000,000	-	0.00	47,562,610,240	38,307,268,240	80.54	8,207,664,240	12,315,860,000	150.03
1.3.5.	Bantuan kasugun dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6,422,933,208	6,422,933,208	100.00	0	1,333,433,202	100.00	10,000,000,000	10,000,000,000	100.00	10,528,998,400	3,207,724,200	30.47	1,957,267,000	1,957,267,000	100.00	0	0	0.00
	BELANJA	289,420,223,294	276,573,414,600	95.63	315,934,493,990	210,399,830,319	66.60	374,710,612,978	233,254,370,237	62.23	327,419,329,229	178,823,803,841	54.61	362,914,823,382	215,987,027,613	59.28	403,503,943,033	411,572,817,649	101.99
A	Belanja Tidak Langsung	99,282,059,306	153,634,484,776	154.75	125,311,454,373	71,730,043,560	57.33	142,570,183,149	80,023,389,187	56.13	169,034,193,143	78,846,240,396	46.63	188,507,933,271	91,169,870,662	48.36	216,542,127,213	216,707,869,602	100.08
1	Belanja Pegawai	75,263,790,308	93,921,094,211	124.79	99,431,696,373	50,644,283,243	50.92	109,690,269,849	57,306,328,253	52.72	139,275,421,813	62,831,438,618	45.11	154,259,379,691	73,419,828,437	48.89	192,732,671,074	193,217,673,923	100.25
2	Belanja Bunga	38,918,564,113	PD/01	0	43,793,950	100.00	0	-9,556,116	(100.00)	1,100,000,000	1,020,499,124	92.73	970,200,000	237,744,368	24.50	15,793,883,173	16,674,244,211	99.29	
3	Belanja Subsidi	1,108,800,000	745,200,000	67.21	390,000,000	0	0.00	0	0.00	0	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	
4	Belanja Hibah	3,525,000,000	2,986,000,000	84.71	2,142,000,000	2,137,000,000	99.77	21,764,988,000	12,071,519,100	55.56	14,512,175,500	6,018,224,000	41.47	15,329,231,000	8,812,494,657	57.52	3,895,450,966	3,895,450,966	100.00
5	Belanja Bantuan Sosial	15,790,660,990	14,376,246,700	91.04	23,042,738,000	18,893,466,363	81.99	3,781,926,300	3,332,400,000	88.13	6,171,621,000	2,390,211,834	38.86	2,389,000,000	1,584,317,540	66.31	200,000,000	0	0.00
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	500,000,000	500,000,000	100.00
7	Belanja Bantuan Keuangan	2,393,800,000	2,392,000,000	99.93	0	0	0.00	6,900,000,000	6,900,000,000	100.00	7,472,975,000	6,370,623,000	85.23	14,099,882,500	3,027,000,000	21.43	0	0	0.00
8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	93,736,750	9.37	125,000,000	31,500,000	25.20	1,423,000,000	265,000,000	18.60	500,000,000	206,742,000	41.35	350,000,000	48,430,000	13.84	0	0	0.00
B	Belanja Langsung	199,838,176,088	124,940,929,824	62.52	190,783,039,617	138,849,304,759	72.78	232,140,427,829	153,228,981,670	66.01	158,397,143,866	99,977,743,243	63.12	173,835,672,311	124,817,136,951	71.88	188,968,817,840	194,864,940,047	103.12
1	Belanja Pegawai	30,680,920,729	19,382,519,810	63.17	26,993,446,831	16,282,261,500	60.32	38,094,694,573	25,012,744,873	65.93	30,937,947,500	20,792,817,200	67.20	31,839,899,216	18,131,963,375	56.95	30,338,973,242	28,377,600,000	93.57
2	Belanja Barang dan Jasa	47,385,505,839	29,086,064,602	61.39	72,337,974,353	45,062,846,178	62.31	97,217,129,669	61,999,102,192	63.45	68,383,430,360	40,387,091,181	59.24	51,235,374,007	34,207,000,849	66.91	67,438,297,033	117,494,829,247	174.17
3	Belanja Modal	121,771,249,330	76,472,287,912	62.80	91,431,118,113	76,604,797,083	83.76	90,328,813,568	66,217,133,803	73.34	53,075,746,026	38,877,834,857	73.03	90,740,389,008	72,380,170,327	79.78	71,069,047,563	48,992,518,800	68.94
	Surplus / (Defisit)	(15,832,811,722)	(127,801,280,865)		(21,657,133,990)	(20,878,178,081)		(22,219,152,946)	(71,133,774,389)		(26,332,829,358)	(65,826,826,992)		(4,885,826,992)	(18,412,913,202)		(4,885,826,992)	(4,885,826,992)	
	PEMBIAYAAN DAERAH	15,830,823,822	15,830,823,822	100.00	21,657,133,990	22,379,423,871	104.05	22,219,152,946	37,221,694,161	167.53	1,415,291,830	(10,915,791,838)	(771.27)	(42,143,946,880)	(23,414,262,144)	(55.56)	(4,893,826,997)	1,383,912,390	(28.27)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	36,330,223,822	36,330,223,822	100.00	43,637,133,990	44,331,423,871	101.61	49,218,152,966	49,116,000,877	100.61	11,500,000,000	11,584,208,142	100.73	-	22,104,173,403	0	28,383,912,390	28,383,912,390	100.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40,500,000,000	40,500,000,000	100.00	22,000,000,000	22,000,000,000	100.00	27,000,000,000	12,297,116,216	45.54	10,084,708,142	22,500,000,000	223.11	23,759,519,000	23,414,262,144	98.35	27,000,000,000	27,000,000,000	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	(31,201,647,844)	(111,850,467,143)		(41,314,267,980)	(51,693,601,967)		(44,936,305,893)	(108,335,436,669)		(8,640,221,214)	(13,619,063,674)		(4,885,826,992)	(18,412,913,202)		(4,885,826,992)	(4,885,826,992)	
SL/PA/ S/OPA		(47,532,471,466)	(239,751,758,108)		(64,971,401,870)	(80,683,778,093)		(66,654,438,840)	(179,639,232,777)		(19,865,130,374)	(42,143,946,880)		(4,885,826,992)	(18,412,913,202)		(4,885,826,992)	(4,885,826,992)	

Sinabang, 26 Februari 2013

Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Simeulue

105,944,719,037

HAILI SYAMSUDDIN, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19590704 199203 1 001

KODE	Uraian	2017		%	TAHUN					
		Anggaran	Realisasi		2012	2013	2014	2015	2016	2017
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
4	PERALOKASIAN	283.230.411,972	370.920,000,000	94,8	324,0	484.183,214,023	374.833,874,383	560.679,120,000	574.828,866,702	621.813,279,640
1.1	Pengalokasian ke Daerah	4.500,000,000	3.621,035,833	80,5	10,0	17.078,691,000	18.440,827,982	18.440,827,982	18.440,827,982	18.440,827,982
1.1.1	Daerah Daerah	307.740,000,000	377.240,000,000	96,5	96,4	2.448,000,000	2.810,716,251	2.810,716,251	2.810,716,251	2.810,716,251
1.1.2	Transfer ke Daerah	1.201,000,000,000	846,079,240,000	70,5	66,2	9.185,500,000	9.185,500,000	9.185,500,000	9.185,500,000	9.185,500,000
1.1.3	Kelembagaan Keuangan Daerah	-	2.339,046,788	52,1	24,0	2.330,000,000	2.411,948,544	2.411,948,544	2.411,948,544	2.411,948,544
1.1.3.1	Kelembagaan Keuangan Daerah	-	648,901,390	15,3	13,9	2.330,000,000	2.411,948,544	2.411,948,544	2.411,948,544	2.411,948,544
1.1.3.2	Kelembagaan Keuangan Daerah	-	1.690,145,398	36,8	10,3	2.330,000,000	2.411,948,544	2.411,948,544	2.411,948,544	2.411,948,544
1.2	Dana Perimbangan	272.051,600,000	280,907,511,974	95,9	11,2	442,797,625,044	482,801,194,900	527,223,951,492	529,375,729,132	576,023,643,270
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	43.940,000,000	52,919,916,946	74,2	11,2	28,613,607,585	28,274,499,440	28,589,265,545	29,064,941,298	30,143,977,377
1.2.2	Dana Alokasi Umum	196.720,000,000	199,720,000,000	100,0	100,0	394,233,337,481	392,541,760,022	425,065,771,148	425,065,771,148	472,362,469,882,42
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	43,939,000,000	43,939,000,000	100,0	47,6	69,000,000,000	70,762,911,438	72,579,064,250	74,232,094,438	76,226,258,811
1.3	Lain-Lain Pendanaan Daerah yang Sah	6.104,111,972	6,422,833,209	95,6	38,9	23,810,937,893	23,963,645,573	24,012,609,619	24,012,609,619	24,059,881,433
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	295,479,364	-	-	45,7	6,507,477,899	6,594,158,573	6,601,149,614	6,601,149,614	6,646,371,494,82
1.3.4	Dana Perimbangan dan Hibah (Khusus Hibah)	-	-	-	10,4	2,416,87	12,315,690,000	12,315,690,000	12,315,690,000	12,315,690,000
1.3.5	Pembayaran Keagenan dan Perantara atau Persepsi Daerah lainnya	6,422,833,209	6,422,833,209	100,0	10,7	18,316	3,095,460,000	3,095,460,000	3,095,460,000	3,095,460,000
2	SELANJUTNYA	296,120,283,794	250,898,854,593	84,5	9,7	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44
2.1	Selanjutnya Tidak Langgung	99,202,029,206	85,332,377,851	86,0	8,7	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17
2.1.1	Selanjutnya Pegawai	75,263,796,399	74,528,574,401	99,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2.1.2	Selanjutnya Buruh	1,100,000,000	1,100,000,000	100,0	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
2.1.3	Selanjutnya Hibah	2,835,000,000	2,835,000,000	100,0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
2.1.4	Selanjutnya Bantuan Sosial	15,790,646,999	15,790,646,999	100,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
2.1.5	Selanjutnya Bantuan Lain-lain	2,835,000,000	2,835,000,000	100,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2.2	Selanjutnya Tidak Langgung	199,833,176,000	165,566,476,742	83,0	86,7	14,140	14,140	14,140	14,140	14,140
2.2.1	Selanjutnya Pegawai	70,480,920,729	63,882,319,810	90,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
2.2.2	Selanjutnya Buruh	47,285,450,899	30,816,564,115	65,2	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
2.2.3	Selanjutnya Hibah	121,771,749,370	105,284,012,819	86,4	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2
	Surplus / (Defisit)	(13,650,823,822)	12,462,101,544	(76,0)						
PERBAYARAN DAERAH					#03/01	#03/01	#03/01	#03/01	#03/01	#03/01
6.1	Pembayaran Perimbangan Daerah (DAU/DAK)	61,560,823,822	61,560,823,822	100,0	(1,228,00)	(1,228,00)	(1,228,00)	(1,228,00)	(1,228,00)	(1,228,00)
6.2	Pembayaran Perimbangan Daerah (pembayaran modal / investasi) pemerintah daerah	40,500,000,000	40,500,000,000	100,0						
	Pembayaran Pajak Utang									
	PERBAYARAN NETTO	15,654,823,822	15,654,823,822	100,0						
SISA LEHUR PERBAYARAN MUGKABAN TAHUN BERSEKUTAN			27,913,825,264							

KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	13.000.000.000,00	-	-	216.666.666,67
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	1.995.000,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	150.000.000	-	-	-	-	-	2.533.250,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA							
EKUITAS DANA LANCAR							
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	28.377.800.404	49.518.800.677	(11.584.708.141,54)	(17.379.743.144,16)	20.176.248.350,65	-	1.151.806.635,76
Cadangan Piutang	-	24.001.069	-	-	1.740.000,00	-	429.017,82
Cadangan Persediaan	-	1.982.074.997	1.076.191.245,10	2.060.366.291,71	1.443.700.016,00	-	109.372.209,16
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -							
Utang Jangka Pendek	(150.000.000)	-	-	(13.000.000.000,00)	(1.995.000,00)	-	(219.199.916,67)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI							
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	137.065.000.000	182.566.821.570	208.360.491.570,00	226.860.491.570,00	193.505.479.892,18	-	15.805.971.410,04
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	409.339.818.996	326.240.514.370	649.659.464.209,03	699.921.233.481,07	804.870.695.995,03	-	48.167.195.450,85
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	9.783.473.517	1.940.000.000	-	-	2.659.326.244,00	-	239.713.329,35
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran -							
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN							
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	584.416.092.917	562.272.212.683	847.511.438.882,59	898.462.348.198,62	1.022.655.195.497,86		65.255.288.136,31

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aktiva Lancar	28.377.800.403,79	49.518.800.677,00	(11.584.708.141,54)	(17.039.068.144,16)	28.383.912.590,65	0,00
	Kewajiban jangka pendek	150.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	1.995.000,00	0,00
	Rasio Lancar (current Ratio)	28.227.800.403,79	49.518.800.677,00	(11.584.708.141,54)	(30.039.068.144,16)	28.381.917.590,65	0,00
	current rasio 1 : 1 atau lbh dari 1	189					
2	Aktiva Lancar	28.377.800.403,79	49.518.800.677,00	(11.584.708.141,54)	(17.039.068.144,16)	28.383.912.590,65	0,00
	Persediaan	0,00	1.982.074.997,00	1.076.191.245,10	2.060.366.291,71	1.443.700.016,00	0,00
	Kewajiban jangka pendek	150.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	1.995.000,00	0,00
	Rasio Quick (quick ratio)	28.227.800.403,79	51.500.875.674,00	(10.508.516.896,44)	(27.978.701.852,45)	29.825.617.606,65	0,00
	current rasio 1 : 1 atau lbh dari 1	189,19					
3	Total Hutang	150.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	1.995.000,00	0,00
	Total Aset	584.566.092.916,79	562.272.212.683,00	847.511.438.882,59	911.803.023.198,62	1.030.864.854.737,86	0,00
	Rasio Hutang terhadap total aset	584.416.092.916,79	562.272.212.683,00	847.511.438.882,59	898.803.023.198,62	1.030.862.859.737,86	0,00
		0,03					
4	Total Hutang	150.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000.000,00	1.995.000,00	0,00
	Total Aset	584.566.092.916,79	562.272.212.683,00	847.511.438.882,59	911.803.023.198,62	1.030.864.854.737,86	0,00
	Total Ekuitas	584.416.092.916,79	562.272.212.683,00	847.511.438.882,59	898.462.348.198,62	1.022.655.195.497,86	0,00
	Rasio Hutang terhadap modal	1.168.832.185.833,58	1.124.544.425.366,00	1.695.022.877.765,18	1.810.265.371.397,24	2.053.518.055.235,72	0,00
6	Rata-rata umur piutang	0,00	2.000.089,08	0,00	0,00	145.000,00	0,00
7	Rata-rata umur persediaan	0,00	165.172.916,42	89.682.603,76	171.697.190,98	120.308.334,67	0,00

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	29.502.037.686	32.737.107.134,00	38.505.320.778,00	48.560.521.718,00	60.344.699.957,00	0,00	8,33
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	506.000.000,00	560.835.000,00	593.000.000,00	271.000.000,00	242.300.000,00	0,00	8,33
3	Belanja Bunga	0,00	43.793.950,00	(49.556.166,00)	1.020.499.123,98	237.744.908,11	0,00	8,33
4	Belanja bantuan Sosial	9.703.988.700,00	18.893.466.365,00	3.532.100.000,00	2.398.211.854,00	1.584.317.640,00	0,00	8,33
5	Belanja bantuan keuangan	1.823.550.000,00	0,00	6.900.000.000,00	6.370.625.000,00	5.027.000.000,00	0,00	8,33
6	Belanja Tak terduga	30.000.000,00	31.500.000,00	265.000.000,00	206.742.000,00	48.430.000,00	0,00	8,33
		41.565.576.386,00	52.266.702.449,00	49.745.864.612,00	58.827.599.695,98	67.484.492.505,11		
B	Belanja Langsung						0,00	
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7.876.277.500,00	7.444.508.000,00	8.124.782.000,00	4.551.237.500,00	5.794.439.850,00	0,00	8,33
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	1.600.649.571,00	1.375.674.131,00	1.577.962.485,00	1.701.167.266,00	1.716.063.950,00	0,00	8,33
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	311.320.750,00	494.833.684,00	330.788.137,00	361.290.000,00	90.850.000,00	0,00	8,33
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	279.475.000,00	49.975.000,00	109.200.000,00	98.995.000,00	29.185.000,00	0,00	8,33
		10.067.722.821,00	9.364.990.815,00	10.142.732.622,00	6.712.689.766,00	7.630.538.800,00		
C	Pembiayaan Pengeluaran						0,00	
1	Pembentukan Dana Cadangan						0,00	
	Penyertaan modal investasi	20.780.427.356,00	16.700.000.000,00	12.297.116.516,00	5.299.100.000,00	1.159.519.000,00	0,00	8,33
2	Pembayaranpokokutang	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dst...						0,00	
		20.780.427.356,00	16.700.000.000,00	12.297.116.516,00	5.299.100.000,00	1.159.519.000,00		
	TOTAL (A+B+C)	72.413.726.563,00	78.331.693.264,00	72.185.713.750,00	70.839.389.461,98	76.274.550.305,11	0,00	91,63

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(Rp) (a)	(Rp) (b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2007	53.704.248.364,00	145.721.299.680,00	36,85
2	Tahun anggaran 2008	71.750.045.560,00	155.549.904.759,00	46,13
3	Tahun anggaran 2009	80.025.389.187,00	165.526.097.586,00	48,35
4	Tahun anggaran 2010	78.846.240.595,98	105.276.843.245,00	74,89
5	Tahun anggaran 2011	91.169.870.662,11	130.851.655.950,91	69,67
6	Tahun anggaran 2012	-	-	-

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	283.269.411.572,00	294.277.360.000,00	352.492.460.031,00	320.204.409.871,00	404.487.572.462,00	14.070.691.710,00
	Dikurangi realisasi:	132.494.988.437,00	112.753.585.777,00	190.371.864.082,22	167.911.299.494,68	170.082.651.557,47	15.678.691.000,00
2.	Belanja Daerah	255.117.408.600,00	287.204.747.400,00	299.471.504.160,00	217.701.818.697,98	288.375.178.139,93	411.572.817.649,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.780.427.356,00	16.700.000.000,00	12.297.116.516,00	5.299.100.000,00	6.034.519.000,00	27.000.000.000,00
	Defisit riil	(83.562.558.109,00)	(88.980.973.177,00)	(125.053.791.695,22)	(60.109.608.321,66)	(47.935.738.235,40)	(4.895.826.597,00)

2007 Defisit sebesar (Rp 83.562.558.109,00) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 56.350.823.822,00, jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 27.211.734.287,00)

2008 Defisit sebesar (Rp 88.980.973.177,00) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 44.533.425.871,00 jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 44.447.547.306,00)

2009 Defisit sebesar (Rp 125.053.791.695,22) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 49.518.800.677,00 jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 75.534.991.018,22)

2010 Defisit sebesar (Rp 60.109.608.321,66) belum ditambahkan SIKPA sebesar (Rp. 11.584.708.141,54) jika ditambahkan maka defisit bertambah menjadi (Rp 71.694.316.463,20)

2011 Defisit sebesar (Rp 47.935.738.235,40) belum ditambahkan SIKPA sebesar (Rp. 17.379.743.144,16) jika ditambahkan maka defisit bertambah menjadi (Rp 65.315.481.379,56)

2012 Defisit sebesar (Rp 4.895.826.597,00) belum ditambahkan SILPA sebesar (Rp. 5.932.061.641,00) jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 1.036.235.044,00)

Tabel 3.10 Komposisi penutup defisit rill anggaran

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit rill				
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	56.350.823.822,00	44.533.425.871,00	49.518.800.677,00	#####	(17.379.743.144,16)
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	1.982.074.997,00	1.076.191.245,10	2.060.366.291,71	1.443.700.016,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	4.522.384.844,00	1.200.000.000,00	2.246.709.829,23	1.662.621.609,03
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	4.324.503.776,00	5.476.601.254,00	5.319.929.131,00	5.543.824.701,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	308.064.000,00	3.819.150.000,00	450.000.000,00	38.307.288.240,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	6.422.933.208,00	1.535.453.202,00	10.000.000.000,00	3.207.724.200,00	1.957.267.080,00

Tabel 3.11 Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran

No.	Uraian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah SILPA	28.377.800.403,79	(100,91)	49.518.800.677,00	9,76	(11.584.708.141,54)	(327,45)	(17.379.743.144,16)	(33,34)	20.176.248.350,65	13,86	-	-
2.	Pelampauan penerimaan PAD	4.500.000.000,00	88,08	6.967.300.000,00	(1,11)	30.000.000.000,00	83,35	14.068.000.000,00	63,77	10.068.000.000,00	50,19	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	272.051.000.000,00	47,14	287.310.060.000,00	42,51	301.518.193.427,00	54,29	288.911.343.398,00	52,16	338.851.467.256,00	45,82	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	6.718.411.572,00	4,40	-	(100,00)	20.974.266.604,00	8,00	17.225.066.473,00	47,88	55.568.105.206,00	17,56	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2007 Rata-rata per tahun sebesar 3,23%

2008 Rata-rata per tahun sebesar (4,07%)

2009 Rata-rata per tahun sebesar (15,15%)

2010 Rata-rata per tahun sebesar 10,87%

2011 Rata-rata per tahun sebesar 10,62%

2012 Rata-rata per tahun sebesar

Tabel Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan daerah

No.	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Pendapatan						
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran						
	Total penerimaan						
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama						
	Kapasitas riil kemampuan keuangan						

Tabel Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung						
II.b	Pembentukan dana cadangan						
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama						
II	(II.a+II.b-II.c-II.d)						
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung						
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)						
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*						

Tabel 3.14 Estimasi Penerimaan Kabupaten Simeulue, 2013-2017

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH						
Pendapatan Asli Daerah						
Hasil Pajak Daerah						
Hasil Retribusi Daerah						
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan						
Dana Perimbangan						
Bagi Hasil Pajak						
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam						
Dana Alokasi Umum						
Dana Alokasi Khusus						
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah						
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi						
Dana Penyesuaian Otonomi Daerah						
Dana Bantuan Dari Propinsi						
JUMLAH PENDAPATAN						

Tabel 3.1 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Simeulue, 2007-2012

KODE	URAIAN	TAHUN 2007			TAHUN 2008			TAHUN 2009			TAHUN 2010			TAHUN 2011			TARGET TAHUN 2012		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	(%)
1.	PENDAPATAN	283,269,411,572	270,950,956,139	95.65	294,277,360,000	317,675,245,190	107.95	352,492,460,031	314,099,068,645	89.11	320,204,409,871	307,496,948,198	96.03	404,487,572,462	407,387,549,508	100.72	416,716,537,580	420,240,614,402	100.85
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	4,500,000,000	3,625,105,935	80.56	6,967,300,000	8,120,735,836	116.55	30,000,000,000	10,586,952,000	35.29	14,068,000,000	8,107,924,049	57.63	10,068,000,000	7,231,884,032	71.82	15,678,691,000	14,790,455,421	94.33
1.1.1.	Pajak daerah	387,749,060	17,240,000	4.45	752,500,000	835,233,894	110.99	6,288,500,000	476,838,495	7.58	1,041,000,000	779,699,784	74.90	1,943,342,000	1,455,425,649	74.89	2,167,500,000	2,810,716,251	129.69
1.1.2.	Retribusi daerah	1,001,098,829	541,919,260	54.13	1,012,946,000	490,611,130	48.44	3,985,500,000	1,132,314,280	28.41	2,912,000,000	1,911,174,174	65.63	2,271,000,000	1,241,968,347	54.69	2,373,000,000	6,500,509,438	92.24
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	-	2,396,044,785		3,750,000,000	4,522,384,844	120.60	13,106,500,000	4,917,542,614	37.52	3,000,000,000	2,246,709,829	74.89	2,280,000,000	1,562,621,609	72.92	2,280,000,000	1,894,682,925	83.10
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	3,111,152,011	669,901,890	21.53	1,451,932,000	2,272,505,968	156.51	6,620,000,000	4,060,295,611	61.33	7,115,000,000	3,170,340,262	44.56	659,754,993	1,230,811,313	186.51	2,158,191,000	2,161,675,043	100.16
1.1.5.	Zatut	-	-		-	-		-	-		-	-		2,703,901,007	1,640,257,114	60.66	1,700,000,000	1,122,871,764	66.05
1.2.	Dana Perimbangan	272,051,000,000	260,902,916,996	95.90	287,310,060,000	292,492,509,574	101.80	301,518,193,427	284,216,365,391	94.26	288,911,343,398	287,556,446,618	99.53	338,851,467,256	342,889,690,872	101.19	380,915,119,756	381,177,673,585	100.17
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	43,362,000,000	32,210,916,996	74.28	29,146,200,000	34,328,649,574	117.78	46,279,137,427	28,977,309,391	62.61	36,262,239,398	34,907,342,618	96.26	28,693,570,256	32,731,293,872	114.11	23,881,133,756	28,943,687,585	102.29
1.2.2.	Dana alokasi umum	184,730,000,000	184,733,000,000	100.00	205,553,860,000	205,553,860,000	100.00	209,826,056,000	209,826,056,000	100.00	218,813,604,000	260,138,697,000	100.00	260,138,697,000	260,138,697,000	100.00	309,799,056,000	309,799,056,000	100.00
1.2.3.	Dana alokasi khusus	43,959,000,000	43,959,000,000	100.00	52,610,000,000	52,610,000,000	100.00	45,413,000,000	45,413,000,000	100.00	33,935,500,000	33,935,500,000	100.00	50,029,300,000	50,029,300,000	99.98	42,234,930,000	42,234,930,000	100.00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,718,411,572	6,422,933,208	95.60	-	17,061,999,780	100.00	20,974,266,604	19,295,751,254	92.00	17,225,066,473	11,832,577,531	68.69	55,568,105,206	57,266,774,604	103.06	20,122,726,824	23,872,485,396	118.63
1.3.1.	Hibah	-	-		0	3,150,000,000	100.00	0	0	0.00	-	-	#DIV/0!	0	0	0.00	0	0	0.00
1.3.2.	Dana darurat	-	-		0	0	0.00	0	0	0.00	-	-	#DIV/0!	0	0	0.00	0	0	0.00
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***	295,478,364	-	-	0	10,881,446,578	100.00	5,974,266,604	5,476,601,254	91.67	6,696,068,073	5,319,929,131	79.45	6,046,227,886	7,722,957,284	127.69	7,211,295,944	8,461,025,396	117.33
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	-	-		0	1,495,100,000	100.00	5,000,000,000	3,819,150,000	76.38	-	450,000,000	#DIV/0!	47,562,610,240	47,586,550,240	100.05	12,315,860,000	12,315,860,000	100.00
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6,422,933,208	6,422,933,208	100.00	0	1,535,453,202	100.00	10,000,000,000	10,000,000,000	100.00	10,528,996,400	6,062,648,400	57.58	1,957,267,080	1,957,267,080	100.00	595,570,800	3,095,600,000	0.00
2.	BELANJA	299,120,235,394	258,888,854,595	86.55	315,934,493,990	290,689,870,384	92.01	374,710,612,978	349,408,907,464	93.25	327,429,339,229	307,791,983,201	94.00	362,343,625,582	337,884,737,773	93.25	414,488,707,391	397,482,968,006	95.90
2.1.	Belanja Tidak Langsung	99,282,099,306	95,331,757,851	96.02	125,151,454,173	128,808,796,800	102.99	142,570,185,149	158,192,382,633	110.96	169,032,192,343	173,465,424,747	102.62	188,507,953,271	188,718,829,466	100.11	223,196,449,468	206,031,895,630	92.31
2	Belanja Pegawai	75,263,759,308	74,538,574,401	99.04	99,451,696,373	103,482,175,185	104.05	108,698,269,849	125,280,870,633	115.26	139,275,421,843	144,303,203,341	103.61	154,259,579,691	160,276,584,263	103.90	196,774,533,877	184,797,897,378	93.91
1	Belanja Bunga	-	-		0	43,793,950	#DIV/0!	0	0	0.00	1,100,000,000	1,028,499,124	92.77	970,200,000	1,883,570,742	111.69	-	120,000	
3	Belanja Subsidi	1,108,800,000	745,200,000	67.21	390,000,000	366,670,800	94.02	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
4	Belanja Hibah	3,525,000,000	2,986,000,000	84.71	2,142,000,000	2,137,000,000	99.77	21,764,988,000	20,095,301,000	92.33	14,512,175,500	14,249,630,000	98.19	16,529,231,000	10,881,646,657	65.83	19,142,665,591	13,835,272,053	72.27
5	Belanja Bantuan Sosial	15,790,660,990	14,376,246,700	91.04	23,042,738,000	22,751,456,863	98.74	3,781,928,300	4,838,500,500	127.94	6,171,621,000	5,929,747,132	96.24	2,389,080,000	2,289,543,452	95.83	3,329,250,000	3,126,450,000	99.92
6	Belanja Bagi Hasil	-	-		0	0	0.00	0	0	0.00	-	-	0.00	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!
7	Belanja Bantuan Keuangan	2,593,800,000	2,592,000,000	99.93	0	0	#DIV/0!	6,900,000,000	6,900,000,000	100.00	7,472,975,000	7,472,975,000	100.00	14,009,862,500	13,905,124,972	99.25	3,450,000,000	3,857,337,119	0.00
8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	95,736,750	9.57	125,000,000	107,700,000	86.16	1,425,000,000	1,077,710,500	75.63	-	479,370,150	95.87	350,000,000	282,359,400	80.66	500,000,000	214,819,080	0.00
2.2.	Belanja Langsung	199,838,136,088	163,555,096,744	81.84	190,783,039,817	161,801,073,584	84.81	232,140,427,829	191,216,524,821	82.37	153,397,145,886	134,326,539,454	87.80	173,835,672,311	149,165,908,288	85.81	191,292,257,920	191,451,072,376	100.06
1	Belanja Pegawai	30,680,920,729	19,392,519,810	63.17	26,993,446,851	19,382,519,810	71.80	36,094,494,573	25,012,744,975	69.30	36,037,947,500	20,792,817,200	57.70	31,839,899,216	18,131,963,575	56.95	30,338,973,242	32,770,607,462	104.85
2	Belanja Barang dan Jasa	47,385,505,839	38,918,564,115	82.13	72,357,974,353	61,915,861,283	85.57	97,717,129,686	88,729,722,204	90.80	68,383,430,360	64,827,673,265	94.80	51,255,374,007	49,877,770,690	97.31	79,625,696,372	79,006,368,776	99.22
3	Belanja Modal	121,771,749,520	105,254,012,819	86.44	91,431,618,413	90,502,672,491	98.05	96,328,813,568	77,474,057,652	78.79	53,975,768,026	48,706,067,989	90.24	90,740,399,088	81,156,174,023	89.44	61,327,585,309	59,666,096,138	97.29
	Surplus / (Defisit)	(15,830,823,822)	12,062,101,544	(76.10)	(21,657,133,990)	26,985,374,806	(124.60)	(22,218,152,947)	(35,309,838,819)	158.92	(7,224,929,338)	(285,035,003)	4.08	42,143,946,880	69,502,811,735	164.92	2,227,830,189	22,757,646,396	1,021.52
PEMBIAYAAN DAERAH																			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah (SIPDA)	56,350,823,822	56,350,823,822	100.00	43,657,133,990	44,533,425,871	102.01	49,218,152,946	49,518,800,677	100.61	1,415,791,858	1,415,291,858	(85.96)	(18,384,427,880)	(17,379,743,144)	(94.54)	28,383,912,591	28,383,912,591	100.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-		-	-		-	-		13,000,000,000	-		-	-	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40,500,000,000	40,500,000,000	100.00	22,000,000,000	22,000,000,000	100.00	27,000,000,000	25,793,670,000	95.53	22,500,000,000	18,500,000,000	82.22	23,759,519,000	23,739,156,000	99.91	26,970,292,000	27,000,000,000	100.11
	penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-		-	-		-	-		-	-		-	10,739,156,000		-	-	
	Pembayaran Pajak Uang	-	-		-	-		-	-		-	-		-	13,000,000,000		-	-	
		15,850,823,822	15,850,823,822	100.00	21,657,133,990	22,533,425,871	104.05	22,218,152,946	23,725,130,677	106.76	(21,084,208,142)	(17,084,708,142)	81.03	(42,143,946,880)	(41,188,899,144)	97.57	1,413,620,591	1,383,912,591	97.90
PEMBIAYAAN NETTO																			
		-	27,912,925,366		-	49,518,800,677		-	(11,584,708,142)		-	(17,379,743,144)	#DIV/0!	0	28,383,912,591	(100.00)	0	24,141,538,987	(100.00)

Uraian	2,007	2,008	2009	2010	2011	2012	Rata2 Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
ASET							
ASET LANCAR							
Kas	536,587,525	7,044,445,464	4,996,015,432.53	5,096,396,046.32	5,014,838,074.53	15,678,691,000.00	378,138,042.37
Kas di Kas Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	-
Piutang							
Piutang Pajak	5,880,000	601,276,499	223,744,622.00	474,315,659.00	993,782,406.00	2,145,000,000.00	38,316,653.10
Piutang Retribusi	305,051,430	262,534,640	642,394,470.00	1,136,090,664.00	604,386,228.92	7,395,500,000.00	49,174,290.55
Piutang Dana Bagi Hasil	30,809,814,402	25,557,375,781	18,612,208,262.25	23,361,875,999.00	25,170,817,809.00	28,881,133,756.00	2,058,534,870.89
Piutang Dana Alokasi Umum	76,972,088,000	102,776,932,000	87,427,521,000.00	91,172,335,000.00	108,391,085,000.00	309,799,056,000.00	7,778,999,350.00
Piutang Dana Alokasi Khusus	36,033,000,000	36,827,000,000	31,789,100,000.00	23,684,850,000.00	50,019,800,000.00	42,234,930,000.00	2,972,562,500.00
Piutang Lainnya	6,422,933,208	9,318,020,978	19,295,751,254.00	8,977,653,331.00	45,808,380,021.00	19,527,155,944.00	1,497,045,646.53
	150,548,767,040	175,343,139,898	157,990,719,608.25	148,807,120,653.00	230,988,251,464.92	409,982,775,700.00	14,394,633,311.07
Persediaan	225,656,095	1,658,249,481	2,929,876,340.53	1,239,279,894.09	791,032,243.58	2,158,191,000.00	114,068,234.24
	150,774,423,135	177,001,389,379	160,920,595,948.78	150,046,400,547.09	231,779,283,708.50	412,140,966,700.00	14,508,701,545.30
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Non Permanen							
Pinjaman Kepada Perusahaan							
Negara	-	-	-	-	-	-	-
Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Kepada Pemerintah							
Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Dalam Surat Utang							
Negara	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah							
Daerah	20,780,427,356	16,700,000,000	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	1,159,519,000.00	27,000,000,000.00	937,269,381.20
Pembangunan							
Penyertaan Model Proyek	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Perusahaan							
Patungan	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
ASET TETAP							
Tanah	49,731,219,974	51,174,002,966	62,077,343,100.00	66,547,748,546.04	74,717,386,403.04	-	5,070,795,016.48
Peralatan dan Mesin	75,837,687,606	68,308,896,678	144,280,950,507.70	158,698,455,758.70	171,312,327,779.16	-	10,307,305,305.49
Gedung dan Bangunan	134,981,825,586	125,245,879,514	296,822,478,393.83	309,441,994,447.83	311,739,256,067.03	-	19,637,190,566.81
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	143,717,317,000	70,588,880,442	140,727,261,301.00	150,419,589,493.00	227,141,002,371.00	-	12,209,900,843.45
Aset Tetap Lainnya	5,071,768,830	4,190,512,400	5,285,430,960.50	9,130,851,961.50	11,059,006,960.80	-	578,959,518.55
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	6,732,342,370	466,000,000.00	5,682,593,274.00	8,901,716,414.00	-	363,044,200.97
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Aktiva Lancar	28,377,800,403.79	49,518,800,677.00	(11,584,708,141.54)	(17,039,068,144.16)	28,383,912,590.65	0.00
	Kewajiban jangka pendek	150,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	1,995,000.00	0.00
	Rasio Lancar (current Ratio)	28,227,800,403.79	49,518,800,677.00	(11,584,708,141.54)	(30,039,068,144.16)	28,381,917,590.65	0.00
	current rasio 1 : 1 atau lbh dari 1	189					
2	Aktiva Lancar	28,377,800,403.79	49,518,800,677.00	(11,584,708,141.54)	(17,039,068,144.16)	28,383,912,590.65	0.00
	Persediaan	0.00	1,982,074,997.00	1,076,191,245.10	2,060,366,291.71	1,443,700,016.00	0.00
	Kewajiban jangka pendek	150,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	1,995,000.00	0.00
	Rasio Quick (quick ratio)	28,227,800,403.79	51,500,875,674.00	(10,508,516,896.44)	(27,978,701,852.45)	29,825,617,606.65	0.00
	current rasio 1 : 1 atau lbh dari 1	189.19					
3	Total Hutang	150,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	1,995,000.00	0.00
	Total Aset	584,566,092,916.79	562,272,212,683.00	847,511,438,882.59	911,803,023,198.62	1,030,864,854,737.86	0.00
	Rasio Hutang terhadap total aset	584,416,092,916.79	562,272,212,683.00	847,511,438,882.59	898,803,023,198.62	1,030,862,859,737.86	0.00
		0.03					
4	Total Hutang	150,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00	1,995,000.00	0.00
	Total Aset	584,566,092,916.79	562,272,212,683.00	847,511,438,882.59	911,803,023,198.62	1,030,864,854,737.86	0.00
	Total Ekuitas	584,416,092,916.79	562,272,212,683.00	847,511,438,882.59	898,462,348,198.62	1,022,655,195,497.86	0.00
	Rasio Hutang terhadap modal	#####	1,124,544,425,366.00	1,695,022,877,765.18	1,810,265,371,397.24	2,053,518,055,235.72	0.00
		0.03					
6	Rata-rata umur piutang	0.00	2,000,089.08	0.00	0.00	145,000.00	0.00
7	Rata-rata umur persediaan	0.00	165,172,916.42	89,682,603.76	171,697,190.98	120,308,334.67	0.00

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	29,502,037,686.00	32,737,107,134.00	38,505,320,778.00	48,560,521,718.00	60,344,699,957.00	0.00	8.33
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	506,000,000.00	560,835,000.00	593,000,000.00	271,000,000.00	242,300,000.00	0.00	8.33
3	Belanja Bunga	0.00	43,793,950.00	(49,556,166.00)	1,020,499,123.98	237,744,908.11	0.00	8.33
4	Belanja bantuan Sosial	9,703,988,700.00	18,893,466,365.00	3,532,100,000.00	2,398,211,854.00	1,584,317,640.00	0.00	8.33
5	Belanja bantuan keuangan	1,823,550,000.00	0.00	6,900,000,000.00	6,370,625,000.00	5,027,000,000.00	0.00	8.33
6	Belanja Tak terduga	30,000,000.00	31,500,000.00	265,000,000.00	206,742,000.00	48,430,000.00	0.00	8.33
		41,565,576,386.00	52,266,702,449.00	49,745,864,612.00	58,827,599,695.98	67,484,492,505.11	0.00	
B	Belanja Langsung							
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	7,876,277,500.00	7,444,508,000.00	8,124,782,000.00	4,551,237,500.00	5,794,439,850.00	0.00	8.33
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	1,600,649,571.00	1,375,674,131.00	1,577,962,485.00	1,701,167,266.00	1,716,063,950.00	0.00	8.33
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	311,320,750.00	494,833,684.00	330,788,137.00	361,290,000.00	90,850,000.00	0.00	8.33
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	279,475,000.00	49,975,000.00	109,200,000.00	98,995,000.00	29,185,000.00	0.00	8.33
		10,067,722,821.00	9,364,990,815.00	10,142,732,622.00	6,712,689,766.00	7,630,539,800.00	0.00	
C	Pembiayaan Pengeluaran							
1	Pembentukan Dana Cadangan							
	Penyertaan modal investasi	20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	1,159,519,000.00	0.00	8.33
2	Pembayaranpokokutang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dst...							
		20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	1,159,519,000.00	0.00	
	TOTAL (A+B+C)	72,413,726,563.00	78,331,693,264.00	72,185,713,750.00	70,839,389,461.98	76,274,550,305.11	0.00	91.63

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Peneluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2007	53,704,248,364.00	145,721,299,680.00	36.85
2	Tahun anggaran 2008	71,750,045,560.00	155,549,904,759.00	46.13
3	Tahun anggaran 2009	80,025,389,187.00	165,526,097,586.00	48.35
4	Tahun anggaran 2010	78,846,240,595.98	105,276,843,245.00	74.89
5	Tahun anggaran 2011	91,169,870,662.11	130,851,655,950.91	69.67
6	Tahun anggaran 2012	-	-	-

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	283,269,411,572.00	294,277,360,000.00	352,492,460,031.00	320,204,409,871.00	404,487,572,462.00	14,070,691,710.00
	Dikurangi realisasi:	132,494,988,437.00	112,753,585,777.00	190,371,864,082.22	167,911,299,494.68	170,082,651,557.47	15,678,691,000.00
2.	Belanja Daerah	255,117,408,600.00	287,204,747,400.00	299,471,504,160.00	217,701,818,697.98	288,375,178,139.93	411,572,817,649.00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,780,427,356.00	16,700,000,000.00	12,297,116,516.00	5,299,100,000.00	6,034,519,000.00	27,000,000,000.00
	Defisit riil	(83,562,558,109.00)	(88,980,973,177.00)	(125,053,791,695.22)	(60,109,608,321.66)	(47,935,738,235.40)	(4,895,826,597.00)

- 2007
Defisit sebesar (Rp 83.502.558.109,00) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 56.350.823.822,00, jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 27.211.734.287,00)
- 2008
Defisit sebesar (Rp 88.980.973.177,00) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 44.533.425.871,00 jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 44.447.547.306,00)
- 2009
Defisit sebesar (Rp 125.053.791.695,22) belum ditambahkan SILPA sebesar Rp. 49.518.800.677,00 jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 75.534.991.018,22)
- 2010
Defisit sebesar (Rp 60.109.608.321,66) belum ditambahkan SIKPA sebesar (Rp. 11.584.708.141,54) jika ditambahkan maka defisit bertambah menjadi (Rp 71.694.316.463,20)

2011 Defisit sebesar (Rp 47.935.158.232,40) belum ditambahkan SIKPA sebesar (Rp. 17.379.743.144,16) jika ditambahkan maka defisit bertambah menjadi (Rp 65.315.481.379,56)
 2012 Defisit sebesar (Rp 4.890.820.591,00) belum ditambahkan SILPA sebesar (Rp. 5.932.061.641,00) jika ditambahkan maka defisit berkurang menjadi (Rp 1.036.235.044,00)

Tabel 3.10 Komposisi penutup defisit rill anggaran

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit rill				
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	56,350,823,822.00	44,533,425,871.00	49,518,800,677.00	(11,584,708,141.54)	(17,379,743,144.16)
2.	Pencairan Dana Cadangan	0.00	1,982,074,997.00	1,076,191,245.10	2,060,366,291.71	1,443,700,016.00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0.00	4,522,384,844.00	1,200,000,000.00	2,246,709,829.23	1,662,621,609.03
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	4,324,503,776.00	5,476,601,254.00	5,319,929,131.00	5,543,824,701.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	308,064,000.00	3,819,150,000.00	450,000,000.00	38,307,288,240.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	6,422,933,208.00	1,535,453,202.00	10,000,000,000.00	3,207,724,200.00	1,957,267,080.00

Tabel 3.11 Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran

No.	Uraian	2007		2008		2009		2010		2011		2012	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah SILPA	28,377,800,403.79	(100.91)	49,518,800,677.00	9.76	(11,584,708,141.54)	(327.45)	(17,379,743,144.16)	(33.34)	20,176,248,350.65	13.86	-	-
2.	Pelampauan penerimaan PAD	4,500,000,000.00	88.08	6,967,300,000.00	(1.11)	30,000,000,000.00	83.35	14,068,000,000.00	63.77	10,068,000,000.00	50.19	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	272,051,000,000.00	47.14	287,310,060,000.00	42.51	301,518,193,427.00	54.29	288,911,343,398.00	52.16	338,851,467,256.00	45.82	-	-
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	6,718,411,572.00	4.40	-	(100.00)	20,974,266,604.00	8.00	17,225,066,473.00	47.88	55,568,105,206.00	17.56	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2007 Rata-rata per tahun sebesar 3,23%
2008 Rata-rata per tahun sebesar (4,07%)
2009 Rata-rata per tahun sebesar (15,15%)
2010 Rata-rata per tahun sebesar 10,87%
2011 Rata-rata per tahun sebesar 10,62%
2012 Rata-rata per tahun sebesar

Tabel Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai Pembangunan daerah

No.	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Pendapatan						
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)						
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran						
	Total penerimaan						
	Dikurangi:						
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama						
	Kapasitas riil kemampuan keuangan						

Tabel Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung						
II.b	Pembentukan dana cadangan						
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama						
II	(II.a+II.b-II.c-II.d)						
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)						
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung						
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama						
	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)						
III	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*						

Tabel 3.14 Estimasi Penerimaan Kabupaten Simeulue, 2013-2017

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH						
Pendapatan Asli Daerah						
Hasil Pajak Daerah						
Hasil Retribusi Daerah						
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dioisahkan						
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dioisahkan						
Dana Perimbangan						
Bagi Hasil Pajak						
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam						
Dana Alokasi Umum						
Dana Alokasi Khusus						
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah						
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi						
Dana Penyesuaian Otonomi Daerah						
Dana Bantuan Dari Propinsi						
JUMLAH PENDAPATAN						

Selain dari pada itu bentuk pulau Simeulue yang memanjang dengan panjang ± 102 km yang hanya memiliki satu dermaga ferry dan satu dermaga cargo yang terletak di bagian Timur Simeulue, menjadi kurang efektif bagi masyarakat pengguna yang berada di bagian Barat Simeulue. Oleh karena itu memungkinkan untuk menambah fasilitas dermaga penyeberangan serta dermaga cargo yang berada di wilayah Simeulue bagian Barat dengan jalur lintasan Sibigo (Kabupaten Simeulue) – Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) agar penyebaran pembangunan dapat merata dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di ujung Barat Kabupaten Simeulue.

2. **Masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan udara.** Kondisi geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan Kepulauan menjadikan jalur perhubungan udara sebagai akses sekunder selain jalur perhubungan laut. Akan tetapi sarana dan prasara yang tersedia belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna fasilitas angkutan udara. Karena berdasarkan fakta yang ada sering terjadi antrian penumpang pengguna angkutan udara.
3. **Masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan darat.** Hal ini terlihat dari sarana transportasi darat antar kecamatan yang belum memadai, masih belum tersedianya fasilitas terminal angkutan barang, serta belum tersedianya halte di pusat-pusat kota kecamatan.

4.1.1.3 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

1. Pembangunan prasara dan sarana telekomunikasi yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten.
2. Pelayanan pos yang belum mampu menjangkau daerah-daerah yang terisolir, terutama di beberapa kecamatan dan daya jangkau telekomunikasi paling rendah.

4.1.1.4 Infrastruktur Sumber Daya Air

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Simeulue.

4.1.2 Perekonomian Daerah

4.1.2.1 Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll.**
2. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan **penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil**. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Kabupaten Simeulue sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

4.1.2.2 Sumber daya Ekonomi

1. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
2. Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit.
3. Rendahnya Produktifitas padi yang dihasilkan.
4. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian.
5. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Simeulue.
6. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
7. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki masih belum memadai.
8. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.

9. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
10. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya coldstorage untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
11. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba, bom, setrum dan bom serta adanya pencurian ikan di laut, baik oleh masyarakat dari daerah lain maupun oleh warga negara asing.
12. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
13. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
14. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah.
15. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
16. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif.
17. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
18. Masih belum mampunya Kabupaten Simeulue dalam menarik minat investor dalam hal penanaman modal baik dalam maupun asing.
19. Rendahnya tingkat pemeliharaan tanaman baik pangan maupun perkebunan rakyat.

4.1.3 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat.

3. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
4. **Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia profesional** dalam penguasaan teknologi dibidang perikanan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
5. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

4.1.4 Sosial Budaya

4.1.4.1 Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Simeulue antara lain:

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktek, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
3. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
5. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
6. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
7. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

4.1.4.2 Kesehatan

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh masyarakat.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah

3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Rendahnya kualitas sumber daya (tenaga) kesehatan.
6. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.1.4.3 Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Kabupaten Simeulue belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

4.1.4.5 Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
2. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
3. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
4. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
5. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

4.1.5. Tata Pemerintahan

4.1.5.1. Pemerintahan Umum

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.

Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sector swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh **belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya**. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Di samping permasalahan tersebut di atas, **budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi.** Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of conduct) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan e-procurement belum dapat dilaksanakan.

Padahal, pengembangan dan penerapan e-procurement merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

3. **Pelayanan Publik.** Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Kabupaten Simeulue **belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi,** yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti "Ombudsman Daerah".

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses

kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

- 4. Pengembangan budaya hukum dan HAM.** Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Kabupaten Simeulue, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.

Di sisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta Koordinasi penegakan HAM skala Kabupaten, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal. Demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dan kab/kota dalam Kabupaten Simeulue.

4.1.5.2. Politik

1. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan ada kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasi politik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang masih dihadapi adalah kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki.

Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

2. Sampai saat ini partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi

dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun mengh

3. adapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasarana penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
4. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Simeulue dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

1. Ketersediaan dan kualitas **infrastruktur fisik** yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
2. Rendahnya **kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan daerah.**
3. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin
4. **Iklim investasi** yang belum kondusif **yang mendukung** pengembangan ekonomi daerah.
5. Penataan **Tata Pemerintahan** yang baik.

6. **Pemanfaatan sumberdaya alam** yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
7. **Kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai perkiraan** banyaknya bencana alam (gempa bumi) yang terjadi, berdampak signifikan pada fasilitas infrastruktur.
8. **Permasalahan klasik bagi wilayah-wilayah berkembang adalah pemenuhan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air** untuk masyarakat luas yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Isu ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama berjalannya proses pembangunan secara baik, tidak terkecuali Kabupaten Simeulue. Adalah suatu kemustahilan pembangunan akan berjalan dengan baik jika infrastruktur transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia.
9. Isu strategis lainnya yang langsung berkaitan dengan Kabupaten Simeulue adalah **perlu penyediaan ruang dan tempat usaha yang layak, nyaman, aman dan memadai**. Beberapa permasalahan dapat diidentifikasi diantaranya:
 - a. Tingkat kemiskinan cukup tinggi (tahun 2010) sekitar 23,63 % dari total penduduk atau berjumlah 84.704 jiwa.
 - b. Rendahnya kualitas tenaga kerja (2011), hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (DIV/S1) dengan total penduduk, rasionya adalah 9,98 persen dari 86.190 total jumlah penduduk.
 - c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (tahun 2011), hal ini tercermin dari tingkat pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Simeulue yang berusia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan S1 sebesar 2,77% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun, Diploma sebesar 3,90%, SLTA sebesar 18,75% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun dan yang belum tamat SD/MI sebesar 19,33% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun.
 - d. Masih tingginya angka kematian bayi (2011), yaitu sebesar 41/1000 kelahiran hidup ini berarti dari 1369 jumlah kelahiran terdapat 55 jumlah kematian bayi.
 - e. Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat (tahun 2011), hal ini tercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Jumlah dokter sebesar 0,22.
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap baru dimanfaatkan sekitar 50% dari potensi lestarinya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 60%.

- g. Belum berkembangnya potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai dan alam. Destinasi Pariwisata (78 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata pantai 33 objek/kawasan , wisata sejarah 8 objek, wisata alam 37 kawasan).
- h. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan,terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).
- i. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- j. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik, regulasi).
- k. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur (tahun 2012) sekitar 29,80% berpendidikan strata 1 (S-1) serta strata 2/ strata 3 (S2/S3) sebesar 0,60%.
- l. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- m. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, adapun visi Kabupaten Simeulue yang ditetapkan untuk tahun 2012– 2017 :

**“Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat
dalam Bingkai Masyarakat Madani “**

Simeulue

Seluruh wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Kabupaten Simeulue berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 dan penduduk yang terjaga secara administrasi sebagai penduduk Kabupaten Simeulue.

Madani

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya

Maju :

Sikap dan kondisi masyarakat Simeulue yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju yang ditandai dengan pemantapan infrastruktur dan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna pemerataan pendapatan masyarakat.

Sejahtera :

Kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Bermartabat

Sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan berlandaskan Dinul Islam serta memperhatikan kearifan lokal.

5.2. MISI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2017, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji bertaqwa kepada Allah SWT.

yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;

2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.

yaitu pembangunan yang menekankan membaiknya derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;

3. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana. yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.

yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

5. Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta mendorong agar sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.

6. Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.

Dengan menggali potensi Sumber Daya Alam sebagai peningkatan pendapatan daerah melalui kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak, yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumber Daya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;

7. Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan secara Terpadu di Bidang Pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas lapangan usaha.

Mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri;

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Simeulue Tahun 2007 -2027, maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun ke depan dapat diuraikan dalam tabel 5.1 s/d 5.7 di bawah ini :

Tabel. 5.1 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 1

Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji bertaqwa kepada Allah SWT.	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya manajemen sekolah yang efisien. 2. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. Memantapkan angka partisipasi sekolah. 4. Meningkatnya angka melek huruf. 5. Meningkatnya prestasi siswa. 6. Meningkatnya penguasaan skill dan teknologi siswa
Memperkuat pendidikan keislaman berbasis sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya kepribadian Islami yang berbasis di sekolah
Memantapkan aksesibilitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 2. Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi guru dan siswa.
Meningkatkan kualitas keterampilan angkatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya keterampilan dan kewirausahaan masyarakat
Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya prestasi atlet Simeulue 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga di event regional, nasional dan internasional. 3. Terlaksananya event olah raga di Simeulue.

Tabel. 5.2 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 2

Misi 2: Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpeliharanya kesehatan individu, keluarga masyarakat dan lingkungan. 2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana.
Memantapkan dan memperluas akses dan daya dukung infrastruktur pelayanan fasilitas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya layanan kesehatan ke seluruh pelosok Simeulue. 2. Terpeliharanya infrastruktur kesehatan.

Tabel. 5.3 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 3

Misi 3 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana.	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi. 2. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memenuhi standar kesehatan 3. Tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 4. Berkurangnya dampak resiko bencana alam dan bencana kebakaran
Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang/Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendalinya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah

Tabel. 5.4 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 4

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat.	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. 2. Meningkatnya disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur.
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mewujudkan penataan dan Pengelolaan data dan informasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kearsipan dan data daerah yang baik
Mewujudkan regulasi untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik	Terbentuknya regulasi sebagai payung hukum dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan
Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Supremasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM 2. Penegakan syariah Islam

Tabel. 5.5 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 5

Misi 5 : Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat islam serta mendorong agar sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbinanya dan optimalnya peranan pusat kajian Islam (Islamik center), Pesantren, TPA dan TQA. 2. Optimalnya peran MPU, MAA dan Petugas Keagamaan. 3. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama di masyarakat serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis rukun dan damai di kalangan umat beragama.
Revitalisasi sarana ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana ibadah yang nyaman bagi masyarakat
Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan masyarakat berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang peka terhadap pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Tabel. 6 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 6

Misi 6 : Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak	
Tujuan	Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja dengan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan Kawasan strategis dan cepat Tumbuh

Tabel. 5.7 Tujuan dan Sasaran Menurut Misi 7

<p>Misi 7. : Melaksanakan Pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas lapangan usaha.</p>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan peranan ekonomi pedesaan dalam perekonomian daerah.	1. Meningkatnya kapasitas koperasi, ukm dan kelembagaan ekonomi pedesaan
2. Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	1. Penguatan peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak perekonomian utama daerah dalam menyokong pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Meningkatnya Ketahanan Pangan
3. Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah	1. Meningkatnya kinerja perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok Simeulue 2. Meningkatnya kunjungan wisatawan

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 adalah **Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai Masyarakat Madani**. Untuk tercapainya tujuan tersebut ditempuh melalui penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

6.1. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Simeulue (2012-2017)

Strategi pembangunan ditetapkan dengan menggunakan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dirumuskan dengan mengembangkan program pembangunan selama lima tahun dan dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah dan arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue ditujukan untuk mewujudkan misi Pemerintahan Kabupaten Simeulue dan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Secara umum, strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2012 - 2017, yang merupakan "grand strategy" dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel .6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 1

MISI. I					
Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT.					
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1.1 Terwujudnya manajemen sekolah yang efisien. 1.2 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik. 1.3 Memantapkan angka partisipasi sekolah. 1.4 Meningkatnya angka melek huruf. 1.5 Meningkatnya prestasi siswa.	1.1.1 Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan dan pengelolaan pendidikan 1.2.1 Peningkatan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan dasar dan menengah 1.3.1 Penyediaan beasiswa bagi penduduk usia sekolah yang kurang mampu 1.3.2 Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan 1.4.1 Peningkatan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah dan masyarakat buta huruf 1.5.1 Penyediaan alat pendukung pemahaman materi mata pelajaran	1.1.1.1 Penerapan sistem manajemen sekolah berbasis teknologi komputer 1.2.1.1 Peningkatan rata-rata jenjang pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik 1.3.1.1 Penyediaan beasiswa diarahkan untuk memastikan anak kurang mampu memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 1.3.2.1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan dan memperkenalkan sekolah kejuruan. 1.4.1.1 Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat dan mengembangkan pendidikan luar sekolah dan menyelenggarakan pendidikan satu atap 1.5.1.1 Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium bahasa, IPA dan Komputer 1.5.1.2 Penyediaan pustaka, alat bantu peraga, laboratorium otomotif, perikanan dan pertanian	
2	Memperkuat pendidikan keislaman berbasis sekolah	2.1 Tumbuhnya kepribadian islami yang berbasis di sekolah	2.1.1 Menggalakkan dan menumbuhkembangkan pendidikan keislaman di satuan pendidikan dasar dan menengah	2.1.1.1	Penambahan jam belajar untuk materi keagamaan sesuai jenjang pendidikan
3	Memantapkan aksesibilitas pendidikan	3.1 Terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan. 3.2 Tersedianya sarana transportasi bagi guru dan siswa.	3.1.1 Memantapkan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan 3.2.1 Menyediakan sarana transportasi massal bagi guru dan siswa	3.1.1.1 Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan 3.1.1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 3.2.1.1 Penyediaan sarana transportasi massal dan biaya operasional yang cukup bagi guru dan siswa	

MISI. I

Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT.

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4	Meningkatkan Kualitas Keterampilan Angkatan Kerja	4.1 Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat	4.1.1 Meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja	4.1.1.1 Operasionalisasi dan peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja 4.1.1.2 Penerapan link and match BLK dengan dunia usaha
5	Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan olahraga	5.1 Meningkatkan prestasi atlet Simeulue. 5.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga di event regional, nasional dan internasional. 5.3 Terlaksananya event olahraga di Simeulue	5.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga 5.1.2 Meningkatkan pembinaan olah raga unggulan 5.2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan 5.2.2 Meningkatkan kesadaran olah raga prestasi masyarakat 5.2.3 Meningkatkan kesejahteraan atlet berprestasi di event regional, nasional dan internasional 5.3.1 Melaksanakan event olah raga unggulan	5.1.1.1 Menyelesaikan dan memfungsikan stadion olah raga sebagai pusat pengembangan olah raga Simeulue 5.1.2.1 Modernisasi sistem pembinaan olah raga unggulan 5.1.2.2 Peningkatan keikutsertaan olah raga unggulan dalam event-event regional, nasional dan Internasional 5.2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan 5.2.2.1 Peningkatan kesadaran olah raga prestasi masyarakat melalui sosialisasi manfaat olah raga 5.2.3.1 Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi atlet usia sekolah berprestasi 5.2.3.2 Penyediaan porsi lapangan kerja di pemerintahan dan dunia usaha bagi atlet berprestasi 5.3.1.1 Memfasilitasi pelaksanaan event olah raga unggulan. 5.3.1.2 Memanfaatkan event olahraga unggulan sebagai wahana pengembangan prestasi dan daya tarik wisata.

Tabel . 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 2

MISI. II					
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1. meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat serta ibu dan anak	1.1.1 peningkatan penanganan mslh gizi masy. Terutama gizi balita, dan mengurangi prevalensi gizi buruk balita dgn memperkuat institusi puskesmas dan posyandu	1.1.1.1	peningkatan kualitas penanganan gizi masyarakat	
			1.1.1.2	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak	
	1.2 Meningkatnya upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria dan Kusta	1.2.1 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeliharaan kesehatan mandiri masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.2.1.1	Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular	
	1.3 terlaksananya Program penyakit Tidak menular	1.3.1 meningkatkan upaya promotif dlm penanggulangan penyakit tidak menular	1.3.1.1	peningkatan pola hidup sehat masyarakat	
	1.4 Menurunnya beban gangguan jiwa terhadap individu, keluarga dan masyarakat	1.4.1 pemberdayaan masyarakat melalui promosi kesehatan jiwa	1.4.1.1	menurunnya status gangguan jiwa	
1.5 peningkatan kebiasaan pola hidup yang sehat, higiene yang baik dan pemeliharaan sanitasi lingkungan	1.5.1 Melakukan usaha promotif, preventif dan carta-cara hidup sehat dan intervensi lingkungan	1.5.1.1	Upaya menurunnya pencegahan penyakit berbasis lingkungan		
2 Meningkatkan kualitas dan pendapatan keluarga sejahtera	2.1 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Keluarga Berencana.	2.1.1 Peningkatan jangkauan layanan dan peningkatan kesadaran pentingnya keluarga berencana	2.1.1.1	Penyediaan layanan dan Informasi tentang Keluarga Berencana sampai ke desa	
	2.2 Meningkatnya keluarga sejahtera	2.2.1 terwujudnya keluarga yg mandiri	2.2.1.1	Penyediaan data keluarga sejahtera	
	2.3 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	2.3.1 Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak meningkatkan pendapatan keluarga	2.3.1.1	Penyediaan data perempuan dan anak terampilnya perempuan-perempuan di pedesaan	
3 meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau & bermutu	3.1 Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	3.1.1 Pemamfaatan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	3.1.1.1	Peningkatan kemampuan skill Tenaga kesehatan	
	3.2 Sarana dan tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan	3.2.1 Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	3.2.1.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	

MISI. II

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		3.3	terpenuhinya tenaga kesehatan yang strategis	3.3.1	memenuhi SDM kesehatan yang mencukupi dlm jumlah, jenis dan kualitasnya serta didistribusikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat	3.3.1.1	meningkatkan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan
		3.4	Setiap sarana kesehatan tersedia cukup obat esensial dan alat kesehatan dasar	3.4.1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	3.4.1.1	melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat
4	Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan dan program kemitraan	4.1	Peningkatan pelayanan spesialistik	4.1.1	Memenuhi Kebutuhan dokter Spesialis sesuai standar RS	4.1.1.1	Peningkatan jumlah dokter spesialis defenitif
		4.2	Peningkatan Ketersediaan obat dan alat kesehatan	4.2.1	Peningkatan perencanaan dan pengawasan pemakaian obat dan alat kesehatan	4.2.1.1	Memastikan pemakaian obat yang rasional dan pemeliharaan serta pengadaan alat kesehatan yang berkelanjutan
		4.3	Peningkatan SDM Kesehatan	4.3.1	Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang berkualitas dengan memantapkan sistim pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal dengan mempermudah akses SDM kesehatan untuk peningkatan kapasitas	4.3.1.1	Optimalisasi SDM kesehatan melalui perencanaan yg tepat, penempatan Nakes dan Peningkatan kapasitas sesuai dgn keahliannya dengan memberikan kesempatan DIKLAT untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
		4.4	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat dengan pemerataan pelayanan yang sama antara masyarakat mampu dan tidak mampu	4.4.1	Melaksanakan program-program kemitraan dalam bidang kesehatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta (program Jamkesmas, JKA, Askes dan Asuaransi lainnya)	4.4.1.1	Menjalin kemitraan dalam pembiayaan kesehatan rujukan
5	Pengembangan Rumah Sakit Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.1	Pembenahan Manajemen Pelayanan, Penunjang, Administrasi dan Keuangan sesuai dengan aturan BLUD	5.1.1	Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem BLUD dengan mengikuti diklat yang berhubungan dengan pengelolaan Rumah Sakit sebagai BLUD	5.1.1.1	Penyesuaian aturan -aturan yang ada dengan aturan-aturan baru yang sesuai dengan sistem pelayanan BLUD
6	Penambahan pelayanan ruang rawat jiwa dan VIP serta fasilitas lainnya	6.1	Pengembangan ruang lingkup pelayanan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	6.1.1	Menyiapkan daya dukung baik fasilitas maupun sumber daya manusianya dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dan VIP	6.1.1.1	Memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan masukan-masukan dari masyarakat
7	Peningkatan Manajemen Keperawatan	7.1	Meningkatkan skill dan sikap dalam melaksanakan tugas keperawatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat	7.1.1	melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan paramedis dalam melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur(SOP), Standar Pelayanan Minimal(SPM) Subyek Obyek Assesment Planing(SOAP)	7.1.1.1	Mendorong paramedis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik

Tabel . 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 3

MISI. III

Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah	1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi	1.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan, transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasi	1.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, transportasi laut, udara dan darat, perluasan cakupan layanan listrik, penyediaan irigasi, jalan, jembatan dan jaringan telekomunikasi.
		1.1.2 Mengefektifkan proses pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi	1.1.2.1 Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan serta pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
	1.2 Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memenuhi standar kesehatan	1.2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memenuhi standar kesehatan	1.2.1.1 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni terutama bagi kaum dhuafa
			1.2.1.2 Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, serta pengelolaan persampahan dan limbah permukiman yang baik.
	1.3 Tersedianya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	1.3.1 Menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	1.3.1.1 Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
1.4 Berkurangnya dampak resiko bencana alam dan Bencana Kebakaran	1.4.1 Meminimalisir dampak bencana alam dan Bencana Kebakaran	1.4.1.1 Penyiapan dokumen dan regulasi tentang kebencanaan, Pengelolaan daerah aliran sungai dan daerah rawan longsor, pengendalian banjir, penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana serta pencegahan dan penganggulangan bencana kebakaran	
2 Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang/Kawasan	1.5 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.5.1 Meningkatkan pemahaman sadar lingkungan dan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan	1.5.1.1 Peningkatan kegiatan penghijauan, pemantauan lingkungan serta perlindungan sumber daya alam
		2.1 Terkendalinya pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah	2.1.1 Menyusun dokumen dan regulasi tentang penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, sosialisasi RTRW
			2.1.1.1 Percepatan lahirnya regulasi tentang penataan ruang serta penyiapan sumber daya manusia dibidang penataan ruang

Tabel . 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 4

MISI. IV			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.	1.1.1 Merestrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	1.1.1.1 Restrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan terkini Pemerintahan Kabupaten Simeulue
	1.2 Meningkatnya disiplin dan Kapasitas SDM Aparatur.	1.2.1 Peningkatan fungsi dan peran aparatur pemerintah sesuai dengan kapasitas aparatur	1.2.1.1 Menerapkan sistem reward and punishment, dan penempatan sdm sesuai dengan kapasitas dalam struktur kelembagaan
2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	2.1.1 Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	2.1.1.1 Mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
3 Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	3.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	3.1.1 Pemetaan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi meningkatkan PAD, memunculkan sumber-sumber PAD baru, efisiensi pembiayaan melalui PAD	3.1.1.1. Pemetaan, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
			3.1.1.2 Efisiensi penggunaan keuangan daerah
4 Mewujudkan penataan dan Pengelolaan data dan Informasi Daerah	4.1 Pengelolaan kearsipan dan data daerah yang baik	4.1.1 Menyusun sistem pengelolaan arsip dan data daerah	4.1.1.1 Penyusunan sistem pengelolaan arsip dan data daerah serta penyediaan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem.
5 Meningkatkan Kehidupan Demokrasi dan Supremasi Hukum	5.1 Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan ham	5.1.1 Meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman demokrasi dan ham	5.1.1.1 Peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pemahaman akan hak perempuan dan anak dalam keseimbangan jender , peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	5.2 Penegakan syariah Islam	5.1.2 Meningkatkan pemahaman dan penegakan nilai-nilai Islami	5.1.2.1 Sosialisasi qanun syariat Islam dan penegakan hukum syariat

Tabel . 6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 5

MISI .V			
Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta mendorong agar sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	1.1 Terbinanya dan optimalnya peranan pusat kajian Islam (Islamik center), Pesantren, TPA dan TQA.	1.1.1 Pembinaan dan optimalisasi peranan pusat kajian Islam (Islamik center), Pesantren, TPA dan TQA.	1.1.1.1 Mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian Islam, pesantren, TPA dan TQA
	1.2 Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama di masyarakat serta terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis rukun dan damai di kalangan umat beragama.	1.2.1 Mengoptimalkan peran MPU, MAA dan Petugas Keagamaan.	1.2.1.1 Peningkatan peran MPU MAA, petugas keagamaan dalam upaya pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai agama Islam
2 Revitalisasi sarana ibadah	2.1 Tersedianya sarana ibadah yang nyaman bagi masyarakat	2.1.1 Menyediakan sarana ibadah yang nyaman bagi masyarakat	2.1.1.1 Penyediaan saran ibadah yang nyaman
		2.1.2 Meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan dan menyediakan saran pendukung kegiatan kemasyarakatan di rumah-rumah ibadah	2.1.2.1 Peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan 2.1.2.2 Penyediaan sarana pendukung kegiatan di rumah-rumah ibadah
3 Melestarikan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	3.1 Pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	3.1.1 melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pembangunan	3.1.1.1 Pendokumentasian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
		3.1.2 Pelaksanaan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah	3.1.1.2 Pengenalan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sejak dini melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah
4 Meningkatkan keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan masyarakat berkebutuhan khusus	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang peka terhadap pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.	4.1.1 Penyediaan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus	4.1.1.1 Menyediakan fasilitas pendukung akses pelayanan pemerintah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus

Tabel . 6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Yang Merupakan Penjabaran dari Misi 6

MISI. VI			
Menggal dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1 Meningkatkan Investasi dan Perluasan Lapangan Kerja dengan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu	1.1 Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1.1.1 Penciptaan Iklim Investasi yang mampu mengembangkan potensi produk unggulan daerah	1.1.1.1 Meningkatkan promosi kerjasama dan pelayanan Investasi/penanaman modal
	1.2 Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan Kawasan strategis dan cepat Tumbuh	1.2.1 Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	1.2.1.1 Mengarahkan investasi untuk pengembangan Agropolitan, Minapolitan dan wisata bahari

MISI.7

Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian arti luas, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas lapangan usaha.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1 Meningkatkan peranan ekonomi pedesaan dalam perekonomian daerah.	1.1 Meningkatnya kapasitas koperasi, UKM	1.1.1 Peningkatan peran koperasi dan UKM dalam pembangunan ekonomi kerakyatan	1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan koperasi dan UKM, terutama yang berbasis pemberdayaan perempuan
2 Memperkuat peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak utama perekonomian daerah	2.1 Penguatan peran sektor pertanian dan industri sebagai penggerak perekonomian utama daerah dalam menyokong pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh	2.1.1 Peningkatan produksi dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan 2.1.2 Peningkatan Ketahanan Pangan 2.1.3 Meningkatnya produksi dan daya saing peternakan 2.1.4 Peningkatan nilai tambah produk kehutanan non kayu 2.1.5 Peningkatan produksi dan daya saing hasil perikanan 2.1.6 Tumbuh dan berkembangnya sektor industri berbasis pertanian.	2.1.1.1 Meningkatkan produksi dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan 2.1.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan 2.1.3.1 Meningkatkan produksi dan daya saing peternakan 2.1.4.1 Meningkatkan nilai tambah produk kehutanan non kayu 2.1.5.1 Meningkatkan produksi dan daya saing hasil perikanan 2.1.6.1 Menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri berbasis pertanian.
3 Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah	3.1 Meningkatnya kinerja perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok Simeulue 3.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan	3.1.1 Peningkatan kinerja perdagangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok Simeulue 3.2.1 Peningkatan kunjungan wisatawan	3.1.1.1 Menjaga stabilitas suplai bahan-bahan kebutuhan pokok 3.2.1.1 Mengembangkan dan mempromosikan objek wisata religi dan peninggalan sejarah di Kabupaten Simeulue

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

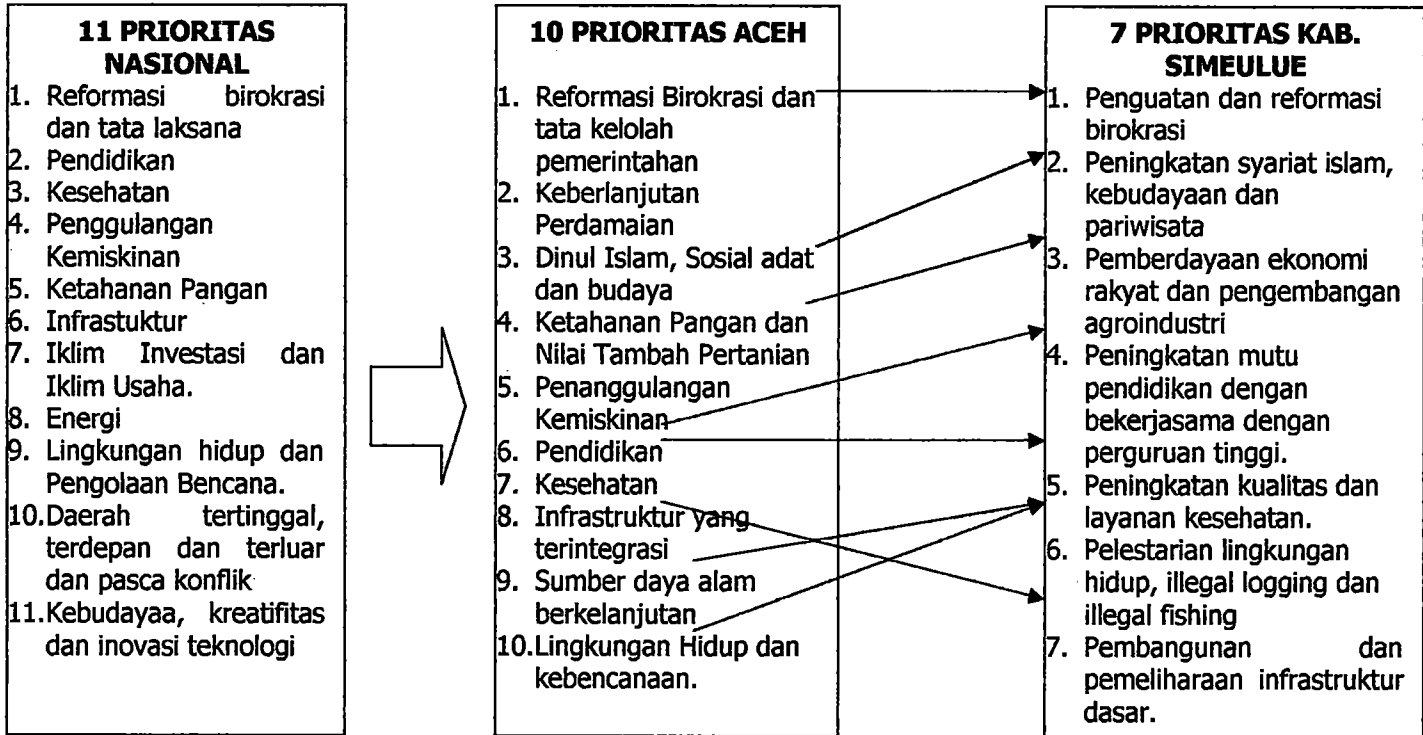
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue, harus memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kabupaten Simeulue mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1. Penguatan dan reformasi birokrasi, dengan focus
 1. Peningkatan tata pemerintahan yang baik.
 2. Peningkatan kesetaraan gender
 3. Pembenahan sistem Pemerintahan Desa dan Mukim.
 4. Peningkatan SDM Aparatur yang profesional dan kompeten.
 5. Peningkatan PAD, Pengelolaan aset dan sistem keuangan daerah
 6. Perbaikan fungsi PDAM
 7. Pelaksanaan tender proyek sistem satu atap (ULP).
2. Peningkatan syariat islam, kebudayaan dan pariwisata.
 1. Melaksanakan syariat islam.
 2. Meningkatkan kepariwisataan daerah.
 3. Mengembangkan budaya daerah.
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan agroindustri
 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah
 2. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
 3. Pembangunan pabrik kelapa sawit, pabrik penggilingan padi, pabrik sabuk kelapa, pabrik sagu dan lain-lain yang memungkinkan sesuai kebutuhan.
 4. Peningkatan produksi pertanian sekaligus memfasilitasi pemasaran hasil produksi masyarakat.
 5. Pengembangan blk dan pusdiklat bagi aparatur
4. Peningkatan mutu pendidikan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi di Aceh dan Nasional, dengan fokus :
 1. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas.
 2. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
 3. Pemerataan tenaga pendidik

4. Pembangunan perguruan tinggi bekerjasama dengan UNSYIAH atau Universitas lainnya.
5. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan, dengan focus
 1. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
 2. Meningkatkan SDM petugas medis.
6. Pelestarian lingkungan hidup, illegal logging dan illegal fishing
 1. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
 2. Melakukan pengawasan terhadap kekayaan laut dan hasil hutan yang ada di Kabupaten Simeulue.
 3. Pelestarian lingkungan hidup serta pencegahan ilegal logging dan ilegal fishing
7. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Dengan fokus
 1. Pembangunan dan Pemeliharaan moda transportasi
 2. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan.
 4. Penguatan mitigasi bencana
 5. Penataan kawasan tata ruang.
 6. Penuntasan jalan lingkar Simeulue.
 7. pembangunan Mesjid Kabupaten.
 8. Infrastruktur dan Jaringan listrik menjangkau desa-desa.
 9. Sarana telekomunikasi menjangkau seluruh kecamatan.

Berikut gambaran keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Simeulue disandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional sedangkan Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut secara detail dijelaskan dalam program pembangunan, dapat dilihat pada tabel 7.1 s/d 7.7:

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE, PROVINSI ACEH DAN NASIONAL



Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Terampil, Menguasai Teknologi serta Memiliki Kepribadian yang Terpuji Bertaqwa kepada ALLAH SWT.

Arah kebijakan		Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan	SKPK terkait
1.1.1	Operasionalisasi dan peningkatan fungsi Balai Latihan Kerja	Terlaksananya pelatihan-pelatihan bagi warga Simeulue termasuk perempuan	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi
1.1.2	Penerapan link and match BLK dengan dunia usaha	Adanya link and match BLK dengan dunia usaha	Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja	Tenaga Kerja	Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi
1.1.1	Tersedianya fasilitas olah raga yang memadai	Menyelesaikan dan memfungsikan stadion olah raga	Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga	Disbudparpora
1.2.1	Modernisasi sistem pembinaan olah raga unggulan	Adanya sistem pembinaan yang modern dan prestasinya meningkat	Pemuda dan Olahraga	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	
1.2.2	Peningkatan keikutsertaan olah raga unggulan dalam event-event regional, nasional dan internasional	Jumlah turnamen yang diikuti meningkat	Pemuda dan Olahraga	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	
1.2.3	Meningkatkan kesadaran olah raga prestasi masyarakat	Adanya bibit-bibit unggul untuk cabang olahraga unggulan Simeulue	Pemuda dan Olahraga	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	
2.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan	Tersedianya sarana olahraga di setiap kecamatan	Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga	BKPP
2.3.1	Penyediaan beasiswa pendidikan lanjutan bagi atlit usia sekolah berprestasi	Terlaksananya event olah raga unggulan secara reguler di Kab. Simeulue	Pemuda dan Olahraga	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	
2.3.2	Penyediaan porsi lapangan kerja di pemerintahan dan dunia usaha bagi atlit berprestasi		Kepegawaian	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
3.1.1	Memfasilitasi pelaksanaan event olah raga unggulan.		Pemuda dan Olahraga	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	
3.1.2	Memfaatkan event olahraga unggulan sebagai wahana pengembangan prestasi dan daya tarik wisata.		Pemuda dan Olahraga	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga	

MISI. II
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan
1.1.1.1	peningkatan kualitas penanganan gizi masyarakat Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak	1.1.1.1 a	Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		1.1.1.1 b		Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan, bayi dan anak
1.2.1.1	Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular	1.2.1.1.a	Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.3.1.1	peningkatan pola hidup sehat masyarakat Menurunnya status gangguan jiwa Upaya menurunnya pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan peningkatan pengawasan air dan lingkungan	1.3.1.1.a	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
				Program Kesehatan Jiwa
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat
2.1.1.1	Penyediaan layanan dan informasi tentang Keluarga Berencana sampai ke desa	2.1.1.1.a	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Keluarga Berencana
		2.1.1.1.b	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Program Pelayanan Kontrasepsi

MISI II
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Arah Kebijakan		Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan
		2.1.1.1.c	Cakupan Layanan Informasi dan konseling KRR 75%	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Konseling KRR
2.2.1.1	Penyediaan data keluarga sejahtera	2.2.1.1.a	meningkatnya persentase keluarga sejahtera	Program Keluarga Berencana
	Penyediaan data perempuan dan anak		tersedianya data pekerja perempuan dan anak	
	terampilnya perempuan-perempuan di pedesaan		Terbentuknya kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dari 31 kelompok menjadi 56 kelompok	
3.1.1.1	Peningkatan kemampuan skill tenaga kesehatan	3.1.1.1.a	Meningkatnya skill tenaga kesehatan dari 54 orang Menjadi 254 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.2.1.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan		Adanya data dasar standar pelayanan kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
3.3.1.1	meningkatkan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	3.3.1.1.a	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
			Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.4.1.1	melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat	3.4.1.1.a	Peningkatan mutu pengadaan obat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4.1.1.1	Peningkatan jumlah dokter spesialis defenitif	4.1.1.1.a	jumlah dokter spcialis yang defenitif dari 1 orang Menjadi 6 orang	Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
4.2.1.1	Memastikan pemakaian yang rasional dan pemeliharaan alat kesehatan yang rutin	4.2.1.1.a	dari belum optimal menjadi optimal	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
			Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
			Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

MISI. II
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik dan menyeluruh.

Arah Kebijakan			Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan
4.3.1.1	Menetapkan skala prioritas tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit	4.3.1.1.a	Nakes yang mempunyai sertifikasi keahlian dari 30% menjadi 70%	Kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4.4.1.1	Menjalin kemitraan dalam pembiayaan kesehatan rujukan	4.4.1.1.a	Dari kemitraan dengan program pemerintah menjadi kemitraan selain program pemerintah (swasta)	Kesehatan	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5.1.1.1	Penyesuaian aturan -aturan yang ada dengan aturan-aturan baru yang sesuai dengan sistem pelayanan BLUD	5.1.1.1.a	Perlu adanya aturan tentang BLUD	Hukum	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
6.1.1.1	Memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan masukan-masukan dari masyarakat	6.1.1.1.a	Belum operasional menjadi operasional	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7.1.1.1	Mendorong paramedis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik	7.1.1.1.a	Indek Kepuasan Masyarakat dari 75% menjadi 90%	Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tabel . 7.3 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Bidang Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 3

MISI. III					
Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana					
Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan		
1.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, transportasi laut, udara dan darat, perluasan cakupan layanan listrik, penyediaan irigasi, jalan, jembatan dan jaringan telekomunikasi.	1.1.1.1 a	Peningkatan fasilitas gedung pemerintah dari 69 % menjadi 76,19 %	Pemerintahan Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	1.1.1.1 b	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan 40,00 % menjadi 73,00 %	Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
	1.1.1.1 c	Peningkatan keamanan lalu lintas jalan (alat pengendali dan pengaman jalan, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas) dari 43,00 % menjadi 87,00 %	Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
			Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	
	1.1.1.1 f	Perluasan cakupan layanan listrik dari 77,18% menjadi 100,00 %	Perhubungan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	
			Perhubungan	Program Peningkatan Kelaiikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
	1.1.1.1 g	Peningkatan persentase irigasi dalam kondisi baik dari 39,40 % menjadi 65,00 %; Peningkatan panjang saluran irigasi dari 32.619 m menjadi 50.000 m	Energi dan Sumber Daya Mineral	Program peningkatan pelayanan Angkutan	
	1.1.1.1 h	Perluasan cakupan layanan telekomunikasi dari 85,00 % menjadi 97,00%	Pekerjaan Umum	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrikian	
	1.1.1.1 i	Peningkatan panjang jalan lingkur Simeulue dalam kondisi baik (teraspal) dari 43,00 % menjadi 95,00 %	Komunikasi & Informatika	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengaliran lainnya	
	1.1.1.1 j	Peningkatan jembatan lingkur Simeulue dalam kondisi baik dari 71,00 % menjadi 95,00 %	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	1.1.1.1 k	Tersedianya update data base jalan dan jembatan		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
	1.1.2.1 Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan serta pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	1.1.1.1 l	Meningkatnya dan terpediharanya sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		1.2.1.1 a	Meningkatnya aparatur pemerintah yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa dari 40 orang menjadi 90 orang	Pekerjaan Umum	Program pengembangan data dan informasi
1.2.1.1 b		Meningkatnya peran ULP terhadap proses pengadaan barang/jasa pemerintah dari 70 % menjadi 100 % serta terlaksananya sistem E-procurement pada proses pengadaan barang/jasa	Pekerjaan Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
1.2.1.1 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni terutama bagi kaum dhuafa	1.2.1.1 c	Terlaksananya pengawasan kegiatan konstruksi prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum	Pembangunan	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	1.2.1.1 a	Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi kaum dhuafa 60 %	Pembangunan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1.2.1.2 Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, serta pengelolaan persampahan dan limbah permukiman yang baik.	1.2.1.1 b	Terehabilitasinya rumah kaum dhuafa yang belum layak huni hingga 60 %	Pekerjaan Umum dan Pembangunan	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	
	1.2.1.1 a	Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni bagi kaum dhuafa 60 %	Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	
	1.2.1.1 b	Terehabilitasinya rumah kaum dhuafa yang belum layak huni hingga 60 %	Perumahan	Program Pembinaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	
1.2.1.2 Penyediaan sarana jalan /jembatan, air bersih, serta pengelolaan persampahan dan limbah permukiman yang baik.	1.2.1.2 a	Peningkatan persentase jalan desa / lingkungan permukiman dengan kondisi baik (aspal/perkerasan) dari 6,28 % menjadi 20,00 %	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Perumahan	
	1.2.1.2 b	Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum dari 13,95 % menjadi 20,00%	Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	
			Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah	

MISI. III				
Mewujudkan sarana dan prasarana Infrastruktur daerah dalam rangka pemenuhan layanan umum dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tanggap bencana				
Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan	
	1.2.1.2 c	Peningkatan kapasitas air baku untuk air minum dari 50 iter/detik menjadi 500 liter/detik	Pekerjaan Umum	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	1.2.1.2 d	Meningkatnya tingkat layanan sanitasi/air limbah dari 64,44 % menjadi 75,00%	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
	1.2.1.2 e	Meningkatnya tingkat layanan persampahan dari 49,48 % menjadi 60,00%	Lingkungan Hidup & Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampahan
1.3.1.1	1.2.1.2 f	Terbangunya saluran drainase lingkungan permukiman yang baik sejumlah 20 % dari ruas jaringan jalan lingkungan/desa	Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong
	1.3.1.1 a	Meningkatnya luasan RTH kawasan perkotaan dari 2,54 % menjadi 10 %	Lingkungan Hidup & Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.4.1.1	1.4.1.1 a	Tersedianya dokumen dan regulasi tentang kebencanaan serta Peningkatan sarana dan prasarana penangan kebencanaan	Penanggulangan Bencana	Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan
	1.4.1.1 b	Terbangunya tanggul/bronjong dinding sungai yang rawan longsor dari 3.000 m menjadi 5.000 m serta normalisasi sungai sepanjang 1000 m	Pekerjaan Umum & Kebencanaan	Program Pengendalian Banjir
	1.4.1.1 d	Tersedianya jalur dan ruang evakuasi yang dapat mengcover seluruh wilayah sekitar rawan bencana	Pekerjaan Umum	Program Pembangunan Turap Talud dan Bronjong
	1.4.1.1 e	Tersedianya logistik serta operasional pencarian dan evakuasi korban yang memadai	Pekerjaan Umum	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
	1.4.1.1 f	Tersedianya sarana dan prasarana bagi korban bencana alam	Penanggulangan Bencana	Program Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini dan Tanggap Darurat Bencana
	1.4.1.1 g	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana pemerintah, sarana umum dan perumahan penduduk	Penanggulangan Bencana	Program Kemitraan/LSM dan Sektor Swasta dalam penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
	1.4.1.1 h	Pengurangan resiko dan dampak dari bencana kebakaran	Dinas Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
	1.4.1.1 i	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana pemerintah, sarana umum dan perumahan penduduk	Penanggulangan Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
	1.4.1.1 j	Pengurangan resiko dan dampak dari bencana kebakaran	Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	1.5.1.1	1.5.1.1 a	Terpantaunya kualitas lingkungan secara berkelanjutan	Lingkungan Hidup
1.5.1.1 b		Peningkatan luasan penghijauan wilayah sungai dan pantai dari 5 ha menjadi 15 ha	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2.1.1.1	2.1.1.1 a	Tersedianya qanun RTRWK, RDTRK, Zona Regulasi, RTBL ; Terwujudnya penataan kota Sinabang yang baik.	Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang
	2.1.1.1 b	Peningkatan jumlah Tenaga PPNS menjadi 10 orang	Penataan Ruang	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

MISI. IV

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat

	Kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan	SKPK Pelaksana
1.1.1.1	Restrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai dengan kebutuhan terkini Pemerintahan Kabupaten Simeulue, penempatan sdm sesuai dengan kapasitas dalam struktur kelembagaan	1.1.1.1 a tersedianya dokumen analisis jabatan untuk 35 SKPK 1.1.1.1 b Terisinya semua jabatan struktural 1.1.1.1 c Terlaksananya kegiatan kantor dengan baik dan lancar	Kepegawaian Kepegawaian Pemerintahan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Kedinasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.2.1.1	Menerapkan sistem reward and punishment.	1.2.1.1 a meningkatnya kehadiran pegawai mencapai 75%	Kepegawaian		
2.1.1.1	Mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	2.1.1.1 a penyelesaian dokumen LAKIP, LKPJ dan LPPD tepat waktu 2.1.1.1 b Terlaksananya proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	
3.1.1.1	Pemetaan, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	3.1.1.1 a ketersediaan peta sumber-sumber pendapatan asli daerah meningkatnya PAD menjadi 100 %	Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3.1.1.2	Efisiensi penggunaan keuangan daerah	3.1.1.2.a Pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada analisis standar biaya	Pemerintahan Umum		
4.1.1.1	Penyusunan sistem pengelolaan arsip dan data daerah serta penyediaan sarana prasana dan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem.	4.1.1.1 a Tersedianya Bank Data Kabupaten 4.1.1.1 b Tersediaan aplikasi data base 4.1.1.1 c tersedianya arsiparis dan pengelola aplikasi data base 4.1.1.1 d Tersedianya kantor Arsip dan Pustaka Daerah	Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Kearsipan Kearsipan	Program Pengembangan Data/Informasi Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	

MISI. IV

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta mendapat kepercayaan dari masyarakat

Kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan	SKPK Pelaksana
5.1.1.1 Peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pemahaman akan hak perempuan dan anak dalam keseimbangan gender, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	5.1.1.1 a Penurunan tingkat kriminalitas, kasus hukum, KDRT, Pelecehan dan kekerasan terhadap anak	Pemberdayaan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
	5.1.1.1 b meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat akan tertib berlalu lintas	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Kereserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	
	5.1.1.1 c terlaksannya Sosialisasi Undang-Undang tentang KDRT dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	5.1.1.1 d Adanya Lembaga pendamping bagi korban KDRT dan Perlindungan anak	Pemberdayaan Perempuan	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbangpol Linmas
	5.1.1.1.e Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	politik	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kesbangpol Linmas
	5.1.1.1.e Jumlah pembinaan politik daerah		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Kesbangpol Linmas
5.1.2.1 Sosialisasi qanun syariat Islam dan penegakan hukum syariat	5.1.2.1 a Terlaksananya Sosialisasi Qanun-qanun syariat Islam	Syariat Islam	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesbangpol Linmas
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol Linmas
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesbangpol Linmas
			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
			Program Pembinaan Syariat Islam	

Tabel . 7.5 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Bidang Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 5

MISI .V			
Mendorong terlaksananya pembangunan mental spritual masyarakat melalui kegiatan sosial, keagamaan, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah serta mendorong agar sarana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat pembinaan umat.			
Kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan
1.1.1.1 Mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian Islam, pesantren, TPA dan TQA	1.1.1.1 a Tumbuhnya pusat-pusat kajian Islam	Syariat Islam	Program Pembinaan Sosial Keagamaan
	1.1.1.1 b Meningkatnya jumlah santri pada pesantren, TPA dan TOA	Syariat Islam	Program Pembinaan Syariat Islam
	1.1.1.1 c Meningkatnya jumlah TPA dan TQA	Syariat Islam	
1.2.1.1 Peningkatan peran MPU, MAA, petugas keagamaan dalam upaya pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai agama Islam	1.2.1.1. a Adanya kegiatan pengawasan terhadap penyebaran aliran sesat	Syariat Islam	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
	1.2.1.1 b Adanya kegiatan penyesuaian antara adat dan agama	Syariat Islam	
2.1.1.1 Penyediaan sarana ibadah yang nyaman	2.1.1.1 a Meningkatnya sarana ibadah	Syariat Islam	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
2.1.2.1 Peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan	2.1.2.1 a Meningkatnya penggunaan rumah ibadah sebagai pusat kegiatan masyarakat	Syariat Islam	
2.1.2.2 Penyediaan sarana pendukung kegiatan di rumah-rumah ibadah	2.1.2.2 a Tersedianya sarana pendukung kegiatan ibadah dan kegiatan kemasyarakatan di rumah-rumah ibadah	Syariat Islam	
3.1.1.1 Pendokumentasian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	3.1.1.1 a Terlaksananya loka karya budaya Simeulue	Sosial Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	3.1.1.1 b Tersedianya dokumentasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Sosial Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3.1.1.2 Pengenalan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sejak dini melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah	3.1.1.2 a Terlaksananya festival budaya Simeulue dan Budaya Aceh	Sosial Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4.1.1.1 Menyediakan fasilitas pendukung akses pelayanan pemerintah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus	4.1.1.1 a Adanya fasilitas pendukung akses pelayanan pemerintahan bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus	Sosial Budaya	Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
	4.1.1.1 b Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi anak yatim dan fakir miskin	Sosial Budaya	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

Tabel . 7.6 Arah Kebijakan, Indikator Kinerja, Bidang Pembangunan dan Program Pembangunan dari Misi 6

MISI. VI			
Menggali dan Mengelola potensi Sumber Daya Alam melalui hubungan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.			
Arah kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan
1.1.1.1 Meningkatkan promosi kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal	1.1.1.1 a Adanya kegiatan promosi sektor-sektor unggulan yang membutuhkan investasi	Penanaman Modal	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah
	1.1.1.1 b Adanya kerjasama pengembangan sektor-sektor unggulan antara pemda dan pihak lain	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	1.1.1.1 c Meningkatnya jumlah investasi di Simeulue	Koperasi Usaha Kecil Menengah	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.2.1.1 Mengarahkan investasi untuk pengembangan Agropolitan, Minapolitan dan wisata bahari	1.2.1.1 a Tumbuhnya agropolitan, minapolitan dan wisata bahari	Perencanaan Pembangunan	Program Peningkatan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

MISI.7

Melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata dalam rangka memperluas lapangan usaha.

Arah kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Progam Pembangunan	SKPK
<p>1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan koperasi dan UKM, terutama yang berbasis pemberdayaan perempuan</p>	<p>1.1.1.1 a Meningkatnya aktivitas koperasi dan ukm terutama yang berbasis perempuan</p>	<p>Bidang Ekonomi</p>	<p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah</p> <p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>Program Pengembangan Industri Kecil Menengah</p> <p>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</p>	<p>Disperindagkop</p> <p>Disperindagkop</p> <p>Disperindagkop</p> <p>Disperindagkop</p> <p>Disperindagkop</p>
<p>2.1.1.1 Meningkatkan produksi dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan</p>	<p>2.1.1.1 a Meningkatnya jumlah produksi sektor pertanian dan perkebunan</p>	<p>Bidang Pertanian & Bidang Perkebunan</p>	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</p> <p>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</p> <p>Pemberdayaan Sosial dan penangg. kemiskinan</p> <p>Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial</p> <p>Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan</p>	<p>BKPP/DISHUTBUN</p> <p>BKPP/DIHUTBUN/DI STAN</p> <p>DISTAN/DISHUTBUN</p> <p>Dinsosnakertrans</p> <p>Dinsosnakertrans</p> <p>Dinsosnakertrans</p> <p>Dinsosnakertrans</p>
			<p>Prog. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</p>	<p>Dinsosnakertrans</p>

Arah kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan	SKPK
2.1.5.1 Meningkatkan produksi dan daya saing hasil perikanan	2.1.4.1 c Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi kehutanan non kayu 2.1.5.1 a Meningkatnya jumlah produksi sektor perikanan	Bidang Ekonomi Bidang Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DKP
2.1.6.1 Menumbuhkan dan mengembangkan sektor industri berbasis pertanian.	2.1.5.1 b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi perikanan 2.1.6.1 a Bertambahnya jumlah kilang padi 2.1.6.1 b Terbangunnya pabrik pengolahan minyak kelapa sawit	Bidang Perikanan Bidang Perikanan Bidang Perikanan Bidang Perikanan Bidang Perikanan Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian	Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	DKP DKP DKP DKP DKP DKP
3.1.1.1 Menjaga stabilitas suplai bahan-bahan kebutuhan pokok	3.1.1.1 a Terjaganya stabilitas harga	Bidang Ekonomi	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	DISPERINDAGKOP
3.2.1.1 Mengembangkan dan mempromosikan objek wisata religi dan peninggalan sejarah di Kabupaten Simeulue	3.2.1.1 a Adanya kegiatan promosi objek wisata religi dan peninggalan sejarah	Bidang Kebudayaan & Pariwisata	Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	

Arah kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Program Pembangunan	SKPK
			Prog. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
	2.1.1.1 b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektor pertanian dan perkebunan	Bidang Pertanian & Bidang Perkebunan		
2.1.2.1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	2.1.2.1 a Meningkatnya produksi pangan	Bidang Pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	DISTAN/BKPP
	2.1.2.1 b Stabilitasnya produksi pangan	Bidang Pertanian	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	BKPP
2.1.3.1 Meningkatkan produksi dan daya saing peternakan	2.1.3.1 a Meningkatnya jumlah produksi sektor peternakan	Bidang Peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	KESWANNAK
		Bidang Peternakan	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	KESWANNAK
		Bidang Peternakan	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	KESWANNAK
	2.1.3.1 b Semakin luasnya jangkauan pasar hasil produksi sektor peternakan	Bidang Peternakan	Program peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	KESWANNAK
2.1.4.1 Meningkatkan nilai tambah produk kehutanan non kayu	2.1.4.1 a Peningkatan keahlian pengolahan produk kehutanan non kayu	Bidang Kehutanan	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	DISHUTBUN
	2.1.4.1 b Meningkatnya jumlah produksi sektor kehutanan non kayu	Bidang Kehutanan		

Arah kebijakan	Indikator Kinerja	Bidang Pembangunan	Progam Pembangunan	SKPK
	3.2.1.1 b Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Bidang Kebudayaan & Pariwisata		

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPK terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPK. Pada tabel 8.1 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		target A SKPD Penang				
	Bidang Urusan Pemerintahan dan Progra	Indikator Kinerja Program (Outcon	Satuan	Kondisi Kinerja Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	BELANJA DAERAH					2823796242		4464374289		4188837412		4915212708		3646473004		20038693655		DINSOS
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1565160000		1565316516		1565473032		1565629548		1565786064		7827365160		
	BELANJA LANGSUNG					125866242		2899057773		2623364380		3349583160		2080686940		12211328495		
	Program Adminlstrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik				380416000		404662600		379066380		374570160		374573940		1913289080		
13 2 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur					62803000		312803000		62803000		62803000		62803000		564015000		
13 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah				18900000										18900000		
	Program peningkatan pengembangan sis pelaporan keuangan yang transparan					6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000		
13 2 15	Program Pemberdayaan fakir mskin, Kor Tersedianya sarana dan prasarana Penyanda		108	76		369935000	94	341570000	94	341570000	74	288125000	74	288125000	520	1629325000	628	
13 2 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ke	Meningkatnya kualitas karang taruna				0		76000		0		0		0		76000		
15 2 15	Pemberdayaan Sosial dan penanggulangr bantuan modal bagi UMKM					0		50000000		65000000		0		0		115000000		
13 2 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ke	terjalannya kerja sama pekerja sosial sebagai usaha peningkatan kesej				75000000		115000000		115000000		115000000		115000000		535000000		
13 2	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembaga	Terciptanya Tenaga kerja Terampil				0		0		205000000		205000000		205000000		615000000		
13 2 21	Pelestarian Kepahlawanan Kerintisan	Meningkatkan Kesejahteraan Kelu paket					30	30000000	35	30000000	40	30000000	45	30000000	150	120000000		
13 2 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					0		85125000		85125000		85125000		85125000		340500000		
13 2 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Tersedianya pelatihan komputer bagi anak terlantar				50000000		95000000		95000000		95000000		95000000		430000000		
13 2 19	Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Jompo					75000000		75000000		75000000		75000000		75000000		375000000		

TABEL 8.2

INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE 2013-2017

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH	Proporsi (%)	TAHUN					2017 TOTAL 5 (UMA) TAHUN	SKPK PENGANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017		
1		0.248044535	Belanja Tidak Langsung (BTL)	50898707120	54418773997	59223353622	64806246212	71304854064	3.00652E+11
	Penguatan dan reformasi birokrasi	0.138217393	Belanja Langsung (BL)	59895655650	60734025494	64944562081	62375716039	66069484158	3.14019E+11
		0.221738741	JUMLAH	1.10794E+11	1.15153E+11	1.24168E+11	1.27182E+11	1.37374E+11	6.14671E+11
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	20406648871	20406648871	20406648871	20406648871	20406648871	1.02033E+11 DPPKD
			Belanja Langsung (BL)	9011531363	9611701674	9201075056	8304622955	9888822904	46017753952 DPPKD
			JUMLAH	29418180234	30018350545	29607723927	28711271826	30295471775	1.48051E+11 JUMLAH
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	859079023	859079023	859079023	859079023	859079023	1475618086 SATPOL PP DAN WH
			Belanja Langsung (BL)	2100674525	2103461530	2169445936	2258627223	2363644768	10995853982 SATPOL PP DAN WH
			JUMLAH	2959753548	2962540553	3028524959	3117706246	3222723791	15291249097 SATPOL PP DAN WH
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	938925000	1126710000	1352052000	1622462400	1946954880	6987104280 ALAFAN
			Belanja Langsung (BL)	971917000	965182100	983118710	1040178481	1048114829	5008511120 ALAFAN
			JUMLAH	1910842000	2091892100	2335170710	2662640881	2995069709	11995615400 ALAFAN
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	0	0	0	0	0	0 SIMCUT
			Belanja Langsung (BL)	519705000	525164900	389605490	444696339	450294072.9	2329465802 SIMCUT
			JUMLAH	519705000	525164900	389605490	444696339	450294072.9	2329465802 SIMCUT
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	0	0	0	0	0	0 TEUPAH TENGAH
			Belanja Langsung (BL)	341860000	354200300	218290430	272995773	278169450.3	1465515953 TEUPAH TENGAH
			JUMLAH	341860000	354200300	218290430	272995773	278169450.3	1465515953 TEUPAH TENGAH
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	1582120762	1740332838	1914366122	2105802734	2316383008	9659005464 SIMEULUE BARAT
			Belanja Langsung (BL)	1435498600	1409766460	1433206106	1496175217	1510439038	7285085421 SIMEULUE BARAT
			JUMLAH	3017619362	3150099298	3347572228	3601977951	3826822046	16944090885 SIMEULUE BARAT
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	1638796000	1966555200	2359866240	2831839488	3398207386	12195264314 TEUPAH BARAT
			Belanja Langsung (BL)	1356685200	1270474720	1331417492	1347227541	1418212795	6724017749 TEUPAH BARAT
			JUMLAH	2995481200	3237029920	3691283732	4179067029	4816420181	18919282062 TEUPAH BARAT
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	1290668000	1381014760	1519116236	1671027860	1838130646	7699957501 SALANG
			Belanja Langsung (BL)	1577764000	1533866600	1555203260	1571908586	1590284445	7829026891 SALANG
			JUMLAH	2868432000	2914881360	3074319496	3242936446	3428415090	15528984392 SALANG

RPJMD KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012-2017

BAB VIII -

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH	Proporsi (%)	TAHUN				2017 TOTAL 5 (LIMA) TAHUN	SKPK PENGANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016		
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		1077086000	1292503200	1551003840	1861204608	2233445530	8015248178 TELUK DALAM
	Belanja Langsung (BL)		1196399000	1138125800	1122695471	1043918117	1180700713	5681839101 TELUK DALAM
	JUMLAH		2273485000	2430629000	2673699311	2905122725	3414146242	13697082278 TELUK DALAM
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		1869003870	2242804644	2691365573	3229638687	3875566425	13908379199 TEUPAH SELATAN
	Belanja Langsung (BL)		1607274505	1594063956	1612162351	1637797586	1653386745	8104685142 TEUPAH SELATAN
	JUMLAH		3476278375	3836868600	4303527924	4867436274	5528953170	22013064341 TEUPAH SELATAN
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		2233494000	2680192800	3216231360	3859477632	4631373158	16620768950 SIMEULUE TENGAH
	Belanja Langsung (BL)		275000000	239892000	246462200	266003220	288612902	1315970322 SIMEULUE TENGAH
	JUMLAH		2508494000	2920084800	3462693560	4125480852	4919986060	17936739272 SIMEULUE TENGAH
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		1451840000	1742208000	2090649600	2508779520	3010535424	10804012544 SIMEULUE TIMUR
	Belanja Langsung (BL)		1451840000	268506300	321921870	349931749	382785918.3	2774985837 SIMEULUE TIMUR
	JUMLAH		2903680000	2010714300	2412571470	2858711269	3393321342	13578998381 SIMEULUE TIMUR
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		1956632297	2093596558	2302956214	2533251835	2786577018	11673013922 INSPEKTORAT
	Belanja Langsung (BL)		1076466775	1351463830	1485739576	1646590631	1847981533	7408242346 INSPEKTORAT
	JUMLAH		3033099072	3445060388	3788695790	4179842466	4634558552	19081256267 INSPEKTORAT
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		1121065193	1233171712	1356488884	1492137772	1641351549	6844215110 KESBANGPOL LINMAS
	Belanja Langsung (BL)		16814317200	19347279720	18993699692	18969261661	19361379827	93485938101 KESBANGPOL LINMAS
	JUMLAH		17935382393	20580451432	20350188576	20461399433	21002731376	1.0033E+11 KESBANGPOL LINMAS
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		3735002565	3841776298	4610131558	5532157869	6638589443	24357657733 BKPP DIKLAT
	Belanja Langsung (BL)		1395633005	1868953680	1963600662	2076112341	2205475176	9509774864 BKPP DIKLAT
	Jumlah		5130635570	5710729978	6573732220	7608270211	8844064618	33867432597 BKPP DIKLAT
	Belanja Langsung (BL)		435000000	478500000	526350000	578985000	636883500	2655718500 ORTALA
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		7783101360	8561411496	9417552646	10359307910	11395238701	47516612113 UMUM
	Belanja Langsung (BL)		6772521251	6791694876	11312872464	7917313210	8582198031	41376599832 UMUM
	Jumlah		14555622611	15353106372	20730425109	18276621120	19977436732	88893211945 UMUM
	Belanja Langsung (BL)		700000000	770000000	847000000	931700000	1024870000	4273570000 BAG. HUKUM
	Belanja Langsung (BL)		1100000000	1173000000	1275300000	1387830000	1511613000	6447743000 BAG. HUMAS
	Belanja Tidak Langsung (BTL)		1610960980	1772057078	1949262786	2144189064	2358607971	9835077879 SETWAN
	Belanja Langsung (BL)		8732743985	6918729284	6881643756	7819959676	7720091687	38073168388 SETWAN
	Jumlah		10343704965	8690786362	8830906542	9964148740	10078699658	47908246267 SETWAN

TAHUN

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH	Proporsi (%)	2013	2014	2015	2016	2017 TOTAL 5 (LIMA) TAHUN	SKPK PENGANGGUNG JAWAB
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1344283199	1478711519	1626582671	1789240938	1968165032	8206983358 DISDUKCAPIL
		Belanja Langsung (BL)	1022824241	1019997765	1073751559	1013880732	1125522823	5255977120 DISDUKCAPIL
		Jumlah	2367107440	2498709284	2700334230	2803121670	3093687855	13462960478 DISDUKCAPIL
2		0.01619713 Belanja Tidak Langsung (BTL)	2926281076	3349761884	3844274372	4420145809	5091892590	19632355731
	Peningkatan syariat Islam, kebudayaan dan adat istiadat Aceh	0.026485544 Belanja Langsung (BL)	14639671842	9707396836	11090367819	10888174101	13847539511	60173150109
		0.028789322 Jumlah	17565952918	13057158719	14934642191	15308319910	18939432101	79805505840
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	69800000	74686000	82154600	90370060	99407066	416417726 BAITUL MAL
		Belanja Langsung (BL)	380569200	434383230	436342253	324477178.3	329630596.1	1905402457 BAITUL MAL
		Jumlah	450369200	509069230	518496853	414847238.3	429037662.1	2321820183 BAITUL MAL
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1329473000	1595367000	1914440000	2297328000	2756793000	9893401000 SYARIAT ISLAM
		Belanja Langsung (BL)	7247313000	2165967100	3153537810	2457852591	3601574750	18626245251 SYARIAT ISLAM
		Jumlah	8576786000	3761334100	5067977810	4755180591	6358367750	28519646251 SYARIAT ISLAM
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	85000000	93500000	102850000	113135000	124448500	518933500 MAA
		Belanja Langsung (BL)	358785871.5	382984458.7	421883904.5	398272295	427299524.5	1989226054 MAA
		Jumlah	443785871.5	476484458.7	524733904.5	511407295	551748024.5	2508159554 MAA
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	26800000	29480000	32428000	35670800	39237880	163616680 MPU
		Belanja Langsung (BL)	606918000	847355000	587293400	699197840	595610324	3336374564 MPU
		Jumlah	633718000	876835000	619721400	734868640	634848204	3499991244 MPU
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1415208076	1556728884	1712401772	1883641949	2072006144	8639986825 DISPORA
		Belanja Langsung (BL)	5225085770	4973607047	5497900452	5915623197	7691398217	29303614682 DISPORA
		Jumlah	6640293846	6530335931	7210302224	7799265146	9763404361	37943601507 DISPORA
		Belanja Langsung (BL)	821000000	903100000	993410000	1092751000	1202026100	5012287100 BAG. KEISTIMEWAAN
		Jumlah	821000000	903100000	993410000	1092751000	1202026100	5012287100 BAG. KEISTIMEWAAN
3		0.071831106 Belanja Tidak Langsung (BTL)	14899689571	15888841980	17343472244	18713383981	20220271240	87065659016
	Pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan pendapatan masyarakat	0.058638147 Belanja Langsung (BL)	17460897196	26288551967	26506751899	28688836901	34276388933	1.33221E+11
		0.079467148 Jumlah	32360586767	42177393947	43850224143	47402220882	54496660173	2.20287E+11
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1565160000	1565316516	1565473032	1565629548	1565786064	7827365160 DINSOS
		Belanja Langsung (BL)	1138054000	2621457773	2501364380	3162583160	1958686940	11382146253 DINSOS

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH	Proporsi (%)	TAHUN				2017 TOTAL 5 (LIMA) TAHUN	SKPK PENGANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016		
		Jumlah	2703214000	4186774289	4066837412	4728212708	3524473004	19209511413 DINSOS
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1569456436	1726402080	1899042288	2088946516	2297841168	9581688487 BPM
		Belanja Langsung (BL)	1467569925	1536622458	1390587861	1456056947	1394972942	7245810132 BPM
		Jumlah	3037026361	3263024537	3289630149	3545003463	3692814110	16827498620 BPM
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	2389199445	2628119390	2890931328	3180024461	3498026907	14586301532 DISBUN
		Belanja Langsung (BL)	4836790000	5157790000	4342770000	4489948000	4806943800	23634241800 DISBUN
		Jumlah	7225989445	7785909390	7233701328	7669972461	8304970707	38220543332 DISBUN
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1971494224	2109498820	2320448702	2552493572	2807742929	11761678246 DISTAN
		Belanja Langsung (BL)	1774896345	7852215614	8933858739	10823970488	14769979387	44154920573 DISTAN
		Jumlah	3746390569	9961714434	11254307440	13376464060	17577722316	55916598819 DISTAN
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	2092417281	2301659009	2761990811	3038189892	3342008881	13536265874 DISPERINDAGKOP
		Belanja Langsung (BL)	1712321851	1430179422	1581814049	1239314049	3347314049	9310943420 DISPERINDAGKOP
		Jumlah	3804739132	3731838431	4343804860	4277503941	6689322930	22847209294 DISPERINDAGKOP
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	655930620	721523682	793676050.2	873043655.2	960348020.7	4004522028 KPTSP
		Belanja Langsung (BL)	493130000	1299243000	795129500	743204650	840587315	4177294465 KPTSP
		Jumlah	1149060620	2020766682	1588805550	1622248305	1800935336	8181816493 KPTSP
		Belanja Langsung (BL)	800000000	880000000	968000000	1998250000	8428519498	13074769498 EKONOMI
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	2575584565	2755875485	3031463033	3334609336	3668070270	15365602689 BKPP PENYULUHAN
		Belanja Langsung (BL)	2433411409	2438270000	3252290000	3655250000	5095800000	16875021409 BKPP PENYULUHAN
		Jumlah	5008995974	5194145485	6283753033	6989859336	8763870270	32240624098 BKPP PENYULUHAN
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	2080447000	2080447000	2080447000	2080447000	2080447000	10402235000 DINKESWANNAK
		Belanja Langsung (BL)	3604723666	3952773700	3708937370	3112509607	2062104500	16441048843 DINKESWANNAK
		Jumlah	5685170666	6033220700	5789384370	5192956607	4142551500	26843283843 DINKESWANNAK
4		0.479141499 Belanja Tidak Langsung (BTL)	95138134284	1.04646E+11	1.15105E+11	1.26609E+11	1.39263E+11	5.80762E+11
	Peningkatan mutu pendidikan dengan bek	0.128328553 Belanja Langsung (BL)	48516611721	52688516929	57519458743	63335906082	69492254787	2.91553E+11
		0.314681896 Jumlah	1.43655E+11	1.57335E+11	1.72624E+11	1.89945E+11	2.08755E+11	8.72315E+11
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	94952134284	1.04447E+11	1.14892E+11	1.26381E+11	1.39019E+11	5.79692E+11 DINAS PENDIDIKAN
		Belanja Langsung (BL)	45857460763	49419978439	54299535283	59729368812	65702185693	2.75009E+11 DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah	1.4081E+11	1.53867E+11	1.69192E+11	1.86111E+11	2.04722E+11	8.54701E+11 DINAS PENDIDIKAN

TAHUN

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH	Proporsi (%)	2013	2014	2015	2016	2017 TOTAL 5 (LIMA) TAHUN	SKPK PENGANGGUNG JAWAB
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	186000000	199020000	212951400	227857998	243808057.9	1069637456 MPD
		Belanja Langsung (BL)	248313539	420870254	270848306	296605525.3	217065158.5	1453702783 MPD
		Jumlah	434313539	619890254	483799706	524463523.3	460873216.4	2523340239 MPD
		Belanja Langsung (BL)	2290255177	2570068236	2827075154	3122931746	3451003936	14261334248 BKPP DIKLAT
		Belanja Langsung (BL)	120582242	277600000	122000000	187000000	122000000	829182242 DINSOSNAKERTRANS
5		0.127044022 Belanja Tidak Langsung (BTL)	27401626218	29092711955	30436979399	32431600454	34625683615	1.53989E+11
	Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan	0.075368228 Belanja Langsung (BL)	32189563877	32965879895	33787023317	35376980287	36911457113	1.71231E+11
		0.117320842 Jumlah	59591190095	62058591850	64224002716	67808580741	71537140728	3.2522E+11
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1276709887	1404380876	1544818963	1699300860	1869230946	7794441531 PPKS
		Belanja Langsung (BL)	1644742380	1416077848	1122913566	1058306084	1075141802	6317181680 PPKS
		Jumlah	2921452267	2820458724	2667732529	2757606944	2944372748	14111623211 PPKS
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	10490768846	10490768846	10490768846	10490768846	10490768846	52453844230 RSUD
		Belanja Langsung (BL)	13459130000	13415053000	13454126100	13871445146	14027853701	68227607947 RSUD
		Jumlah	23949898846	23905821846	23944894946	24362213992	24518622547	1.20681E+11 RSUD
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	15634147485	17197562234	18401391590	20241530749	22265683824	93740315881 DINKES
		Belanja Langsung (BL)	17085691497	18134749047	19209983651	20447229057	21808461610	96686114862 DINKES
		Jumlah	32719838982	35332311280	37611375241	40688759805	44074145434	1.90426E+11 DINKES
6		0.016763144 Belanja Tidak Langsung (BTL)	3426618611	3926942333	4508830800	5186746960	3269276352	20318415056
	Pelestarian lingkungan hidup, illegal logging	0.047776045 Belanja Langsung (BL)	31298240371	23246028281	23492877296	21153750089	9352658407	1.08544E+11
		0.046486126 Jumlah	34724858982	27172970614	28001708096	26340497048	12621934758	1.28862E+11
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1576618611	1891942333	2270330800	2724396960	3269276352	11732565056 DKP
		Belanja Langsung (BL)	5869063371	6641018281	7272502296	3615940089	4059838407	27458362444 DKP
		Jumlah	7445681982	8532960614	9542833096	6340337048	7329114758	39190927499 DKP
		Belanja Langsung (BL)	150000000	165000000	181500000	1133100000	3146410000	4776010000 BAG. EKONOMI
		Belanja Langsung (BL)	20100000000	12110000000	12121000000	12133100000	2146410000	58610510000 KEHUTANAN
		Belanja Tidak Langsung (BTL)	1850000000	2035000000	2238500000	2462350000	2708585000	11294435000 BAPEDALSIHMAN
		Belanja Langsung (BL)	5179177000	4330010000	3917875000	4271610000	4239135000	21937807000 BAPEDALSIHMAN
		Jumlah	7029177000	6365010000	6156375000	6733960000	6947720000	33232242000 BAPEDALSIHMAN

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH	Proporsi (%)	TAHUN				2017 TOTAL 5 (LIMA) TAHUN	SKPK PENGANGGUNG JAWAB		
			2013	2014	2015	2016				
7		0.040978563	Belanja Tidak Langsung (BTL)	8164915278	8966339306	9846851011	10814285332	11877255530	49669646456	
	Pembangunan dan pemeliharaan Infrastru	0.211812745	Belanja Langsung (BL)	77338641220	98915532826	1.12029E+11	87028045724	1.05911E+11	4.81223E+11	
		0.191515926	Jumlah	85503556498	1.07882E+11	1.21876E+11	97842391056	1.17788E+11	5.30892E+11	
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	3017524000	3319276400	3651204040	4016324444	4417956888	18422285772	PU
			Belanja Langsung (BL)	60996564000	79926501124	98724248168	70371437327	76561390202	3.8658E+11	PU
			Jumlah	64014088000	83245777524	1.02375E+11	74387761771	80979347090	4.05002E+11	PU
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	502250000	537407500	575026025	615277846.8	658347296	2888308668	BPBD
			Belanja Langsung (BL)	2520000000	2556510000	1953500000	1881589000	1682786900	10594385900	BPBD
			Jumlah	1.26812E+11	1.39493E+11	1.53443E+11	1.68787E+11	1.85665E+11	13482694568	BPBD
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	2326982834	2559681117	2815649229	3097214152	3406935567	14206462900	BAPPEDA
			Belanja Langsung (BL)	5199219200	5129931120	5952354232	4922669655	6378414121	27582588328	BAPPEDA
			Jumlah	1.26812E+11	1.39493E+11	1.53443E+11	1.68787E+11	1.85665E+11	41789051228	BAPPEDA
			Belanja Langsung (BL)	1150000000	1265000000	1391500000	3397550000	16198193996	23402243996	EKONOMI
			Belanja Langsung (BL)	1285000000	1363500000	1449850000	1594835000	1754318500	7447503500	BAG. PEMBANGUNAN
			Belanja Langsung (BL)	5009750000	7578300000	1406130000	3646743000	1701417300	19342340300	OTDA
			Belanja Tidak Langsung (BTL)	2318158444	2549974288	2804971717	3085468889	3394015778	14152589116	DISHUBKOMINTEL
			Belanja Langsung (BL)	1178108020	1095790582	1151710182	1213221742	1634474458	6279304984	DISHUBKOMINTEL
			Jumlah	3496266464	3645764870	3956681899	4298690631	5028490236	20425894100	DISHUBKOMINTEL
			1 Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.02856E+11	2.2029E+11	2.40309E+11	2.62982E+11	2.85652E+11	1.21209E+12	
		0.686626655	Belanja Langsung (BL)	4.05143E+11	4.37015E+11	4.71113E+11	4.60512E+11	4.98142E+11	2.27192E+12	
				1.23803E+11	1.3247E+11	1.41742E+11	1.51664E+11	1.62281E+11	1.73641E+11	8.85601E+11
TOTAL		1		4.84195E+11	5.24836E+11	5.69679E+11	5.71829E+11	6.21513E+11	2.77205E+12	2.6568E+11
										6.19921E+11

SKPK

RSUD
URUSAN WAJIB

Dalam Rupiah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE 1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Ou Satuan 2	3	4	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		target Akhl SKPD Penang				
				Kondisi Kir		APBK		APBK		APBK		APBK		APBK		APBK		17	18	19
				Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)				
	TOTAL BELANJA			972	979	23949898846	979	23905821846	938	23944894946	938	24362213992	938	24518622547	823	1.20681E+11	1795			
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			823	823	10490768846	823	10490768846	823	10490768846	823	10490768846	823	10490768846	823	52453844230	1646	RSUD Simeul		
5	BELANJA LANGSUNG (BL)					13459130000		13415053000		13454126100		13871445146		14027853701		68227607947	0			
02 01	Program Pelayanan Administrasi Perk Meningkatnya Pelayanan Kantor			149	156	4669130000	156	4794803000	115	4880626100	115	4950831510	115	5053957461	0	24349348071	149			
02 02	Program Peningkatan Sarana dan Pra terpeliharanya sapras kantor			174	174	932500000	164	844250000	164	891000000	164	958363636.4	164	1031851240	164	4657964876	338			
02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparat tersedianya pakaian dinas					156500000		0				156500000				313000000	0			
														0	0	0	0			
02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penang					100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		500000000	0			
02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sar Terlaksananya Pengadaan Ala thn			1		950000000		1110000000		1160500000		1326550000		1404205000		5951255000	1			
																	0			
02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Pr Terpeliharanya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit					325000000		330000000		336000000		343200000		351840000		1686040000	0			
																	0			
02 05	Program peningkatan kapasitas sumb Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal					270000000		230000000		300000000		300000000		300000000		590000000	0			

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Ou Setuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		target Akhri SKPD Penang
		Volume	Vol	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	Vol	APBK	
02 27	Program Peningkatan pengembangar Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis			6000000		6000000		6000000		6000000		6000000	30000000	0
02 03	Program Peningkatan disiplin aparat. Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkap			6050000000		6000000000		6050000000		6000000000		6050000000	30150000000	0
														0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Target	Kinc	SKPD Penanggung
				Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja		Kondisi Kinerja		Vol	Kinc	
				Volume	Vol (Rp)	Vol	(Rp)	Vol	(Rp)	Vol	(Rp)	Vol	(Rp)	Vol	(Rp)	Vol	Kinc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA					1.4081E+11		1.53867E+11		1.69192E+11		1.86111E+11		2.04722E+11	0	4.25448E+11	0	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					94952134284		1.04447E+11		1.14892E+11		1.26381E+11		1.39019E+11	0	1.52921E+11	0	
	BELANJA LANGSUNG (BL)					45857460763		49419978439		54299535283		59729368812		65702185693	0	2.72527E+11	0	
01.	Program Peningkatan Administrasi Perkantora		Meningkatnya Pelayanan Kantor			15901173802		17491171182		19240168300		21164065130		23280351644	0	97076930059		
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana			139696000		153665600		169032160		185935376		204528913.6		852858049.6		
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur			1220500000		303804600		334185060		367603566		404363922.6		1220500000		
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur			66186000		303804600		334185060		367603566		404363922.6		404072148.6		
15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini		sekolah	5	5	210000000	5	231000000	5	254100000	5	279510000	5	307461000	25	1282071000	30	
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semb		Tercapainya Program Waj			17675751051		19443326156		21387658772		23526424649		25879067114	0	1.07912E+11	0	
17.	Program Pendidikan Menengah		Terlaksananya Program Pendidikan Menengah			9572094410		10529303851		11582234236		12740457660		14014503426		58438593582		
18.	Program Pendidikan Non Formal		sekolah	1	1	215000000	1	236500000	1	260150000	1	286165000	1	314781500	5	1312596500	6	
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Terwujudnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			75629500		83192450		91511695		100662864.5		110729151		461725660.5		
23.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Tingkat		Terlaksananya Program Peningkatan	9343	9173	781430000	9203	644210000	9233	646310000	9263	710941000	9293	782035100	46165	3564926100	55508	
	Penambahan Ruang Kelas (DAK)		Peningkatan Mutu Pendidikan															

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr Indikator Kinerja Program (Satuan Volume	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode I	
		Kondisi Kiner	APBK	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pr target Akh				
		Volume	Vol	RP		Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	SKPD Penang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA					5685170666		6033220700		5789384370		5192956607		4142551500		26843283843		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					2080447000		2080447000		2080447000		2080447000		2080447000	0	10402235000	0	
	BELANJA LANGSUNG (BL)					3604723666		3952773700		3708937370		3112509607		2062104500		16441048843		
03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTR# Meningkatnya Pelayanan Kantor					488828000		453277700		405401370		405478607		404691500		2157677177	268	
															0	0	0	
03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA L Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					235974666		614738000		749738000		749738000		0	0	2350188666	0	
															0	0	0	
03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN # Meningkatnya disiplin aparatur					24500000		0		0		0		0	0	24500000	0	
															0	0	0	
03 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITA Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur					0		72000000		72000000		72000000		72000000	0	288000000	0	
															0		0	
03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEME Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisaf					1853000		6000000		6000000		6000000		6000000	0	25853000		
03 21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK					113725000		792250000		760250000		760250000		730250000	0	3156725000	1031640	
															0	0	0	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pri Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri target Akhir				
			Volume	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	SKPD Penang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03 22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKS Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan dan tersed					2574050000	1598715000	1479755000	788250000	568250000	0	7009020000	6555.5					
														0	0	0		
03 23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASAR Meningkatnya konsumsi pangan asal hewan dan hasil ikutannya					20000000	85000000	50000000	120000000	50000000		325000000	0					
														0		0		
03 24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN					145793000	330793000	185793000	210793000	230913000		1104085000	0					

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode 1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Progra 2	Indikator Kinerja Program (out Satuan 3	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir per		target Akhir SKPD Penang 19
			Vol. 4	Rp 5	Vol. 6	Rp 7	Vol. 8	Rp 9	Vol. 10	Rp 11	Vol. 12	Rp 13	Vol. 14	Rp 15	
2	04	TOTAL BELANJA		5008995974		5194145485		6283753033		6989859336		8763870270		32240624098	
1	01	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)		2575584565		2755875485		3031463033		3334609336		3668070270		15365602689	
5	2	BELANJA LANGSUNG		2433411409		2438270000		3252290000		3655250000		5095800000		16875021409	
04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkant Terciptanya pelayanan administarsi kantor		490214409		585850000		648050000		671350000		705200000		3100664409	
04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasar Kelancaran dan Kenyamanan Kerja Aparatur		91996000		123200000		116700000		117700000		118100000		567696000	
04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian & Perlengkapan bagi Pegawai		29900000										29900000	
04	06	Program Peningkatan Pengembangan Sis Terlaksananya pembuatan laporan RFK dan LAKIP		6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000	
04	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Pet: Meningkatkan kemampuan da angktn	28	0		100000000		0		0		120000000		220000000	
04	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		203235000		336575000		346575000		411935000		411935000		1710255000	
04	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		0		0		0		0		0		0	
04	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Petar Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan		1615716000		325000000		2025000000		2330000000		2535000000		8830716000	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Prc	Indikator Kinerja Program (Satuan Volume)	Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode I		target Akhir : SKPD Penang								
				Kondisi Kiner	APBK	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	APBK	Vol (Rp.)	APBK	Vol (Rp.)	APBK	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	APBK	Vol (Rp.)	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	TOTAL BELANJA						7029177000			6365010000				6156375000			6733960000			6947720000			33232242000		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)						1850000000			2035000000				2238500000			2462350000			2708585000			11294435000		
	BELANJA LANGSUNG (BL)						5179177000			4330010000				3917875000			4271610000			4239135000			21937807000		
	Program Pelayanan Administrasi Pert						1810127000			1910800000				2017200000			2123100000			2226000000			10087227000		
	Program Peningkatan Sarana dan Pra Terwujudnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						1706025000			501560000	38			639600000			963360000			670360000			4480905000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Meningkatkan disiplin aparatur						20800000							20800000						0			41600000		0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumi Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur						67400000			67400000				67400000			67400000			67400000			337000000		
	Program Peningkatan Pengermbang Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan lea						6000000			6000000				6000000			6000000			6000000			30000000		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						564825000			650500000				865375000			853000000			967875000			3901575000		
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						23000000			58000000				23000000			58000000			23000000			185000000		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						271000000			295750000				193500000			190750000			193500000			1144500000		
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						710000000			840000000				850000000			100000000			850000000			1730000000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Pri	Indikator Kinerja Program (Out)	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prio target Akh			SKPD Penan
				Satuan	Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					2367107440		2498709284		2700334230		2803121670		3093687855		13462960478		
20	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				1344283199		1478711519		1626582671		1789240938		1968165032		8206983358		
		BELANJA LANGSUNG				1022824241		1019997765		1073751559		1013880732		1125522823		5255977120		
06	01	Program Pelayanan Administrasi Per	Terciptanya pelayanan administarsi kantor			311041240.8		333385364.9		341496818.9		350419418.3		360234277.6		1696577120		
20	02	Program Peningkatan Sarana dan Pri	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional			51294000		56423400		62065740		68272314		75099545.4		313154999.4		
		Program Peningkatan Disiplin Aparat	tersedianya pakaian dinas			15300000		0		0		0		0		15300000		
06	06	Program Peningkatan Pengembang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000		
		Program Penataan Administrasi	Kependudukan			639189000		624189000		664189000		589189000		684189000		3200945000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pri Indikator Kinerja Program (Satuan)	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir P target Akl		SKPD Pen	
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)
		4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19					
1	TOTAL		1285000000	1363500000	1449850000	1594835000	1754318500	7447503932							
	BELANJA LANGSUNG		1285000000	1363500000	1449850000	1594835000	1754318500	7447503932							
03 32	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI		220000000	242000000	266200000	292820000	322102000	1343122404							
03 23	PROGRAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI Pemahaman panitia/pengguna/Penyedia jasa konstruksi terhadap		570000000	577000000	584700000	643170000	707487000	3082357008							
03 33	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Tercapainya pelaksanaan pengawasan Jasa Konstruksi		255000000	280500000	308550000	339405000	373345500	1556800508							
06 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kebijakan Pelaksanaan Jasa Konstruksi		160000000	176000000	193600000	212960000	234256000	976816008							
03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMERAN Buku Dok. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)		80000000	88000000	96800000	106480000	117128000	488408004							

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan	Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kine Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir target Akhir		SKPD Penang		
			Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17	18		19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					1100000000		1173000000		1275300000		1387830000		1511613000		6447743000		
	BELANJA LANGSUNG					1100000000		1173000000		1275300000		1387830000		1511613000		6447743000		
20 16	Program peningkatan pelayanan k	Tersedianya SDM yang handal untuk kegiatan keprotokol.				500000000		550000000		605000000		665500000		732050000		3052550000		
20 15	Program pengembangan komunik	Terselenggaranya penyerapan informasi				580000000		623000000		670300000		722330000		779563000		3375193000		
	Program Belanja Modal Pengadaa	Tersedianya alat studio				20000000		0		0		0		0		20000000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr	Indikator Kinerja Progr	Satuan	Kondisi Kiner Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pr target Akhir			SKPD Penang	
				Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					700000000		770000000		847000000		931700000		1024870000		4273570000		
	BELANJA LANGSUNG					700000000		770000000		847000000		931700000		1024870000		4273570000		
1 26 02	Program penataan peraturan perundang-undangan					700000000		770000000		847000000		931700000		1024870000		4273570000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kin Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri target Akh			SKPD Peni			
		Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					435000000		478500000		526350000		578985000		636883500		2655718500		
	BELANJA LANGSUNG					435000000		478500000		526350000		578985000		636883500		2655718500		
	Program peningkatan kapasitas suml Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknis tugas					100000000		110000000		121000000		133100000		146410000		610510000		
	Program penataan peraturan perund Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perunc					80000000		88000000		96800000		106480000		117128000		488408000		
	Program penyelamatan dan pelestar Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip					25000000		27500000		30250000		33275000		36602500		152627500		
	Program pembinaan dan pengembar Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS					55000000		60500000		66550000		73205000		80525500		335780500		
	Program peningkatan pengembangan Tersedianya laporan kinerja dan keuangan					175000000		192500000		211750000		232925000		256217500		1068392500		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pri Indikator Kinerja Program / Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prio target Akhri			SKPD Penang			
		Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL			821000000		903100000		993410000		1092751000		1202026100		5012287100				
	BELANJA LANGSUNG			821000000		903100000		993410000		1092751000		1202026100		5012287100				
03 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			150000000		165000000		181500000		199650000		219615000		915765000				
03 18	Program kemitraan pengembang: wawasan kebangsaan			100000000		110000000		121000000		133100000		146410000		610510000				
03 18	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			100000000		110000000		121000000		133100000		146410000		610510000				
03 21	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			70000000		77000000		84700000		93170000		102487000		427357000				
03 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah			235000000		258500000		284350000		312785000		344063500		1434698500				
03 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			166000000		182600000		200860000		220946000		243040600		1013446600				

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pri	Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri target Akh			SKPD Per		
			Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					10343704965		8690786362		8830906542		9964148740		10078699658		47908246267		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1610960980		1772057078		1949262786		2144189064		2358607971		9835077879		
2	BELANJA LANGSUNG					8732743985		6918729284		6881643756		7819959676		7720091687		38073168388		
04 01	Program Pelayanan Administrasi Per	Terciptanya pelayanan administarsi kantor				4737298235		3090508959		3111256399		3134078583		3159182985		17232325159		
04 02	Program Peningkatan Sarana dan Pr	Terpeliharanya kendaraan dinas				944850000		500335000		110313500		660399850		133479335		2349377685		
	Program Peningkatan Disiplin Aparat	tersedianya pakaian dinas				24700000		0		0		0		0		24700000		
04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sum	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur				200000000		220000000		242000000		266200000		292820000		1221020000		
04 06	Program Peningkatan Pengembang	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kin				6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000		
04 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Perwakilan Rakyat Daerah				2819895750		3101885325		3412073858		3753281243		4128609368		17215745543		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pri Indikator Kinerja Program (Satuan)	Kondisi Kine Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pr target Akh			SKPD Penang	
		Volume	Vol (Rp.)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					6640293846		6530335931		7210302224		7799265146		9763404361		37943601507		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1415208076		1556728884		1712401772		1883641949		2072006144		8639986825		
	BELANJA LANGSUNG					5225085770		4973607047		5497900452		5915623197		7691398217		29303614682		
	Program Pelayanan Administrasi Per Terciptanya pelayanan adminlstarsi kantor					387865000		399464200		412343320		426510352		442094087.2		2068276959		
	Program Peningkatan Sarana dan Pri Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasior					33220770		36542847		40197131.7		44216844.87		48638529.36		202816122.9		
	Program Peningkatan Disiplin Aparat tersedianya pakaian dinas					17000000		0		0		0		0		17000000		
	Program Pengembangan Nilai Budaya					30000000		33000000		36300000		39930000		43923000		183153000		
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					300000000		350000000		300000000		300000000		500000000	0	1750000000	0	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					146000000		154000000		169400000		186340000		204974000		860714000		
	Program peningkatan peran serta kepemudaan					176000000		193600000		212960000		234256000		257681600		1074497600		
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					1000000000		210000000		250000000		250000000		1421280000		3131280000		
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda					0		245000000		269500000		296450000		326095000	0	1137045000	0	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan OlahRaga					700000000		700000000		755000000		815500000		882050000		3852550000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana OlahRaga					690000000		759000000		834900000		918390000		1010229000		4212519000		
	Program pengembangan pemasaran pariwisata					50000000		55000000		60500000		66550000		73205000		305255000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pri Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kine Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pr target Akh			SKPD Penang			
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program peningkatan peran serta kepemudaan					505000000	645500000	690050000		789055000		842960500		3472565500				
	Program upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda					150000000	165000000	181500000		199650000		219615000		915765000				
	program pembinaan dan permasyarakatan olahraga					675000000	727500000	785250000		848775000		918652500		3955177500				
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					300000000	300000000	500000000		500000000		500000000		2100000000				
	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu					65000000		0		0		0		0	0	65000000	0	

Cabangan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Indikator Kinerja Program ((Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Target SKI					
		Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA					7420890747		8280798214		9400807374		10731201956		12295068555		48128766845		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					3735002565		3841776298		4610131558		5532157869		6638589443		24357657733		
	BELANJA LANGSUNG (BL)					3685888182		4439021916		4790675816		5199044087		5656479112		23771109113		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					695797005		690344080		700930088		712574696.8		725383766.5		3525029636		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur					76260000		104286000		84714600		71586060		58944666		395791326		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah				45100000		0		0		0		0		45100000		
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Lanjarnya	Pengurusan administrasi pensiun PNS				0		38000000		38000014.3		38000028.6		41800031.46		155800074.4		
	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya diklat-diklat Penjurusan Struktural bagi Aparatur				578476000		636323600		699955960		769951556		846946711.6		3531653828		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	Terlaksananya diklat-diklat Teknis bagi Aparatur PNS				0		400000000		440000000		484000000		532400000	0	1856400000		
	Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur					2290255177		2570068236		2827075154		3122931746		3451003936		14261334154		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (output Satuan)	Kondisi Kinerja		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode		SKPD Penanggung Jawab		
		Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Vol	RP	Target SKPI	18	19
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	TOTAL BELANJA			32719838882		35332311280		37611375241		40688759805		44074145434		1.90426E+11				
5	1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			15634147485		17197562234		18401391590		20241530749		22265683824		93740315881				
5	2 BELANJA LANGSUNG (BL)			17085691497		18134749047		19209983651		20447229057		21808461610		96686114862				
2	01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarannya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2443198497		2524418347		2559491681		2652340850		2754474934		1293924309				
2	02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya oprasionan kendaraan Dinas		421756000		433995200		447458320		462267752		478558127.2		2244035399				
2	03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian Dinas beserta pelengkapannya		189900000										189900000				
2	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Tercapainya kemampuan tehnik pelayanan Kesehatan		31018000		45061800		50662180		57041438		64321229.8		248104647.8				
2	06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Adanya dokumen evaluasi kegiatan		6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000				
2	15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi dan pengawasan obat rasional		29059950		31965945		35162539.5		38678793.45		42546672.8		177413900.7				
6	15 Program Pengembangan Data/Informasi	Adanya Informasi dan deta hasil pencapaian program kerja di bid		6045000		6649500		7314450		8045895		8850484.5		36905329.5				
2	16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya manajemen kesehatan jiwa masyarakat		1358308000		1521840800		1674024880		1841427368		2025570105		8421171153				
2	17 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya	Adanya penghargaan bagi PNS yang Berprestasi		0		24285000		26713500		29384850		32323335		112706685				
2	19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya	Adanya pengetahuan untuk mendukung program PHBS di tatana		63727600		79145760		87060336		95766369.6		105343006.6		431043072.2				
2	20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya upaya peningkatan dan perbaikan gizi masyarakat		239476000		424504600		466955060		513650566		565015622.6		2209601849				
2	22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			187329050		207450955		228196050.5		251015655.6		276117221.1		1136218932				

23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	77401500	85141650	93655815	103021396.5	-113323536.2	472543897.7
25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jar	4992156000	4999942000	5008506600	5017927660	5028290826	25046823086
32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melalui Terlaksananya pertemuan Review Maternal	7040315900	7744347490	8518782239	9370660463	10307726509	42981832601

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program / Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir f		target Akf SKPD Pena		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA						7526202034	7689612237	8768003461	8019883807	9785349688	41789051228							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)						2326982834	2559681117	2815649229	3097214152	3406935567	14206462900							
	BELANJA LANGSUNG (BL)						5199219200	5129931120	5952354232	4922669655	6378414121	27582588328							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Lancarnya Administrasi Kantor						744854400	767519840	792451824	819877006.4	848442207	3973145277							
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana: Tersedianya perlengkapan gedung kantor						200850000	256935000	243028500	267331350	294064485	1262209335							
03	Program Peningkatan disiplin Aparatur: tersedianya pakaian dinas stel				58		27900000	0	0	0	0	27900000							
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya: Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang org						228614800	251476280	385873908	404461298.8	474907428.7	1745333715							
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terukurnya capaian kinerja dan lhtktisar re eks				8	8	6000000	8	6000000	8	6000000	8	6000000	8	6000000	30000000			
15	Program Pengembangan Data / Informasi: Tersedianya data dukung dan informasi kebutuhan penyusunan perencanaan						476000000	463000000	445000000	650000000	400000000	2434000000							
24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah: Tersedianya dokumen masterplan perhubungan darat							50000000	100000000	150000000	100000000	400000000							
15	Program Perencanaan Tata Ruang: Tersedianya buku RTBL						850000000	230000000	330000000	30000000	230000000	1670000000							
17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	500000000							
16	Program Kerjasama Pembangunan: Terlaksananya kerjasama pembg. Bid. Sanitasi perkotaan						90000000	105000000	110000000	115000000	115000000	535000000							
	Program Pengembangan wilayah perbatasan						100000000	0	0	0	0	100000000							

18	Program pen strategis cepat tumbuhemba Tersedianya Dokumen Renc. Induk dari Renc. aksi daerah KSCT		110200000	250000000	520000000	0	270000000	1150200000
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah keg	1	150000000	0	0	0	1 200000000	1 350000000
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1575000000	1150000000	1140000000	1140000000	1740000000	6745000000
22	Program Perencanaan Pembangunan ekonomi		1898000000	1200000000	1200000000	790000000	950000000	4329800000
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya		0	250000000	250000000	250000000	250000000	1000000000
	Program Regulasi Perencanaan Pembangunan Bid. Pendidikan		250000000	50000000	30000000	0	0	330000000
	Program Regulasi Perencanaan Pembangunan Bid. Kesehatan keg		100000000	0	100000000	0	0	200000000
	Program Roadmap Kesejahteraan Sosial keg		0		100000000			100000000
	Program Roadmap Penegakan Syariat Islam keg				100000000			100000000
	Program Roadmap Pengembangan wilayah keg						250000000	250000000
	Program Roadmap Pemuda dan olah raga keg					1	100000000	100000000
	Program Roadmap Politik dan perlindungan masyarakat keg						100000000	100000000
	Program evaluasi Capaian dan Reviews RPJM 2013-2017 Bid. Sosbud dan SDM keg						150000000	150000000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Outk Satuan	Kondisi Kin Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri target Akl			SKPD Penan		
		Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA					17935382393		20580451432		20350188576		20461399433		21002731376		1.0033E+11		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					1121065193		1233171712		1356488884		1492137772		1641351549		6844215110		
	BELANJA LANGSUNG (BL)					16814317200		19347279720		18993699692		18969261661		19361379827		93485938101		
1 04	Program Pelayanan Administrasi Perl Meningkatnya Pelayanan dan Aktifitas Kerja					16165317200		17758349720		17760576692		17763026361		17765720997		87212990971		
02	Program Peningkatan Sarana dan Pra terpeliharanya sapras kantor					56300000		61930000		68123000		74935300		82428830		343717130	0	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparat Meningkatnya disiplin aparatur					22700000		12000000		12000000		12000000		12000000		70700000		
15	Program Peningkatan Keamanan dan Jumlah Pembinaan Politik daerah					150000000		250000000		270000000		200000000		232000000		1102000000		
16	Program Pemeliharaan Kantrantibms Memudahkan Pulbaket Kominda					100000000		360000000		271000000		283100000		396410000		1410510000		
18	Program Kemitraan Pengembangan \ Meningkatkan Pemahaman Aparat Desa Terhadap Wawasan k					100000000		260000000		121000000		133100000		146410000		760510000		
19	Program Pemberdayaan Masyarakat pembinaan terhadap LSM dan ORMAS dan OKP					100000000		210000000		221000000		233100000		246410000		1010510000		
	Program Peningkatan Pemberantasai pembinaan terhadap LSM dan ORMAS dan OKP					0		100000000		100000000		100000000		100000000		400000000		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat pembinaan terhadap LSM dan ORMAS dari OKP					120000000		335000000		170000000		170000000		380000000		1175000000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prog Indikator Kinerja Program (Outcon Satuan)	Volume	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prior target AI				
			4	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	SKPD Penanggung	
																	5
	TOTAL BELANJA				3033099072		9445060388		3788695790		4179842466		4634558552		19081256267		Inspektorat
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)				1956632297		2093596558		2302956214		2533251835		2786577018		11673013922		
	BELANJA LANGSUNG (BL)				1076466775		1351463830		1485739576		1646590631		1847981533		7408242346		
20 07 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Operasional Kantor			252261275		302713530		363256236		435907483.2		523088979.8		1877227504		
20 07 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ap	Kelancaran dan Kenyamanan Kerja Aparatur			78886000		86774600		86774600		86774600		95452060		434661860		0
20 07 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur org		33 41	20200000		24240000		29088000		34905600		41886720		150320320		33
20 07 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pe	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan renstra			6000000		7200000		8640000		10368000		12441600		44649600		
20 07 20	Program Peningkatan Sistem Pengawa	Meningkatnya sistem pengawasr Objek Pemeriksaan Reguler			449758500		607302500		610100900		613179140		616565204		2896906244		
20 7 21	Program Peningkatan Profesionalisme	Meningkatkan sumber daya manu Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Peng			82207000		98648400		118378080		142053696		170464435.2		611751611.2		0
20 7 22	Program Penataan dan Penyempurnaa	Meningkatkan penataan dan peny Laporan Program Kerja Pengawasan T			187154000		224584800		269501760		323402112		388082534.4		1392725206		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE 1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Ou Satuan 2	3	4	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		target Akhl SKPD Penang				
				Kondisi Kir	APBK	APBK		APBK		APBK		APBK		APBK		15	16	17	18	19
				Volume	Vol	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)					
	TOTAL BELANJA			972	979	23949898846	979	23905821846	938	23944894946	938	24362213992	938	24518622547	823	1.20681E+11	1795			
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			823	823	10490768846	823	10490768846	823	10490768846	823	10490768846	823	10490768846	823	52453844230	1646	RSUD Simeuli		
5	BELANJA LANGSUNG (BL)					13459130000		13415053000		13454126100		13871445146		14027853701		68227607947	0			
02 01	Program Pelayanan Administrasi Perk Meningkatnya Pelayanan Kantor			149	156	4669130000	156	4794803000	115	4880626100	115	4950831510	115	5053957461	0	24349348071	149			
02 02	Program Peningkatan Sarana dan Pra terpeliharanya spras kantor			174	174	932500000	164	844250000	164	891000000	164	958363636.4	164	1031851240	164	4657964876	338			
02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparat tersedlanya pakalan dlnas					156500000			0			156500000				313000000	0			
02 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penang					100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		500000000	0			
02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sai Terlaksananya Pengadaan Ala thn				1	950000000		1110000000		1160500000		1326550000		1404205000		5951255000	1			
02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Pr Terpeliharanya Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit					325000000		330000000		336000000		343200000		351840000		1686040000	0			
02 05	Program peningkatkan kapasitas sumb Terlaksananya Pendidjkan dan pelatihan formal					270000000		290000000		300000000		300000000		300000000		590000000	0			

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Ou Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode		target Akhir SKPD Penang
		Kondisi Kir		APBK		APBK		APBK		APBK		APBK		
		Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	
02 27	Program Peningkatan pengembangar Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtis			6000000		6000000		6000000		6000000		6000000	30000000	0
02 03	Program Peningkatan disiplin aparat: Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan			6050000000		6000000000		6050000000		6000000000		6050000000	30150000000	0

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prog Indikator Kinerja Program (Outcome, Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir		Target SKP SKPD Penangr		
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	TOTAL BELANJA			2921452267		2820458724		2667732529		2757606944		2944372748		14111623211				PPKS
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			1276709887		1404380876		1544818963		1699300860		1869230946		7794441531				
5 2	BELANJA LANGSUNG (BL)			1644742380		1416077848		1122913566		1058306084		1075141802		6317181680				
5 3	Program Pelayanan Administrasi Perka Meningkatkan Pelayanan Kantor			271717180		275519898		279322616		283125334		286928052		1396613080				
5 4	Program Peningkatan Sarana dan Prast Terpeliharanya kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas			72300000		79530000		86760000		93990000		101220000		433800000				
5 5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemenuhan kebutuhan seragam dinas dan meningkatnya kedisiplin			14400000		0		0		0		0		14400000				
5 6	Program Peningkatan Pengambangan Tersedianya laporan tentang tentang realisasi kegiatan dan prograr			22375000		24012500		25650000		27287500		28925000		128250000				
5 7	Program Keluarga Berencana Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan TKBK			300000000		200000000		0		0		0		500000000				
5 8	Program Penguatan Kelembagaan Per Tersedianya fasilitas P2TP2			41655000		45820500		49986000		54151500		58317000		249930000				
5 9 0	Program Peningkatan Kualitas Hidup di terlaksannya monev			25000000		25000000		25000000		25000000		25000000		125000000				
59	Program Pelayanan Kontrasepsi Terlaksananya pelayanan TKBK kepada masyarakat			126854500		126854500		126854500		126854500		126854500		634272500				
62	Program Peningkatan Peran Serta dan Terlaksananya pelatihan bagi Organisasi Perempuan			100000000		110000000		0		0		0		210000000				
20	21 Program Penguatan Kelembagaan Perj Terbentuknya Desa Percontohan PPW-KSS, BKB, GSI dan Nakerwan			188997500		207897250		207897250		207897250		207897250		1020586500				

Program Pengembangan Pusat Pelayar Terbentuknya kelompok PIK-KRR di sekolah dan diluar sekolah	51443200	51443200	51443200	0	0	154329600	
Memperingati Hari-hari Besar	100000000	110000000	110000000	110000000	110000000	540000000	
Membentuk Keluarga Sakinah	Terlaksananya Pelatihan Muballighah bagi Perempuan	50000000	30000000	30000000	0	0	110000000
Pendataan Keluarga	Tersedianya data keluarga (by name, by address)	50000000	0	0	0	0	50000000
Pendataan Perempuan dan Anak	Tersedianya data perempuan dan anak	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	50000000
Program UPPKS (Usaha Peningkatan P&T Terblnnya kelompok Usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga :		70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	350000000
Program Peningkatan Kualitas Hidup di Tersosialisasikannya UU KDRT kepada masyarakat		80000000	0	0	0	0	80000000
Program Pembinaan Keluarga	Meningkatnya SDM kader kelompok : Bina Keluarga Balita (BKB), Bi	70000000	50000000	50000000	50000000	50000000	270000000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Progr Indikator Kinerja Program (O Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir P target Akhir S			SKPD Penang			
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA			633718000		876835000		619721400		734868640		634848204		3499991244		MPU		
05 01	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			26800000		29480000		32428000		35670800		39237880		163616680				
	BELANJA LANGSUNG (BL)			606918000		847355000		587293400		699197840		595610324		3336374564				
	Program Pelayanan Administrasi Perkai Meningkatkan Pelayan Kantor			521895000		524709000		522359400		525219840		528366324		2622549564				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasa Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor			15000000		67000000		32000000		33100000		34310000	0	181410000	0			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin kantor			3200000		0		0		0		0		3200000	0			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur			0		32934000		32934000		32934000		32934000	0	131736000	0			
	Program Pembinaan Syariat Islam terlaksananya Sosialisasi Tentang Pendangkalan Aqidah			66823000		222712000		0		107944000		0	0	397479000	0			

SKPK

MPD
URUSAN WAJIB

Dalam Rupiah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr: Indikator Kinerja Program (Output Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prio target Akhir			SKPD Penangi
		Volume	Vol	(Rp.)		Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TOTAL BELANJA					434313539		619890254		483799706		524463523.3		460873216.4		2523340239	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					186000000		199020000		212951400		227857998		243808057.9		1069637456	
	BELANJA LANGSUNG					248313539		420870254		270848306		296605525.3		217065158.5		1453702783	
	Program Pelayanan Administrasi Perka Meningkatkan kelancaran administrasi kantor					126668919		128301842		130470306		132985525.3		135908158.5		654334750.8	
	Program Peningkatan Sarana dan Pra meningkatnya kelancaran kegiatan kantor					36818000		78086000		53248000		48730000		66024000		282906000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tersedianya Pakaian Dinas					3900000		0		0		0		0		3900000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumi Terwujudnya Konsep dan Rekomendasi tentang pendidikan wajar sen					0		71681212		0		0		0		71681212	
	Program Pengembangan budaya bac Meningkatkan Pemahaman tentang pendidikan					2500000		3500000		4080000		5300000		0		15380000	
	Program Manajemen Pelayanan Per Terwujudnya Manajemen Pendidikan yang profesional					78426620		139301200		83050000		109590000		15133000		425500820	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (Output Satuan)	Volume	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Per target Akhir		SKPD Penang	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TOTAL			443785871.5		476484458.7		524733904.5		511407295		551748024.5		2458159554		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG		8	85000000	8	93500000	8	102850000	8	113135000	8	124448500	40	518933500		
2	BELANJA LANGSUNG			358785871.5		382984458.7		421883904.5		398272295		427299524.5		1939226054		
04 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi		21	198115697.5	21	207127267.3	16	200220994	16	209443093.4	16	219587402.7	90	1034494455	111
04 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	A Tersedianya sarana dan prasarana Aparatu		5	31563000	6	34719300	5	16411230	5	18052353	5	19857588.3	26	120603471.3	31
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah			800000		0		0		0		0		800000	
04 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Terlaksananya Bimbingan Teknis %		2	12307174	2	13537891.4	2	14891680.54	3	16380846.59	4	18018933.45	13	75136527.99	15
04 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terlaksananya Pelestarian dan %		10	116000000	20	127600000	20	190360000	20	154396000	100	169835600	170	708191600	180

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Progre Indikator Kinerja Program (Outcomr Satuan	Kondisi Kinerja F Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pric target Akhir			SKPD Penangi		
		Volume	Vol (Rp.)		Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA					1149060620	2020766682			1588805550				1622248305	1800935336	8181816493		KPTSP
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					655930620	721523682			793676050.2				873043655.2	960348020.7	4004522028		
	BELANJA LANGSUNG (BL)					493130000	1299243000			795129500				749204650	840587315	4177294465		
	Program Pelayanan Administrasi Perkan Meningkatkan Pelayanan Kantor					254410000	269825000			276611500				284076650	292288315	1377211465		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasar Terciptanya Kenyamanan					31500000	39000000			23100000				25410000	27951000	146961000	0	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin kantor					6300000	0			0				0	0	6300000	0	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur					85502000	30000000			33000000				36300000	39930000	224732000	0	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar P Terwujudnya sistem administrasi perijinan					115418000	115418000			115418000				115418000	115418000	577090000	0	
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekr Tersedianya Jaringan website					0	425000000			75000000				75000000	75000000	650000000	0	
	Program Pengembangan Kebijakan yang Terlaksananya rancangan peraturan					0	90000000			97000000				110000000	170000000	467000000	0	
	Progrm Penyiapan potensi sumberdaya t tersedianya informasi pelayanan perijinan					0	330000000			175000000				103000000	120000000	728000000	0	
															0		0	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE 1	Bidang 2	Urusan Pemerintahan dan Progr Indikator Kinerja Program (Outcome Satuan) 3	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode			target Akt SKPD Pena		
			Volume 5	Vol 6	(Rp.) 7	Vol 8	(Rp.) 9	Vol 10	(Rp.) 11	Vol 12	Vol 13	(Rp.) 14	Vol 15	(Rp.) 16	17	18	19		
	BELANJA					8576786000		3761334100		5067977810		4755180591		6358367750		28519646251			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1329473000		1595367000		1914440000		2297328000	1	2756793000		9893401000			
	BELANJA LANGSUNG					7247313000		2165967100		3153537810		2457852591		3601574750		18626245251			
	Program Pelayan Adminlstrasi Perkar Meningkatnya kelancaran adminlstrasi kantor					481345000		577618000		693142000		831771000		998122000		3581998000			
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasa meningkatnya kelancaran kegiatan kantor					48461000	1	77307100		63037810		69341591	1	76275750.1		334423251.1			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakalan Dinas					14350000		0		0		0		0		14350000			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Menlingkatkan kemampuan SDM Aparatur					56312000		56312000		56312000		56312000		56312000		281560000			
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pel Tersedianya Lakip dan Renstra SKPK					6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000			
	Program Pembinaan Syariat Islam Tercetaknya kilas pelaksanaan Syariat Islam di Kab.Simeulue					102796000		205419000		114585000		132094000		205170000	500	760064000			
	Program Peningkatan Pelayanan Kehidi Terblnanya TPA Desa , LPPTKA, dan Pesantren dalam Kab. Simeulue					4950494000		127934000		132784000		137876000		148570000		5497658000			
	Program Peningkatan Kualitas Pendidik Terlaksananya Pengajaran Pokok - pokok ajaran Islam bagi murid SD, SL					440000000		470000000		470000000		470000000		470000000		2320000000			
	Sosialisasi Qanun Pemerintah Daerah Terbentuknya Sosialisasi Qanun Syariat Islam											60258000		22095000	0	82353000	0		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Progr Indikator Kinerja Program (Outcome/Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		target Akt SKPD Pena
		Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	
	Program Pengembangan dan Pemberdi Terlatihnya masyarakat yang mampu memahami Hukum Islam			68377000	68377000	68377000		0	0	0	0	0	0	205131000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Penj Lahirnya para Juru Dakwah dlm Kab. Simeulue	138		101178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101178000	
	Program Pembinaan Sosial Keagamaan Terlaksananya BKMT, IPHI, Rukyatul Hilal dan LPPTKA			65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	65000000	325000000	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasa Tersedianya Sarana dan Prasarana Peribadatan			0	10000000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	
	Program Peningkatan Pemahaman Wak Tersosialisasinya Pemahaman wawasan Islam dan Terpublikasinya Infor			0	300000000	330000000	529200000	399300000	399300000	399300000	399300000	399300000	399300000	1558500000	
	Program Peningkatan Pemahaman, Per Tersedianya Qari/Qariah yang Baik			913000000	100000000	1154300000	100000000	1154730000	1154730000	1154730000	1154730000	1154730000	1154730000	3422030000	
	Program Pembinaan Dakwah Dan Syiar Terbinnya Muallaf dan Tersalurinya bantuan dalam rangka Pemberdaya			0	102000000	0	0	0	0	0	0	0	0	102000000	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE 1	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr Indikator Kinerja Program (Output/Satuan 2	3	4	Kondisi Kinerja FTahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir				
				Volume 5	Vol (Rp.) 6	(Rp.) 7	Vol 8	(Rp.) 9	Vol (Rp.) 10	Vol (Rp.) 11	(Rp.) 12	Vol (Rp.) 13	(Rp.) 14	Vol (Rp.) 15	(Rp.) 16	target Akhir 17	SKPD Penang 18	19	
	TOTAL BELANJA				450369200			509069230		518496853		414847238.3		429037662.1		2321820183			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)				69800000			74686000		82154600		90370060		99407066		416417726			
	BELANJA LANGSUNG (BL)				380569200			434383230		436342253		324477178.3		329630596.1		1905402457			
	Program Pelayanan Administrasi Per Meningkatkan kelancaran administrasi kantor				256875200		0	254383230		0	253342253		0	238177178.3		0	239700596.1		1242478457
	Program Peningkatan Sarana dan Pra meningkatnya kelancaran kegiatan kantor				44442900			26000000		8000000		8000000		8000000		8000000		94442900	
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tersedianya Pakalan Dinas				3500000			0		0		0		0		0		3500000	
	Program Peningkatan Kapasitas Suml Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur				0			20000000		20000000		20000000		20000000		20000000		80000000	
	Program Peningkatan Penganmbang Tercapainya Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja Pelaporan				6000000			6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000	
	Program Pembinaan Syariat Islam Tersedianya Laporan Penyaluran Zakat				117694000			130000000		133000000		36300000		39930000		456924000			
	Program Pembinaan Lembaga Sosial terlaksananya pelatihan penggunaan zakat produktif				0			50000000		50000000		50000000		50000000		50000000		200000000	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr: Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prioc target Akhir t			SKPD Penanggun			
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA			1857365200		2010714300		2412571470		2858711269		3393321342	0	12532683581				Kec. Simtim
5	1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			1451840000		1742208000		2090649600		2508779520		3010535424	0	10804012544				
5	2 BELANJA LANGSUNG (BL)			405525200		268506300		321921870		349931749		382785918.3	0	1728671037				
	Program Pelayanan Administrasi Perl Meningkatnya kelancaran administrasi kantor			159743200		164868700		170506750		176708605		183530645.5	0	855357900.5				
2	Program peningkatan sarana dan pra meningkatnya kelancaran kegiatan kantor			199532000		58137600		69765120		83718144		100461772.8	0	511614636.8				
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tersedianya Pakaian Dinas			17750000		0		0		0		0	0	17750000		0		
5	Program Peningkatan Kapasitas Suml Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur			0		12500000		13750000		15125000		16637500	0	58012500				
6	Program Peningkatan Pengembangai Tercapainya Laporan Kiner Thn			6000000		6000000		16000000		16000000		16000000	0	60000000				
1	4 17 Program Perencanaan Pembangunar Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa			22500000		27000000		32400000		38880000		46656000		167436000				
1	17 15 Program pengembangan Nilai Budaya; Berkembangnya adat budaya daerah			0		0		19500000		19500000		19500000	0	58500000				

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Progr Indikator Kinerja Program (Outcc Satuan	Volume	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri: target Akhir			SKPD Penang	
			Vol	(Rp.)		Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA	ub		2508494000		2920084800		3462693560		4125480852		4919986060		17936739272				
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			2233494000		2680192800		3216231360		3859477632		4631373158		16620768950				
5 2	BELANJA LANGSUNG (BL)			275000000		239892000		246462200		266003220		288612902		1315970322				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkai Terciptanya kelancaran administrasi kantor			131962000		154265200		152222720		169054792		188684631.2	0	796189343.2				
2	Program peningkatan sarana dan prasa Terciptanya kelancaran operasional			83904000		43749400		44624340		45586774		46645451.4	0	264509965.4	0			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas				22	28700000								22	28700000	22		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur			10000000		10000000		10000000		10000000		10000000	0	50000000	0			
15	Program Peningkatan Pengembangan S Terfaksananya pelaporan kinerja kerja instansi pemerintah			6000000		16000000		16000000		16000000		16000000	0	70000000	0			
21	Program Perencanaan Pembangunan C Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa			14434000		15877400		17465140		19211654		21132819.4		88121013.4				
1 15 12	Program pengembangan Nilai Budaya Berkembangnya adat budaya daerah					0		0		6150000		6150000		6150000		18450000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Ki Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pric		target Akh SKPK Penangg			
			Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA		Thn	1	1	3476278375	1	3836868600	1	4303527924	1	4867436274	1	5528953170	5	22013064341	6	
5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTU)				1869003870		2242804644		2691365573		3229638687		3875566425		13908379199		
5	2	BELANJA LANGSUNG (BL)	Thn	1	1	1607274505	1	1594063956	1	1612162351	1	1637797586	1	1653986745		8104685142		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran adminstras	Thn	1	1	1511884505	1	1516844956	1	1522301451	1	1528303596	1	1534905956		7614240463		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Apai meningkatnya kelancaran kegiatan kantor				35190000		36619000		38190900		39919990		41821989		191741879		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Ag Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur				10000000		10000000		10000000		10000000		10000000	0	50000000	0	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas				23700000		0		0		0		0		23700000		
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Pe Terlaksananya pelaporan kinerja kerja Instansi pemerintah				6000000		6000000		6000000		18000000		18000000		54000000		
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa				20500000		24600000		29520000		35424000		42508800		152552800		
1	15	12 Program pengembangan Nilai Budaya						0		0		6150000		6150000		18450000		

Capaian Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome Satuan)	Kondisi KI Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
			Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	target Akh SKPK Penangg							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prio target Akhir SI		SKPD Penang				
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL BELANJA			2273485000		2430629000		2673699311		3011119657		3414146242		13803079210				
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			1077086000		1292503200		1551003840		1861204608		2233445530		8015243178				
5 2	BELANJA LANGSUNG (BL)			1196399000		1138125800		1122695471		1149915049		1180700713		5787836033				
1	Program Pelayanan Administrasi Perl Terciptanya kelancaran administrasi kantor			1091357000		1053438700		1028156470		1043918117		1061255929		5278126216				
2	Program peningkatan sarana dan pra Terciptanya kelancaran operasional			35931000		27424100		30166510		33183161		36501477.1		163206248.1				
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tersedianya Pakalan Dinas			17710000		0		0		0		0		17710000				
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumil Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur			29310000		35172000		42206400		50647680		60777216		218113296				
15	Program Peningkatan Pengembangai Terlaksananya pelaporan kinerja kerja instansi pemerintah			6000000		6000000		16000000		16000000		16000000		60000000				
13 31	Program Perencanaan Pembangunar Tercapainya Partisipasi Masyarakat d:			18	18	16091000	0	16091000	0	16091	0	16091	0	16091	18	32230273	36	
1 15 12	Program pengembangan Nilai Budaya: Berkembangnya adat budaya daerah					0		0		6150000		6150000		6150000		18450000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Prc	Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode target Akhir S		SKPD Penanggu		
				Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL	BELANJA				2868432000		2914881360		3074319496		3242936446		3428415090	0	15528984392		
5	1	BELANJA	TIDAK LANGSUNG (BTL)			1290668000		1381014760		1519116236		1671027860		1838130646		7699957501		
5	2	BELANJA	LANGSUNG (BL)			1577764000		1533866600		1555203260		1571908586		1590284445		7829026891		
1		Program	Pelayanan Administrasi Peril	Terciptanya kelancaran administrasi k 5 Org		1482518000		1440146000		1449310600		1459391660		1470480826		7301847086		
2		Program	peningkatan sarana dan pra	meningkatnya kelancaran kegiatan kantor		28720000		31592000		34751200		38226320		42048952		175338472		
		Program	Peningkatan Disiplin Aparat	Tersedianya Pakalan Dinas	22	23000000		0		0		0		0		23000000		
5		Program	Peningkatan Kapasitas Suml	Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur		26026000		28628600		31491460		34640606		38104666.6		124250727.6		
13	31	Program	Perencanaan Pembangunar	Tercapainya Partisipasi Masyarakat di	18	18	17500000	0	17500000	0	17500000	0	17500000	0	17500000	18	87500000	36
15		Program	Peningkatan Pengembangai	Terlaksananya pelaporan kinerja kerja instansi pemerintah		0		16000000		16000000		16000000		16000000		64000000		
1	15	12	Program	pengembangan Nilai Budaya; Berkembangnya adat budaya daerah		0		0		6150000		6150000		6150000		18450000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas			Kondisi Kinerja / Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir		target Akt SKPD Penanggung		
	1	2	3	Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	15	16	17	18	19
			Tahun	1	1	2995481200	1	3237029920	1	3691283732	1	4179067029	1	4816420181	6	21755840062		
5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)		1	1638796000	1	1966555200	1	2359866240	1	2831839488	1	3398207386	6	13762846314		
5	2		BELANJA LANGSUNG (BL)			1356685200		1270474720		1331417492		1347227541		1418212795	0	7992993749		
5	2	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran administrasi kantor	1	1181948200	1	1192083020	1	1203231322	1	1215494454	1	1228983900	6	7241686896		
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya kelancaran operasional	1	121560000	1	22132000	1	18700000	1	18700000	1	18700000	6	219392000		
3			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakelan Dinas		25500000									1	25500000		
5			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur	1	27677000	1	30444700	1	33489170	1	36838087	1	40521895.7	6	198400852.7		
13	31		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam per	18	7769000	18	7769000	18	7769000	18	7769000	18	7769000	108	42970000		
15			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Terlaksananya pelaporan kinerja kerja Instansi pemerintah	0		0	24000000	0	24000000	0	24000000	0	24000000	4	96000000		
1	17	15	Program pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya adat budaya daerah	0		0	1815000		51997000		52195000		106007000				

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prio Indikator Kinerja Program (Ou Satuan)	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir P target Akt					
		Volume	Vol (Rp.)	(Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					3017619362		3150099298		3347572228		3601977951		3826822046		16944090885		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					1582120762		1740332838		1914366122		2105802734		2316383008		9659005464		
2	BELANJA LANGSUNG					1435498600		1409766460		1433206106		1496175217		1510439038		7285085421		
13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran administrasi kantor				1336168600		1341033460		1346384806		1352271287		1358746415		6734604568		
13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ap	tersedianya sarana dan fasilitas kantor yang baik				36050000		24805000		27285500		30014050		33015455		151170005		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas				22800000		0		0		0		0		22800000		
13 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya A	Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur				12980000		14278000		15705800		17276380		19004018		79244198		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pi	Tertaksananya pelaporan kinerja kerja instansi pemerintah				60000000		60000000		16000000		16000000		16000000		60000000		
13 31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa				21500000		23650000		26015000		28616500		31478150		131259650		
1 17 15	Program pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya adat budaya daerah			0	0		0		1815000		51997000		52195000		106007000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kine Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pric target Akhir				
		Volume	Vol (Rp.)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					341860000		354200300		218290430		272995773		278169450.3		1465515953		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					0		0		0		0		0		0		
	BELANJA LANGSUNG					341860000		354200300		218290430		272995773		278169450.3		1465515953		
	Program Pelayanan Administrasi Per Terciptanya kelancaran administrasi kantor					182949000		187064900		171518490		174382439		177532782.9		893447611.9		
	Program Peningkatan Sarana dan Pra tersedianya sarana dan fasilitas kantor yang baik					133197000		146050000								279247000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tersedianya Pakalan Dinas					6000000		0		0		0		0		6000000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumi Meningkatkan kemampuan SDM Aparatur					0		0		12363000		12363000		12363000		37089000		
	Program Peningkatan Pengembangai Terlaksananya pelaporan kinerja kerja instansi pemerintah					6000000		6000000		16000000		16000000		16000000		60000000		
	Program Perencanaan Pembangunar Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam pembanguan d					13714000		15085400		16593940		18253334		20078667.4		83725341.4		
1	17	15	Program pengembangan Nilai Budaya Berkembangnya adat budaya daerah			0		0		0		1815000		51997000		52195000		106007000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prt Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kine Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prtc target Akhir			SKPD Penang		
		Volume	Vol (Rp.)	(Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					519705000		525164900		389605490		444696339		450294072.9		2329465802		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					0		0		0		0		0		0		
	BELANJA LANGSUNG					519705000		525164900		389605490		444696339		450294072.9		2329465802		
	Program Pelayanan Administrasi Perl Terciptanya kelancaran adminlstrasi kantor					349908000		353864900		338252490		341043839		344114322.9		1727183552		
	Program Peningkatan Sarana dan Pra tersedianya sarana dan fasilitas kantor yang baik					133197000		146050000		0		0		0		279247000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tersedianya Pakaian Dinas peg			28		13100000		0		0		0		0		13100000		
5	Program Peningkatan Kapasitas Suml Merlنگkatkan kemampuan SDM Aparatur					0		0		12363000		12363000		12363000		37089000		
	Program Peningkatan Pengembangai Terlaksananya pelaporan kinerja kerja instansi pemerintah					6000000		6000000		16000000		16000000		16000000		60000000		
	Program Perencanaan Pembangunar Tercapainya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan d					17500000		19250000		21175000		23292500		25621750		106839250		
1 17 15	Program pengembangan Nilai Budaya: Berkembangnya adat budaya daerah				0	0		0		1815000		51997000		52195000		106007000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Pr	Indikator Kinerja Program (Di Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priodi target Akhir:				
				Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	SKPD Penanggung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			TOTAL BELANJA			1910842000		2091892100		2335170710		2662640881		2995069709		11995615400		
5	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)			938925000		1126710000		1352052000		1622462400		1946954880		6987104280		
5	2		BELANJA LANGSUNG (BL)			971917000		965182100		983118710		1040178481		1048114829	0	5008511120		
1			Program Pelayanan Administrasi Per			884059000		889224100		893905710		899055481		904720229.1		4470964520	0	
2			Program peningkatan sarana dan pr			35100000		35100000		35100000		35100000		35100000		175500000		
			Program Peningkatan Disiplin Apar			13100000	0	0		0	0	0		0		13100000		
5			Program Peningkatan Kapasitas Surr			12363000		12363000		12363000		12363000		12363000		61815000		
17			Program Peningkatan Partisipasi Ma			21295000		21295000		21295000		21295000		21295000		106475000	0	
			Program Peningkatan Pengembanga			6000000		7200000		18640000		20368000		22441600	0	74649600	0	
1	17	15	Program pengembangan Nilai Buday			0	0	0		1815000		51997000		52195000		106007000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang	Urusan Pemerintahan dan Program Prior	Indikator Kinerja Program (Out Satuan)	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prior Target Akhir		SKPD Penanggung Jawab		
			Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)		17	18
					3022250000		3093917500		2528526025		2496866847		2341134196		13482694568		
					502250000		537407500		575026025		615277846.8		658347296		2888308668		
					2520000000		2556510000		1953500000		1881589000		1682786900		10594385900		
06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Kantor	704000000		659900000		610890000		611979000		618176900		3204945900		
06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Apa Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	130000000		640610000		316610000		338610000		258610000		1684440000		
06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur yang memadai	18000000		0		0		0		0		18000000		
06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya		Apa Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur yang memadai	100000000		150000000		0		0		0		250000000		
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem		Pe Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang memadai	3000000		6000000		6000000		6000000		6000000		27000000		
06	70	Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi		Tersedianya Dokumen RAD PRB dan RPB serta Terselenggaranya Koordinasi	530000000		385000000		375000000		270000000		275000000		1835000000		
06	71	Program Kerjasama/LSM dan Sektor Swasta		dalam Tercapainya Koordinasi kerjasama/LSM dan Sektor Swasta dalam Penanganan	50000000		100000000		100000000		100000000		100000000		450000000		
06	72	Program Keselamatan Pencegahan Dini dan		Tai Tersedianya Data dan berfungsinya Fasilitas Publik serta Sarana Penunjang	400000000		300000000		220000000		220000000		220000000		1360000000		
06	19	Program Peningkatan Keselamatan dan		Pencegahan Terselenggaranya Fasilitas Penanganan Bahaya Kebakaran	100000000		100000000		100000000		100000000		100000000		500000000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (Out Satuan)	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prioritas Target Akhir						
	Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	SKPD Penanggung Jawab				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
06 28 Program Pengendalian Banjir	Tertanganinya Penanganan Pengendalian Banjir Dalam masa Tanggapan Dis		200000000	110000000	120000000	130000000	0	560000000									
06 73 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tercapainya Kehidupan Masyarakat Pasca Bencana yang lebih baik dari s		285000000	105000000	105000000	105000000	105000000	705000000									

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Pr Indikator Kinerja Program (Satuan	3	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RP target Akhir 5			SKPD Penang.	
			Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	PROGRAM PENANGGULANGAN KEN Terbinanya kelompok UEPG kelompok					5		10000000	5	110000000	5	121000000		15	331000000		15	

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program (Satuan	Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri		target Akhir SKPD Penanggi
		Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	
	program peningkatan kapasitas IPTEI terciptanya industri modern		0		0		100000000		100000000		2150000000		2350000000		
	pengembangan sistem inovasi tekno terciptanya produk industr paket	0			0					1	1500000000	0	1500000000		
	penguatan kemampuan industri bert terciptanya industri moder paket	0			0	1	1000000000	1	1000000000		2000000000	0	2200000000		
	program pengembangan industri kec terciptanya pemasaran hasil yang optimal		106006000		106306007		110000000		150000000		0		472012007		
	program peningkatan kemampuan te terciptanya kemampuan para pengrajin dalam peningkatan r		200000000		0		100000000		0		250000000		550000000		
	program penataan struktur industri terciptanya sarana dan prasarana industri		0		0		130000000		100000000		100000000		930000000		
	program pengembangan sentra-sent tersedianya data base industri potensial		0		0		0		65000000		0		65000000		
	program perlindungan konsumen da Terwujudnya Sistem Usaha Perdagangan yang bersih dan Tr		54715000		54715002		0		0		50000000		159430002		
	program peningkatan dan pengemba terciptanya data base potensi unggulan daerah		0				50000000						50000000		
	program peningkatan efisiensi perda terciptanya penertiban pasar dan pendataan harga barang m		101935000		38293000		0		0		0		140228000		
	program pembinaan pedagang kaki li Terwujudnya Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang kaki		0		0		0		100000000		0		100000000		
	program peningkatan kualitas kelemri terciptanya data base kelembagaan koperasi yang akurat		71650000		121650002		200000000		50000000		50000000		493300002		

SKPK SATPOL PP DAN WH
URUSAN WAJIB

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prk Indikator Kinerja Program (Satuan)	Kondisi Kinerja P Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode I target Akhir SKF			SKPD Penanggung			
		Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	TOTAL BELANJA					2959753548		2962540553		3028524959		3117706246		3222723791		12471472068			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					859079023		859079023		859079023		859079023		859079023		1475618086		SATPOL PP WH	
	BELANJA LANGSUNG (BL)					2100674525		2103461530		2169445936		2258627223		2363644768		10995853982			
G1.	Program Pelayanan Administrasi Peril Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					1701120525		1730824630		1766469556		1809243467		1860572161		8868230339			
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prk Terlaksananya Pelayanan / unit				11	38018000		11	38018000	11	38018000		11	38018000		11	38018000	55	190090000
03.	Program peningkatan disiplin Aparat Meningkatkan Disiplin Aparat				122	52200000			0				0		0	122		52200000	
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sum Peningkatan sumber daya . kali				2	13268000		3	15921600	4	19105920	5	22927104	6	27512524.8	20		98735148.8	
15.	Program Peningkatan Keamanan dar Terlaksananya patroli Rutli kali				3648	113146500		3648	135775800	3648	162930960	3648	195517152	3648	234620582.4	18240		841990994.4	
16	Program Pemeliharaan Kantrantibms Terpeliharanya kamtibmas keg				2	182921500		2	182921500	2	182921500	2	192921500	2	202921500	10		944607500	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program F Indikator Kinerja Program (Outcom Satuan	Volume	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJF target Akhir		SKPD Penan	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
	TOTAL BELANJA					29418180234		30018350545		29607723927		28711271826		30295471775		1.48051E+11	DPPKD
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTI)	Th	1	1	20406648871	1	20406648871	1	20406648871	1	20406648871	1	20406648871	5	1.02033E+11		
	BELANJA LANGSUNG (BL)				9011531363		9611701674		9201075056		8304622955		9888822904		46017753952		
0 1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kantor			3190135484		3317190581		3448205156		3603690146		4485975159		18045196526		
0 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur			685800000	1	707960000		1123552000		148262400		327914880		2993489280	0	
0 3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		425	202200000										202200000		
0 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Day	Terlaksananya Pelatihan Formal bagi aparatur			304326000	1	150000000		150000000		150000000		150000000	1	904326000		
0 6	Program peningkatan Pengembangan Sisten	Meningkatnya Sistem Peraturan capaian Kinerja dan Keuangan			626032200	1	626032200		626032200		626032200		626032200	1	3130161000		
1 6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, I	Tertatanya Pemanfaatan Tanah			297875840	1	357451008		428941210		514729452		617675343	1	2216672853		
1 7	Program Peningkatan dan Pengembangan P	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2864076204	1	3543765123		2846638834		2948661969		3325329176	1	15528471306		
1 8	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola	terlaksananya pendataan data PBB		7	217678930	1	261214716	1	100000000	1	100000000	1	100000000	5	778893646	12	
2 0	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Ir	Meningkatnya Sistem Pengawasan keg		2	623406705	2	648088046	2	477705656	1	213246788	1	255896146	8	2218343341	11	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Pr	Indikator Kinerja Program (O Satuan	Kondisi Kir Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priod trgt Akhir 5			SKPD Penan
				Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					3496266464		3645764870		3956681899		4298690631		5028490236		20425894100		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)					2318158444		2549974288		2804971717		3085468889		3394015778		14152589116		
	BELANJA LANGSUNG					1178108020		1095790582		1151710182		1213221742		1634474458		6273304984		
07 01	Program Pelayanan Administrasi	Per	Terciptanya pelayanan administarsi kantor			740808020		647480582		659169182		672026642		686169848		3405654274		
07 02	Program Peningkatan Sarana dan Pr	Terpeliharanya kendaraan dinas				67100000		73810000		81191000		89310100		98241110		409652210		
	Program Peningkatan Disiplin Apar	tersedianya pakaian dinas				29200000		0		0		0		0		29200000		
01 06	Program Peningkatan Pengemban	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisa				6000000		6000000		6000000		6000000		6000000		30000000		
07 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	Perhubungan				150000000		165000000		181500000		199650000		219615000		915765000		
07 16	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan	fasilitas Perhubungan				0		0		0		0		0		0		
07 19	Program Pengendalian dan Pengamanan	lalu lintas				125000000		137500000		151250000		166375000		536602500		1116727500		
25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					60000000		66000000		72600000		79860000		37846000		366306000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prc Indikator Kinerja Program Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prik target Ak				
		Volume	Vol	(Rp.)		Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	SKPD Penangg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					5009750000		7578300000		1406130000		3646743000		1701417300		19342340300		
	BELANJA LANGSUNG					5009750000		7578300000		1406130000		3646743000		1701417300		19342340300		
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					82500000		90750000		99825000		109807500		120788250		503670750		
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					55000000		60500000		66550000		73205000		80525500		335780500		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					88000000		96800000		106480000		117128000		128840800		537248800		
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					27500000		30250000		33275000		36602500		40262750		167890250		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2350000000		6300000000		0		2100000000		0		10750000000		
	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					2406750000		1000000000		1100000000		1210000000		1331000000		7047750000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pertanggungjawaban

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan I Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kine Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri target Akhi			SKPD Penangge			
		Volume	Vol (Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17	18	19		
1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TOTAL					1150000000	1265000000	1391500000	3397550000	16198193996	23402243996							
	BELANJA LANGSUNG					1150000000	1265000000	1391500000	3397550000	16198193996	23402243996							
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya					450000000	495000000	544500000	598950000	658845000	2747295000							
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA					150000000	165000000	181500000	1133100000	3146410000	4776010000							
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan					200000000	220000000	242000000	266200000	4623264498	5551464498							
										4623264498								

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang	Urusan Pemerintahan dan Pr	Indikator Kinerja Program (Outs Satuan)	Kondisi Ki Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir P target Akhi			SKPD Pe
				Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	TOTAL					14555622611		15353106372		20730425109		18276621120		19977436732		84893211945		
20	1	01	BELANJA TIDAK LANGSUNG			7783101360		8561411496		9417552646		10359307910		11395238701		47516612113		
			BELANJA LANGSUNG			6772521251		6791694876		11312872464		7917313210		8582198031		37376599832		
20	1		Program pelayanan administarsi per kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran			5160692751		5549663526		5977783379		6448715217		6966740238		30103595111		
20	02		Program peningkatan sarana dan pr Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur			1419788500		1142217350		5256439085		1382082994		1520291293		6720819221		
			Program Peningkatan Disiplin Apar Tersedianya pakaian dinas			101300000		0		0		0		0		101300000		
20	05		Program peningkatan kapasitas sum Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah			15000000		16500000		18150000		19965000		21961500		91576500		
			Program penyelamatan dan pelestai Terdatanya arsip daerah			75740000		83314000		60500000		66550000		73205000		359309000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bldang	Urusan Pemerintahan	c	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Per Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RF Target Akhir			
						Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	TOTAL	BELANJA						64014088000	83245777524	1.02375E+11	74387761771	80979347090		4.05002E+11						
	BELANJA	TIDAK LANGSUNG (BTL)						3017524000	3319276400	3651204040	4016324444	4417956888		18422285772						
	BELANJA	LANGSUNG (BL)						60996564000	79926501124	98724248168	70371437327	76561390202		3.8658E+11						
1	Pelayanan	Administrasi	Perkantoran	Lancarnya	Kegiatan	Admin	Thn	1	1	831230000	1	869130000	1	911610000	1	962586000	1	1023757200	12	4598313200
2	Peningkatan	Sarana dan	Prasarana	Terpeliharanya	Kederaaan	Dinas/operasional	dengan baik			112000000	5	602000000	5	102000000	5	102000000	5	102000000	5	1020000000
3	Peningkatan	Disiplin	Aparatur	Meningkatnya	Disiplin	Ap: org				92	42500000						110		42500000	
4	Peningkatan	Pengembangan	S	Tersedianya	Dokumen	Lak	Keg			2	1	6000000	1	6000000	1	6000000	1	6000000	1	30000000
5	Perencanaan	tata Ruang		Terwujud	Kabupaten	Sime	dok			1	50000000						1		50000000	
6	Pembangunan	Jalan dan	Jemb	Memperlancar	Transportasi	Jalan yang	Presentatif			16905464000		45070000000		48674822168		44136550000		44739555502		1.99526E+11

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan c	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pe Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RF Target Akhli			SKPD Penang		
				Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7						1900000000		3440000000		3784000000		4162400000		4578640000		17865040000				
8				0	500	2500000000	2000	1000000000	2000	1000000000	2200	1100000000	2500	1250000000	10000	4600000000				
9				1	1	700000000	1	700000000	1	750000000	1	750000000	1	800000000	1	3700000000				
10				1	1	390000000	1	350000000	0	0	0	0	0	0	2	3890000000				
11						1560000000		565000000		620000000		620000000		220000000		2785000000				
12						8564279000		8157347950		14255316000		4650000000		4800000000		40426942950				
13				1	0		0	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0				
14								14217023174		24150500000		10178151327		15300000000		63845674501				
15				1	0		1	350000000	1	350000000	1	350000000	1	350000000	4	1400000000				
16				1	1	30316091000	1	1500000000	1	1575000000	1	1653750000	1	1736437500	4	36781278500				
17				0	1	350000000	1	250000000	1	250000000	1	250000000	1	250000000		1350000000				
18								3380000000		2970000000		2125000000		2125000000		10600000000				

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan F	Indikator Kinerja Program	Kondisi KI Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode R target Akhir				SKPD Pena
			Satuan Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						27325989445		19895909390		19354701328		19803072461		10451380707		96831053332			
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI)	Tersedianya Gaji dan Tun org	41	41	2389199445	41	2628119390	41	2890931328	41	3180024461	41	3498026907	205	14586301532	246		
		BELANJA LANGSUNG				24936790000		17267790000		16463770000		16623048000		6953353800		82244751800			
01 01		Program Pelayanan Administrasi Pe	Meningkatnya Pelayanan Kantor			624300000		587300000		609500000		591920000		594582000		3007602000			
01 02		Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mem:			83000000		91300000		93630000		93993000		94392300		456315300			
		Program Peningkatan Disiplin Apar.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur yang memadai			25800000										25800000	106		
01 05		Peningkatan Sumber Daya Aparatu	Meningkatnya Disiplin dan pelayanan Umum Aparatur			78690000		78690000		78690000		78690000		78690000		393450000			
01 15		Program Pengembangan Data / Infr	Tersedianya data hutbun			150000000		159000000		108900000		119790000		131769000		669459000			
01 06		Program Peningkatan Pengemban	Tersedianya LAKIP dan RFK			186000000		199000000		213300000		229030000		246333000	0	1073663000			
01 16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lal	Terlaksananya RHL Harf Menanam Nasional			100000000		110000000		121000000		133100000		146410000		610510000			
		Program Pengembangan Bibit Ungg	Bertambahnya Produksi Rambutan, mahoni, sawo, pala			20000000000		12000000000		12000000000		12000000000		20000000000		20000000000			
		Program Peningkatan Sumber Daya	Terciptanya Petani yang Profesional			30000000		30000000		30000000		30000000		30000000		150000000			
		Program Pengembangan Sarana da	Tersedianya jalan Produk M	3000	3000	500000000		550000000				0		0	6000	1050000000	9000		
01 19		Program Peningkatan Produksi Per	Terpeliharanya Kebun cengkeh			0		1000000000		500000000		500000000		500000000		2500000000			
01 17		Program Perlindungan dan Konsen	Terkendalinya Pengawasan Hutan			200000000		220000000		242000000		133100000		146410000		941510000			
		Program Peningkatan Penerapan T	Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian			355000000		390500000		429550000		472505000		519755500		2167310500			

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan F Indikator Kinerja Program	Kondisi Ki Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode R target Akhir			SKPD, Pena	
		Satuan	Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program Pembangunan Prasarana - Terbangunnya Jalan Produksi Pertanian/Perkebunan					320000000		352000000		387200000		425920000		468512000				1953632000
	Program Peningkatan Produksi Per Tersedianya Prasarana dan Sarana Produksi					2284000000		1500000000		1650000000		1815000000		1996500000				9245500000

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prk Indikator Kinerja Program (Satuan	3	4	Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Pri		target Akhir SKPD Pen		
				Volume	Vol	APBK (Rp.)	Vol	APBK (Rp.)	Vol	APBK (Rp.)	Vol	APBK (Rp.)	Vol	APBK (Rp.)	Vol	APBK (Rp.)	17	18	19
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	BELANJA						3746390569			11254307440		13376464060		17577722316		55720000940			
	BIAYA TIDAK LANGSUNG						1971494224		2109498820	2320448702		2552493572		2807742929		11565080367			
	BIAYA LANGSUNG						1774896345		7852215614	8933858739		10823970488		14769979387		44154920573			
	Program Pelayanan Administrasi Per Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang b						309417345		371300814	445560976.8		534673172.2		641607806.6	0	2302560115		0	
	Program Peningkatan Sarana dan Pra Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur						84000000		137600000	147520000		159424000		173708800		702252800			
	Program Peningkatan Disiplin Aparat Tercapainya keseragaman baju dinas aparatur						21300000		0	0		0		0		21300000			
	Program Peningkatan Kapasitas Suml Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengimplementa						8179000		9814800	11777760		14133312		16959974.4		60864846.4			
	Program Peningkatan Pengembangai Tercapainya proses pelaporan dan evaluasi kinerja SKPD						6000000		6000000	6000000		6000000		6000000		30000000			
	Program Peningkatan Ketahan Panga Tercapainya ketahanan pangan di kabupaten simeulue						16000000		4332500000	5209000002		5972120004		6897922406		22427542412			
	Program Peningkatan Penerapan Tek Meningkatnya kemampuan dan pemahaman petani tentang l						286500000		1030000000	1476000000		2212020000		4813060400	0	9817580400			
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna																	0	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prk Indikator Kinerja Program (Satuan	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Prik		target Akhir SKPD Pen
		Kondisi Kinerja	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	
	Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	
	Program Peningkatan Produksi Perta Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas hasil per		1043500000		1965000000		1638000000		1925600000		2220720000	0	8792820000	

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program (Output/Satuan)	Kondisi Kinerja Tahun 2013			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode target Akhir			SKPD Penanggung Jawab		
		Volume	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	TOTAL BELANJA					7445681982		8532960614		9542833096		6340337048		7329114758		39190927499		DKP
	Belanja Tidak Langsung					1576618611		1891942333		2270330800		2724396960		3269276352		11732565056		
	Belanja Langsung					5869063371		6641018281		7272502296		3615940089		4059838407		27458362444		
1 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang baik					441834430		447644873		454036360.3		461066996.3		468800696		2273383356		
1 02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					80994000		137192800		159631360		186557632		218869158.4		783244950.4		
1 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pakalan dinas harian					16800000		0		0		0		0		16800000		
1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengimplementasian Peraturan					0		40000000		144980000		173976000		208771200		927727200		
1 06	Program Peningkatan Pengembalian Terlaksananya pelaporan kinerja kerja Instansi pemerintah					60000000		60000000		60000000		60000000		60000000		300000000		
1	Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya penyusunan tata ruang kelautan perikanan tangkap dan pemanfaatan					0		100000000		0		0		0		1000000000		
1 22	Program Perencanaan Pembangunan Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan DKP					0		300000000		300000000		300000000		300000000		1200000000		
1 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terlaksananya pembinaan KUB perikanan					0		150000000		165000000		0		0		3150000000		
1 15	Program Pengembangan Data/Informasi Terlaksananya validasi data statistik perikanan di 138 desa					403900000		403900000		403900000		403900000		403900000		2019500000		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program (Output Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2013				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode target Akhir				
		Volume	Vol	(Rp.)		Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	Vol	(Rp.)	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 15	Program Peningkatan Kapasitas Ip Terlaksananya pelatihan PIRT (penomoran Industri rumah tangga) seb					29802000		0		0		0		0		29802000		
1 16	Program Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Potroll Laut di Perairan Kab. Simeulue					99000000		149000000		149000000		99000000		99000000		595000000		
1 17	Program Peningkatan Kesadaran c Terlaksananya penyuluhan perundang-undangan perikanan di 10 kec					28715000		28715000		28715000		28715000		28715000		143575000		
1 17	Program Pengendalian Pemanfaat Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi					78170000		35000000		35000000		0		0		148170000		
1 19	Program Peningkatan Kegiatan Bu Terlaksananya lomba masak serba Ikan di Kab. Simeulue					69695000		64695000		64695000		64695000		64695000		328475000		
1 20	Program Pengembangan Budidaya Tercapainya target produksi budic Ton		12.23	25		3039274126	30	3393201539	35	3732521692	40	60500000	47.77	66550000		10292047357		
1 21	Program Pengembangan Perikana Tercapainya target produksi tangk Ton		8549	10000		1790982558	11000	2019179070	12000	2293014884	13500	2621617860	14951	3015941432		11740735804		
1 22	Program Pengembangan Sistem P Terlaksananya kajian tentang perikanan					92910500		0		0		0		0		92910500		
1 23	Program Optimalisasi Pengelola Terlaksananya kajian tentang pemasaran hasil perikanan					54495757				0		0		0		54495757		
1 24	Program Pengembangan Kawasan Terlaksananya kajian tentang budidaya laut dan air payau					0				100000000		0		0		100000000		
						0		0		0		0		0		0		

SKPA

BPM

URUSAN WAJIB

Pendidikan

Dalam Rupiah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prk Indikator Kinerja Program (Satuan	Kondisi Kinerja Pa Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJN target Akhir SKPK			SKPD Penanggi		
		Volume	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Satuan	Volume	Kondisi Kinerja pada Awal RPJM Tahun 2012														SKPD Panang			
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPI target Akhir SKPK							
			Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)	Vol (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	TOTAL BELANJA					2.7174E+11		2.98914E+11			3.22805E+11			3.61686E+11			3.97855E+11			1.659E+12
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					10324826297		10841067612			11383120993			11952277042			12549890894			57051182838
	BELANJA LANGSUNG (BL)					2.61415E+11		2.88073E+11			3.17422E+11			3.49734E+11			3.85305E+11			1.60195E+12
	Program																			
	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																			
	Pemerataan dan Perluasan akses PAUD		23 unit						10		13			6		3			2	
	Kegiatan																			
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Kantor					1121308586		1353913376			1681818212			2078309490			2588548045			8823897709
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelancaran dan Kenyamanan Kerja Aparatur					7712736669		260773478.5			311666189.2			373533509.4			445935151.4			9104644998
	Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur					120062905.8		43950586.26			98840428.29			52000024.51			116658140.9			431512065.8
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					48938684.45		0			0			0			0			48938684.45
15	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Meningkatkan Pembudayaan Masyarakat Gampong					6838365507		7676702400			8353610331			9082670947			9859494486			41810843732
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG					726499354.4		893456996.7			1065238582			1270127895			1512119665			5467442503
17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG					2.40227E+11		2.72139E+11			2.9982E+11			3.28705E+11			3.61031E+11			1.50119E+12
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG					606829687.2		749357485.8			896737756.7			1073800506			1281357967			4608093412
19	PROGRAM PENINGKATAN IMUM MASYARAKAT DAN KELEMBAGAANNYA					4012972125		485428601			5932019898			7094518677			8460945502			30464902803

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1	Tahun 2013	APSK	(Rp.)	6	7
2	APSA	APSN	(Rp.)	8	9
3	APSK	(Rp.)	10	11	
4	APSA	APSN	(Rp.)	12	13
5	APSK	(Rp.)	14	15	
6	APSA	APSN	(Rp.)	16	17
7	APSK	(Rp.)	18		
8	APSA	APSN	(Rp.)	19	20
9	APSK	(Rp.)	21	22	
10	APSA	APSN	(Rp.)	23	24
11	APSK	(Rp.)	25	26	
12	APSA	APSN	(Rp.)	27	28
13	APSK	(Rp.)	29	30	
14	APSA	APSN	(Rp.)	31	

Tahun 2016

15	APSK	(Rp.)	16	17
16	APSA	APSN	(Rp.)	18
17	APSK	(Rp.)	19	
18	APSA	APSN	(Rp.)	20
19	APSK	(Rp.)	21	22
20	APSA	APSN	(Rp.)	23
21	APSK	(Rp.)	24	25
22	APSA	APSN	(Rp.)	26
23	APSK	(Rp.)	27	28
24	APSA	APSN	(Rp.)	29
25	APSK	(Rp.)	30	31

Tahun 2017

32	APSK	(Rp.)	33	34
33	APSA	APSN	(Rp.)	35
34	APSK	(Rp.)	36	37
35	APSA	APSN	(Rp.)	38
36	APSK	(Rp.)	39	40
37	APSA	APSN	(Rp.)	41
38	APSK	(Rp.)	42	43
39	APSA	APSN	(Rp.)	44
40	APSK	(Rp.)	45	46
41	APSA	APSN	(Rp.)	47
42	APSK	(Rp.)	48	49
43	APSA	APSN	(Rp.)	50
44	APSK	(Rp.)	51	52
45	APSA	APSN	(Rp.)	53
46	APSK	(Rp.)	54	55
47	APSA	APSN	(Rp.)	56
48	APSK	(Rp.)	57	58
49	APSA	APSN	(Rp.)	59
50	APSK	(Rp.)	60	61
51	APSA	APSN	(Rp.)	62
52	APSK	(Rp.)	63	64
53	APSA	APSN	(Rp.)	65
54	APSK	(Rp.)	66	67
55	APSA	APSN	(Rp.)	68
56	APSK	(Rp.)	69	70
57	APSA	APSN	(Rp.)	71
58	APSK	(Rp.)	72	73
59	APSA	APSN	(Rp.)	74
60	APSK	(Rp.)	75	76
61	APSA	APSN	(Rp.)	77
62	APSK	(Rp.)	78	79
63	APSA	APSN	(Rp.)	80
64	APSK	(Rp.)	81	82
65	APSA	APSN	(Rp.)	83
66	APSK	(Rp.)	84	85
67	APSA	APSN	(Rp.)	86
68	APSK	(Rp.)	87	88
69	APSA	APSN	(Rp.)	89
70	APSK	(Rp.)	90	91
71	APSA	APSN	(Rp.)	92
72	APSK	(Rp.)	93	94
73	APSA	APSN	(Rp.)	95
74	APSK	(Rp.)	96	97
75	APSA	APSN	(Rp.)	98
76	APSK	(Rp.)	99	100

SKPA

BPM

URUSAN WAJIB

Pendidikan

Dalam Rupiah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM Tahun 2012

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Prk Indikator Kinerja Program (Satuan	VOLUME	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM target Akhir SKPK														
			Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2015		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM target Akhir SKPK		SKPD Penang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
	TOTAL BELANJA					2.7174E+11		2.98914E+11		3.28805E+11		3.61686E+11		3.97855E+11		1.659E+12	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)					10324826297		10841067612		11383120993		11952277042		12549890894		57031182838	
	BELANJA LANGSUNG (BL) Program					2.61415E+11		2.88073E+11		3.17422E+11		3.49734E+11		3.85305E+11		1.60195E+12	
	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																
	Pemerataan dan Perluasan akses PAUD		23 unit			10		13		6		3		2			
	Kegiatan																
	Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan Kantor					1121308586		1359913376		1681818212		2078309490		2588548045		8823897709	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana A. Kelancaran dan Kenyamanan Kerja Aparatur					7712736669		260773478.5		311666189.2		373533509.4		445935151.4		9104644998	
	Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplin aparatur					120062905.8		43950586.26		98840428.29		52000024.51		116658140.9		431512085.8	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					48938684.45		0		0		0		0		48938684.45	
15	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASY Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Gampong					6838365507		7676702400		8353610391		9082670947		9859494496		41810843732	
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG					726499364.4		893456996.7		1065238582		1270127895		1512119665		5467442503	
17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG					2.40227E+11		2.72139E+11		2.99082E+11		3.28709E+11		3.61031E+11		1.50119E+12	
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG					606839687.2		749357495.8		896737756.7		1073800506		1281357967		4608093412	
19	PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA					4012972125		4955428601		5932019858		7094536677		8469943502		30464902803	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (**key performance indicator**). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 menuju '**Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat**' dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	4,27	4,48	4,70	4,94	5,19	5,45	5,45
1.2.	Laju inflasi kabupaten	%	5,36	5,20	5,04	4,89	4,74	4,60	4,60
1.3.	PDRB per kapita	Rp juta	7,35	7,42	7,50	7,57	7,65	7,72	7,72
1.4.	Persentase penduduk di bawah) garis kemiskinan	%	22,45	21,86	21,20	20,57	19,95	19,35	19,35
1.5.	Angka Pengangguran								
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan								
1.1	Angka melek huruf	%	9,93	9,94	9,96	9,98	9,99	100	100,00
1.2	Angka rata-rata lama sekolah (pakai tahun)	%	98,48	97,98	97,48	96,98	96,48	95,98	95,98
1.3	Angka partisipasi Kasar (APK)								
1.3.1	APK SD/MI/Paket A (sinkronkan dengan data di bab 2)	%	120,78	121,50	119,93	121,72	122,33	122,94	122,94
1.3.2	APK SMP/MTs/Paket B	%	102,86	102,96	103,07	103,17	103,27	103,38	103,38
1.3.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C	%	84,34	84,42	84,51	84,59	84,68	84,76	84,76
1.3.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan (pisahkan SD,SMP, SMA)	%							
1.4	Angka partisipasi Murni (APM)	%							
1.4.1	APM SD/MI/Paket A	%	97,75	97,84	97,94	98,04	98,14	98,23	98,23
1.4.2	APM SMP/MTs/Paket B	%	83,48	83,56	83,64	83,73	83,81	83,89	83,89

1.4.3	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	76,05	76,12	76,20	76,27	76,35	76,43	76,43
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Indeks pembangunan Manusia (IPM)		68,9	68,97	69,04	69,11	69,18	69,25	69,25
2.	Kesehatan								
2.1	Angka usia harapan hidup (Thn)	tahun	62,88	62,94	63,01	63,08	63,15	63,22	63,22
2.2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	295	100	40	10	5	0	0
2.3	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000/KH	35	30	25	20	10	-	-
2.4	Angka Kesakitan	%	28,09	27,99	27,90	27,81	27,72	27,63	27,63
3	Ketenagakerjaan								
	Angkatan kerja	org	22.225	22.313	21.644	21.211	20.787	20.810	20.810
Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1.	Pemuda dan OlahRaga								
1.1	Jumlah Grup kesenian	Grup	41	42	43	44	45	46	46
1.2	Jumlah Gedung		1	1	1	1	2	2	2
1.3	Jumlah Klub Olahraga	Unit	34	34	34	34	34	34	34
1.4	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	0	0	1	1	1	1	1
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Fokus Layanan Urusan Wajib									
1.	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan dasar:								
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah								
	7-12 tahun		99,18	99,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100
	13-15 tahun		95,34	95,56	96,00	96,05	96,95	97,00	97,00
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	7-12 tahun	10.000	112,37	109,22	106,17	103,19	100,30	97,49	97,49

	13-15 tahun	1.000	11,11	10,80	10,50	10,20	9,92	9,64	9,64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.	Rasio terhadap guru/murid								
	7-12 tahun		1: 17	7,20	7,40	7,60	7,82	8,04	8,04
	13-15 tahun		1: 9	9,25	9,51	9,78	10,05	10,33	10,33
1.2	Pendidikan Menengah								
1.2.1	Angka partisipasi sekolah								
	16-18 Tahun		78,81	81,02	83,29	85,62	88,01	90,48	90,48
1.2.2.	Ratio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%							
	16-18 Tahun	1.000	6,75	6,94	7,13	7,33	7,54	7,75	7,75
1.2.3.	Ratio guru terhadap murid	%							
	16-18 Tahun		10	10,28	10,57	10,86	11,17	11,48	11,48
	Penduduk yg berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (BPS)		98,85	99,04	99,23	99,41	99,60	99,79	99,79
2.	Kesehatan								
2.1	Rasio posyandu per satuan balita		162	181	177	182	185	192	192
2.2	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, pustu, polindes, RSUD		123	123	128	136	140	147	147
2.3	Ratio Rumah sakit per satuan penduduk		1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
2.4	Ratio Dokter per satuan penduduk		10,23	9,50	13,90	15,99	41,78	23,00	23,00
2.5	Ratio tenaga medis persatuan penduduk		252	289	295	287	337	399	399
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		139	14	23,9	3,64	4	48	48
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		84,73	86,42	93,00	75,45	70,00	70,30	70,30
2.8.	Cakupan Desa / kelurahan universal Child Immunization (UCI)		80,00	86,20	64,50	60,86	65,00	78,20	78,20
2.9.	Cakupan balita Gizi Buruk mendapat Perawatan			10	4,4	10	10	10	10
2.10.	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA		100	100	93	82	91	65	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD			0	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		60,01	68,66	80,00	69,90	2,00	85,00	85,00
2.13.	Cakupan Kunjungan bayi		155	188	94,5	79,87	81	81	81
2.14.	Cakupan Puskesmas		100	100	100	100	100	100	100
2.15	Cakupan Puskesmas Pembantu		88	88	73	80,4	81,8	87,7	87,7
3.	Pekerjaan Umum								
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	30,00	48,92	58,92	68,92	87,84	100	100
3.2.	Rasio jaringan irigasi	%	8,80	10,66	12,91	15,63	18,94	22,93	22,93
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	53,57	53,72	53,88	54,03	54,18	54,34	54,34
3.5.	Rasio tempat pemakaman Umum per satuan penduduk	1000	650,46	657,75	665,11	672,56	680,10	687,71	687,71
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1000	104,84	106,02	107,20	108,41	109,62	110,85	110,85
3.7	Rasio Rumah layak huni	%	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27
3.8	Rasio pemukiman layak huni	%	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22
3.9	Panjang jalan dilalui Roda 4	%	0,72	0,73	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76
3.10	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	%	95,96	96,49	97,02	97,56	98,10	98,64	98,64
3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM / jam)	%	42,97	78,26	142,53	259,57	472,73	860,95	860,95
3.12	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.13	Pembangunan turap di Wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		25,00	29,17	34,03	39,70	46,32	54,03	54,03
3.14	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	39,34	44,61	50,57	57,34	65,00	73,70	73,70
3.15	Lingkungan Pemukiman	%	0,67	0,75	0,83	0,92	1,02	1,13	1,13
4.1	Perumahan								
4.2	Rumah tangga pengguna air bersih	%	7,28	8,71	10,41	12,45	14,89	17,81	17,81
4.3	Rumah tangga pengguna listrik	%	77,18	82,83	88,90	95,41	102,39	109,89	109,89
4.4	Rumah tangga bersanitasi	%	53,57	60,16	67,55	75,86	85,19	95,66	95,66
4.5	Lingkungan pemukiman kumuh	%	4,05	4,04	4,02	4,01	3,99	3,98	3,98
4	Perencanaan Pembangunan								
4.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	9,72	9,60	9,48	9,37	9,25	9,14	9,14
4.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetakan dgn PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.4	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.5	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Perhubungan								
5.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13000
5.2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit	6	6	6	7	7	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Lingkungan Hidup								
6.1	Persentase penanganan sampah		49,48	50,08	50,69	51,31	51,94	52,57	52,57
6.2	Persentase Penduduk berakses air minum		13,95	14,12	14,29	14,47	14,65	14,82	14,82
7	Lingkungan Hidup								
7.1	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk		1,01	1,03	1,04	1,05	1,06	1,08	1,08
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1	Rasio KDRT	kasus	4	4	4	4	4	4	4
9	Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera								
9.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		6.128	6.203	6.278	6.355	6.433	6.511	6.511
9.2	Rasio Akseptor KB		10.537	10.666	10.796	10.927	11.061	11.196	11.196
9.3	Cakupan peserta KB aktif	%	10.537	10.666	10.796	10.927	11.061	11.196	11.196
9.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		7.449	7.540	7.632	7.725	7.819	7.915	7.915
10	Sosial								
10.1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	org	270	273	277	280	283	287	287
10.2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	org	3.006	3.043	3.080	3.117	3.155	3.194	3194
11	Ketenagakerjaan								
11.1	Angka partisipasi angkatan kerja	org	22,136	22	23	23	23	24	23,52
11.2	jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	org	52.305	52.943	53.589	54.243	54.905	55.574	55.574
11.3	Jumlah penduduk angkatan kerja	org	49.929	50.538	51.155	51.779	52.410	53.050	53.050
11.4	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)	org	52.098	52.734	53.377	54.028	54.687	55.354	55.354
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,40	67,21	68,03	68,86	69,70	70,55	71
12.1	Pencari kerja yang ditempatkan		320	324	328	332	336	340	340
12.2	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,40	7,49	7,58	7,67	7,77	7,86	7,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Koperasi Usaha kecil dan Menengah								
13.1	Persentase koperasi aktif		14,60	14,78	14,96	15,14	15,33	15,51	15,51
13.2	Jumlah koperasi aktif		20	20	20	21	21	21	21
13.3	Jumlah seluruh koperasi		137	139	140	142	144	146	146
14	Kepemudaan dan Olahraga								
14.1	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit	138	138	138	138	138	138	138
14.2	Jumlah Organisasi Olahraga	Unit	34	34	34	34	34	34	34
14.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg	2	2	2	2	2	2	2
14.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	Keg	3	3	3	3	3	3	3
15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
15.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		32	32	32	32	32	32	32
15.2	Jumlah PKK		9	11	11	11	11	11	11
15.3	PKK Aktif		139	139	139	139	139	139	139
16	Statistik								
16.1	Buku " Kabupaten Dalam Angka "	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.2	Buku " PDRB Kabupaten "	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1.	Pertanian								
1.1	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB	%	1,63	1,65	1,67	1,69	1,71	1,73	1,73
1.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	10,04	10,16	10,29	10,41	10,54	10,67	10,67
2.	Kehutanan								
2.1	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	9,61	9,73	9,85	9,97	10,09	10,21	10,21
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	%	9,44	9,56	9,67	9,79	9,91	10,03	10,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Kelautan dan Perikanan								
4.1	Produksi Perikanan	Ton	8.025,73	8.123,64	8.222,75	8.323,07	8.424,61	8.527,39	8.527,39
	Kontribusi perikanan terhadap PDRB								
5	Perdagangan								
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB	%	15,79	15,98	16,18	16,37	16,57	16,78	16,78
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1.	Perhubungan								
1.1.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		21,89	22	22	23	23	23	23
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (org)		12.234	12.383	12.534	12.687	12.842	12.999	12.999
1.3.	Jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga/bandara/terminal per tahun (org)		108.779	110.106	111.449	112.809	114.185	115.578	115.578
2.	Penataan Ruang								
2.1	Luas Wilayah Kebanjiran (%)		7,98	8,08	8,18	8,28	8,38	8,48	8,48
2.2	Luas Wilayah Perkotaan (%)		1,00	1,01	1,02	1,03	1,05	1,06	1,06
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jenis dan Jumlah bank dan Cabang	Unit	3	3	3	3	4	4	4
3.2	Jenis dan Jumlah Perusahaan asuransi dan cabang	Unit	3	3	3	4	5	5	5
3.3	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran	Unit	6.472	6.551	6.631	6.712	6.794	6.877	6877
3.4	Jenis, kelas dan jumlah penginapan / hotel	Unit	619	627	635	642	650	658	658
5	Komunikasi dan Informatika								
5.1	Rasio ketersediaan daya listrik		37,5	37,96	38,42	38,89	39,36	39,84	39,84

5.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik		18,85	19,08	19,32	19,55	19,79	20,03	20,03
-----	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun (2012–2017). Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun. Adapun Visi Bupati Simeulue **“Terwujudnya Simeulue yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat dalam Bingkai Masyarakat Madani”**. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2017, dan selanjutnya RKPK tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RABK Simeulue Tahun 2017. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 maka Pemerintah Kabupaten Simeulue akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2017 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 14 Juli 2012. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017 ini dijadikan pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap SKPK lingkup Pemerintah Kabupaten Simeulue. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Simeulue, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggungjawab dan diharapkan berperan serta dalam pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan (2012-2017).
2. Setiap SKPK Simeulue berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Kabupaten yaitu : RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017. Bagi SKPK yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Qanun RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Untuk menjalankan RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut: Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPK oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPK. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum SKPK, Musrenbang kabupaten serta penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRK sesuai pembagian daerah pemilihan. Rancangan Akhir RKPK disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang dengan mengacu pada hasil dari forum SKPK.
4. Dokumen RPJMD dan RKPK merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBK, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBK Simeulue.

Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Qanun ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

5. Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi SKPK dalam menyusun Rencana Strategis SKPK. Oleh karena itu, SKPK berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPK, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPK.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini guna menganalisa pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga ada konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu Bappeda berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012–2017 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Kabupaten Simeulue, isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Simeulue tahun 2012-2017 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

RPJMD ini merupakan pedoman bagi seluruh pemanagku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Simeulue serta searah dengan pembangunan Aceh dan Pembangunan Nasional selama 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2017 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan visi **“TERWUJUDNYA SIMEULUE YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT DALAM BINGKAI MASYARAKAT MADANI”**.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan yang seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRK Simeulue, serta kerjasama dengan masyarakat sipil dan kemitraan dengan pihak swasta/ pihak ketiga.